



Paniradya Kaistimewan  
ပါဏိရာဌာ ကေစတိမေဿာ

DIY 1945-2022

# DIY 1945-2022

**Keistimewaan Yogyakarta  
dalam Kepemimpinan  
Sultan HB IX dan Sultan HB X**

**Tim Penulis:  
Haryadi Baskoro  
Wawan Isnawan  
Bahrul Fauzi Rosyidi  
Livy Laurens**

Di era digital yang rentan disinformasi ini, informasi dan edukasi tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus valid secara akademis, ilmiah, akurat, serta terpercaya. Paniradya Kaistimewan bekerjasama dengan beberapa penulis berusaha menerbitkan buku sosialisasi Keistimewaan DIY yang berbasis riset dan budaya tulis yang diharapkan dapat menjadi panduan resmi untuk dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai konten sosialisasi yang bersifat populer. Salah satu buku yang diterbitkan oleh Paniradya Kaistimewan adalah Buku “DIY 1945-2022 : Keistimewaan Yogyakarta dalam Kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X”.

Buku ini memberikan gambaran bagaimana keistimewaan DIY dimulai pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, hingga berkembang sampai saat ini dibawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dan jika mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, maka program kegiatan melalui Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 sudah akan genap memasuki usia 10 tahun pelaksanaannya yang juga merupakan akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022. Banyak perkembangan dan kemajuan yang dapat dirasakan oleh Masyarakat DIY, namun tentunya juga masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang menjadi pembelajaran dan upaya peningkatan dan perbaikan secara terus menerus berkelanjutan.



Paniradya Kaistimewan  
ပါဏိရာဌာ ကေစတိမေဿာ

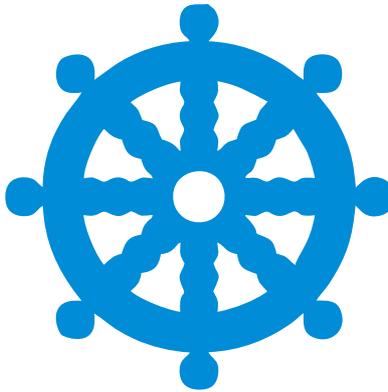


9 786237 120124



# DIY 1945-2022

Keistimewaan Yogyakarta dalam  
Kepemimpinan  
Sultan HB IX dan Sultan HB X



**Tim Penulis:**  
**Haryadi Baskoro**  
**Wawan Isnawan**  
**Bahrul Fauzi Rosyidi**  
**Livy Laurens**

# DIY 1945-2022

**Keistimewaan Yogyakarta dalam Kepemimpinan  
Sultan HB IX dan Sultan HB X**

@Yogyakarta, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*All Right Reserved*

## **Kepengarangan**

### **Penulis :**

Haryadi Baskoro

Wawan Isnawan

Bahrul Fauzi Rosyidi

Livy Laurens

### **Editor :**

Yulius Felicianus, S.E.

### **Layouter :**

Matheus Dwi Rubiyanto

**ISBN :9786237120124**

**Halaman : x + 240 Hal.**



## **Penerbit :**

Best Publiser (Galangpress Group) Anggota Ikapi

## **Bekerjasama Dengan :**

Paniradya Kaistimewan Yogyakarta

## **Percetakan :**

Tandabaca Kinarya Cipta

Cetakan I : Februari 2022

Cetakan II : Agustus 2022



# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Rahmat-Nya maka buku “DIY 1945-2022 : Keistimewaan Yogyakarta dalam Kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X” dapat dilaksanakan dan selesai tepat waktu sesuai dengan harapan semua pihak.

Di era digital yang rentan disinformasi ini, informasi dan edukasi tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus valid secara akademis, ilmiah, akurat, serta terpercaya. *Paniradya Kaistimewan* bekerjasama dengan beberapa penulis berusaha menerbitkan buku sosialisasi Keistimewaan DIY yang berbasis riset dan budaya tulis yang diharapkan dapat menjadi panduan resmi untuk dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai konten sosialisasi yang bersifat populer. Salah satu buku yang diterbitkan oleh *Paniradya Kaistimewan* adalah Buku “DIY 1945-2022 : Keistimewaan Yogyakarta dalam Kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB

Buku ini memberikan gambaran bagaimana keistimewaan DIY dimulai pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, hingga berkembang sampai saat ini dibawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dan jika mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, maka program kegiatan melalui Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 sudah akan genap memasuki usia 10 tahun pelaksanaannya yang juga merupakan akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM D) 2017-2022. Banyak perkembangan dan kemajuan yang dapat dirasakan oleh Masyarakat DIY, namun tentunya juga masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang menjadi pembelajaran dan upaya peningkatan dan perbaikan secara terus menerus berkelanjutan.

Kepada para Penulis serta seluruh tim yang berkontribusi dalam penulisan buku ini. Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan

apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam penyusunan buku ini, mulai dari pengumpulan data, melakukan *focus group discussion (FGD)* hingga terbit buku ini. Semoga dapat menjadi bahan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Terima Kasih dan Semoga bermanfaat.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*





## Kata Pengantar Tim Penulis

Judul buku ini mengundang tanya, mengapa periode 1945-2022? Pertama, tahun 1945 adalah tahun bergabungnya Nagari Yogyakarta dengan Negara RI. Di tahun ini pulalah Keistimewaan DIY mulai ditegaskan, dimulai dengan Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai embrio Keistimewaan DIY.

Kedua, tahun 2022 adalah akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY periode 2017-2022. Pada tahun 2022, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY genap berumur 10 tahun. Karena itu tahun ini menjadi tonggak untuk melanjutkan babak selanjutnya dari implementasi Keistimewaan DIY.

Adapun sub judul buku ini menjelaskan pokok persoalan penting di dalam Keistimewaan DIY, yaitu kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono adalah satu kesatuan. Tujuan Keistimewaan DIY menurut Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) adalah menciptakan Pemerintah Daerah DIY yang demokratis dengan pengisian jabatan gubernur oleh Sultan yang bertahta dan pemilihan anggota-anggota DPRD DIY.

Dalam periode 1945-2022 itu, Keistimewaan DIY bertumbuh dan berkembang di bawah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX dan Sultan Hamengku Buwono X. Karena itu untuk memahami Keistimewaan DIY, kita perlu mempelajari kepemimpinan dua Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut.

Buku ini adalah bahan sosialisasi Keistimewaan DIY yang disajikan secara ilmiah populer. Pembaca dari semua lapisan dan latar belakang pendidikan diharapkan mudah mencernanya. Generasi muda pun bisa mengambil saripati pelajaran keteladanan yang inspiratif untuk dipraktikkan dalam kehidupan masa kini.

Selamat membaca.

Tim Penulis

Wawan Isnawan

Haryadi Baskoro

Bahrul Fauzi Rosyidi

## Daftar Isi

Kata Pengantar Tim Penulis.....	vii
Pendahuluan .....	1
Bagian I Kepemimpinan Sultan HB IX .....	7
Memimpin Perubahan .....	7
Mendukung Pendirian Negara .....	19
Menegaskan Keistimewaan DIY .....	33
Menyelamatkan Negara .....	49
Mengatasi Kritis .....	59
Memimpin Bangsa dengan Memberi Contoh .....	73
Memihak Rakyat .....	85
Memimpin dengan Visi Global .....	93
Bagian II Kepemimpinan Sultan HB X .....	107
Meneguhkan Tahta untuk Rakyat.....	107
Memimpin Perubahan : Gerakan Nasional Reformasi .....	117
Memihak Rakyat .....	127
Merajut Keindonesiaan dengan Memberi Contoh ...	139

Menegaskan Keistimewaan DIY .....	147
Mengimplementasikan Keistimewaan DIY .....	155
Memimpin DIY dengan Visi Global.....	165
Bagian III Keistimewaan DIY dalam Kepemimpinan Sultan yang Betahta .....	173
Keistimewaan DIY 1945-2022 .....	173
Model Kepemimpinan Sultan dalam Keistimewaan DIY .....	181
Penutup .....	187
Daftar Pustaka .....	189
Lampiran 1 : Pidato Jumenengan Sri Sultan Hamengku Buwono X.....	191
Lampiran 2 : Bab 4 Buku “Merajut kembali Keindonesiaan Kita” .....	199
Lampiran 3 : Pidato Visi Misi Gubernur DIY Tahun 2017-2022 .....	215

# Pendahuluan

Perkembangan DIY sejak 1945 sampai 2022 – dari saat bergabungnya Nagari Yogya ke dalam Negara RI hingga satu dekade pascaterbitnya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY – menunjukkan kekuatan Keistimewaan DIY itu. Dinamika selama rentang waktu itu tidak lepas kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX dan Sultan Hamengku Buwono X.

Keistimewaan DIY telah teruji lintas rezim, lintas zaman, dan lintas generasi. Meskipun di era Orde Baru DIY dan DI Aceh nyaris dihapuskan, akhirnya keduanya tetap dinyatakan sebagai Daerah Istimewa di dalam NKRI. Meskipun Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY tak tuntas di era Presiden Megawati dan Presiden Abdurrahman Wahid, Keistimewaan DIY tetap berlanjut. Bahkan ketika pembahasan RUUK menjadi sangat alot dan penuh gejolak di era kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akhirnya Keistimewaan DIY diteguhkan dengan disahkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Keistimewaan DIY telah terbukti tangguh melewati berbagai tantangan jaman. Ketika Indonesia tidak aman karena infiltrasi asing yang hendak kembali menguasai Indonesia, Yogyakarta dengan keistimewaannya menjadi benteng pertahanan terakhir dengan menjadi Ibukota RI. Ketika negara terguncang krisis

dan rakyat bergejolak karena tidak puas dengan rezim Orde Baru, Yogyakarta dengan keistimewaannya menjadi barometer dan generator Gerakan Nasional Reformasi.

Perjalanan Keistimewaan DIY selama periode 1945-2022 itu memantik pertanyaan, pertama, bagaimana karakteristik masing-masing kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X? Kedua, bagaimana dinamika Keistimewaan DIY di dalam kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X? Ketiga, bagaimana kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X itu menjadi model kepemimpinan Sultan Yogyakarta yang bertahta yang ditetapkan menjadi Gubernur DIY?

Pembahasan pertanyaan pertama akan diuraikan dalam Bagian I dan Bagian II buku ini. Bagian I membahas karakteristik kepemimpinan Sultan HB IX. Bagian II membahas karakteristik kepemimpinan Sultan HB X. Kepemimpinan beliau berdua tentu saja berkaitan dengan Keistimewaan DIY. Namun kepemimpinan beliau berdua berlingkup dan berdampak bukan hanya di dalam internal Daerah Istimewa Yogyakarta namun mencakup ranah nasional dan internasional. Jadi dari Bagian I dan Bagian II diperoleh gambaran tentang jangkauan kapasitas kepemimpinan beliau berdua.

Bagian III membahas bagaimana dinamika Keistimewaan DIY di dalam kepemimpinan kedua Sultan tersebut. Pertama akan dibahas bagaimana hal

itu terjadi selama periode 1945-2022. Kedua, dibahas bagaimana Sultan HB IX dan Sultan HB X menjadi model kepemimpinan Sultan Yogyakarta yang bertahta yang ideal di dalam Keistimewaan DIY.

Tabel  
Sistematika Penulisan

Bagian I	Bagian II	Bagian III
Kepemimpinan Sultan HB IX	Kepemimpinan Sultan HB X	Kaistimewaan DIY dalam Kepemimpinan Sultan yang bertahta
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin Perubahan</li> <li>2. Mendukung Pendirian Negara</li> <li>3. Menegaskan Keistimewaan DIY</li> <li>4. Menyelamatkan Negara</li> <li>5. Mengatasi Krisis</li> <li>6. Memimpin Bangsa dengan Memberi Contoh</li> <li>7. Memihak Rakyat</li> <li>8. Memimpin dengan Visi Global</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Meneguhkan Tahta untuk Rakyat</li> <li>10. Memimpin Perubahan: Gerakan Nasional Reformasi</li> <li>11. Memihak Rakyat</li> <li>12. Merajut Keindonesiaan dengan Memberi Contoh</li> <li>13. Menegaskan Keistimewaan Yogya</li> <li>14. Mengimplementasikan Keistimewaan</li> <li>15. Memimpin dengan Visi Global</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Keistimewaan DIY 1945-2022</li> <li>17. Model Kepemimpinan Sultan dalam Keistimewaan DIY</li> </ol>

Ada banyak sumber literatur yang memberikan informasi tentang kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X. Adapun buku yang sifatnya masih berupa “pengantar” ini mengacu pada beberapa buku yang telah dikenal luas, menyebar, dan mudah dipahami, Beberapa buku itu antara lain adalah.

- Buku “Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX”. Buku ini terbit pada tahun 1982, diprakarsai oleh Panitia Buku Peringatan 70 tahun (1912-1982) Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Materi buku setebal 388 halaman ini dihimpun oleh tokoh-tokoh nasional di antaranya Muhammad Roem, Mochtar Lubis, Kusniyati Mochtar, dan S. Maimoen. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Gramedia dengan penyunting Atmakusumah. Selain menyajikan informasi dari banyak tokoh, buku ini juga memuat hasil wawancara langsung dengan Sultan HB IX itu sendiri.
- Buku “Sri Sultan, Hari-hari Hamengku Buwono IX”. Buku ini merupakan “Sebuah Presentasi Majalah Tempo” mengenai perjalanan hidup Sultan HB IX sampai wafatnya pada 1988. Penyajiannya kronologis dan dilengkapi foto-foto berwarna peristiwa pemakaman Sultan HB IX pada 1988.

- Buku “Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat”. Buku yang diterbitkan oleh Harian Bernas bersama Penerbit Grasindo ini melaporkan perjalanan kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X sejak dinobatkan menjadi raja pada 1989 hingga masa Reformasi 1998. Buku yang disunting oleh A. Ariobimo Nusantara dan terbit pada 1999 ini merupakan karya bersama beberapa penulis/jurnalis yaitu Y.B. Margantoro, RPA Suyanto Sastroatmojo, Baskoro Muncar, Agoes Widhartono, Ali Subchi, dan Philipus Jehamun.
- Buku “Merajut Kembali Keindonesiaan Kita”. Buku karya Sultan Hamengku Buwono X ini berisi renungan dan pemikiran-pemikiran beliau tentang Yogyakarta dan Indonesia. Buku yang diterbitkan oleh Gramedia pada 2007 ini memberikan gambaran tentang visi kenegarawanan Gubernur DIY dan Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini.



# BAGIAN I

## Kepemimpinan Sultan HB IX

### Bab 1.

#### Memimpin Perubahan

*Sultan Hamengku Buwono IX adalah sosok Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang membawa perubahan kultural dan politis Nagari Yogyakarta.*

Sebelum naik tahta menjadi Sultan Hamengku Buwono IX pada 18 Maret 1940, Gusti Raden Mas Dorodjatun yang lahir pada 12 April 1912 menempuh pendidikan bernuansa barat. Setelah menyelesaikan pendidikan di Eerste Europese Lagere School dan Neutrale Europese Lagere School di Yogyakarta, ia melanjutkan studi di HBS di Semarang dan Bandung. Kemudian Henkie (demikian ia dipanggil di masa mudanya) melanjutkan studi di Belanda sampai di tingkat doktoral di Rijksuniversiteit , Leiden.

Sejak kanak-kanak, Henkie diarahkan oleh ayahandanya (Sultan Hamengku Buwono VIII) untuk berinteraksi lintas budaya. Dalam buku “Tahta untuk Rakyat” (1982) dicatat bahwa ketika baru berumur 4 tahun, Henkie sudah dipindahkan dari rumah ayahandanya untuk tinggal *in de kost* di rumah sebuah keluarga berkebangsaan Belanda. Kepala rumah tangganya bernama Mulder, seorang Kepala Sekolah Neutrale Hollands Javaanse Jongens School.

Pengalaman bersosialisasi sejak kecil itu membangun kepribadiannya menjadi luas, terbuka, dan progresif.

### **Perubahan Kebudayaan**

Sultan HB IX mengawali kiprah dan karya kepemimpinannya sebagai pembaharu kebudayaan. Pengalaman berinteraksi dengan orang-orang Barat, hidup dunia Barat, serta menuntut ilmu dalam pendidikan Barat membuatnya terbuka pada modernitas. Meskipun demikian ia tidak terhanya dalam arus budaya Barat itu namun justru bertambah komit untuk melestarikan budaya aslinya.

Visi dan kebijakannya sebagai pembaharu budaya terlihat jelas saat momen penobatannya sebagai raja pada tahun 1940. Waktu itu, 18 Maret 1940, Gubernur Lucien Adam atas nama Pemerintah Hindia Belanda melakukan dua kali penobatan sekaligus. Pertama, ia menobatkan Gusti Raden Mas Dorodjatun sebagai Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram, yang menunjukkan posisi sebagai Putra Mahkota Kasultanan Yogyakarta. Kedua, penobatan sang Putra Mahkota itu sebagai Sultan Yogyakarta dengan gelar “Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping IX”. Dalam buku “Tahta untuk Rakyat” (1982: hal 53) ditulis pidato beliau yang sangat progresif soal kebudayaan, cuplikannya sebagai berikut.

*Dat te taak die op mij rust, moeilijk en zwaar is, daar bem ik mij ten volle van beurst, vooral waar het hier goat de Westerse en de Oosterse geest tot elkaar te brengen, deze beide tot een harmonische samenwerking te doen overgaan zonder de laatste haar karakter doen verliezen. Al heb ik een uitgesproken Westerse opvoeding gehad, toch ben en blijf ik in de allereerste plaats Javaam. Zo zal de adat, so deze niet remmend werkt op de ontuwikkeling , een voorname p;aats blijven innemen in de traditierijke Keratom. Mage ik eindigen met de belofte dat ik de belangen van Land en. Volk zal behartigen naar mijn beste weten en kunnem.*

Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerjasama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengeyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertamanya saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam Keraton yang kaya akan tradisi ini. Ijinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya.

Dari pidato itu sangat jelas bahwa HB IX bukan sosok Sultan yang kolot dan anti perubahan. Ia terbuka dengan budaya asing (Barat) dan bisa menerimanya manakala tidak merusak kepribadian bangsa sendiri. Ia melihat baik budaya Barat maupun budaya Timur (Jawa) adakah kekuatan-kekuatan yang perlu diharmonisasikan, dipadukan, dan dicari titik temunya.

Namun di dalam visi dan sikapnya yang pro-perubahan itu, Sultan HB IX tidak mau jika “*wong Jawa ilang Jawane*”. Di dalam sikap kulturalnya yang dinamis dan progresif itu, ia menegaskan bahwa “selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam Keraton yang kaya akan tradisi...”

Sikap pro-perubahan kebudayaan itu, Sultan HB IX tidak sebatas bernarasi, tetapi secara praktis membuka kran perubahan itu sendiri. Sebagai contoh yang untuk ukuran saat itu merupakan hal baru adalah suasana demokratis yang dihembuskan dalam event penobatan (*jumenengan dalem*) itu. Monarki Yogyakarta tidak lagi terlihat dan terasa kaku dan hirarkis. Suasana penobatan tetap sakral dan sangat berwibawa, tetapi demokratis dan humanis. Hal itu dirasakan langsung dan dilaporkan oleh dua orang wartawan yang ikut hadir dalam acara penobatan itu. Dalam buku “Tahta untuk Rakyat” (1982: hal 49) dicatat laporan seorang wartawan bernama Bramono sebagai berikut.

*“Wonten in Siti Hinggil ing Bangsal Kentjono kaparingan loenggoeh ing koersi, dados satoenggil kaliyan para bendara lan tamoe-tamoe Walandi. Toemrap sedjarah Ngayogyokarta kawontenan waoe pantjen pantes dipoen pengeti, djalaran kalampahanipoen pantjen saweg sapisan poenika, sarta kapinoedjon. R. Roedjito kaliyan koela (Bramono) ingkang dados pepoetjoek, oetawi dados tiyang ingkang kaping sapisanan ngraosaken doemadosipoen ewah-ewahan kaseboet ing nginggil...”*

Di Siti Hinggil dan Bangsal Kencono ini kami diberi tempat duduk di kursi bersama-sama para bangsawan dan para tamu bangsa Belanda. Sepanjang sejarah Yogyakarta, kejadian ini sungguh pantas dicatat karena memang baru pertama kali ini terjadi dan kebetulan R. Roedjito dan saya (Bramono) yang pertama kali mengalaminya atau menjadi orang yang untuk pertama kali boleh merasakan adanya perubahan besar tersebut....

Bramono mencatat peristiwa itu sebagai perubahan (ewah-ewahan) yang baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah Yogyakarta (*Toemrap sedjarah Ngayogyokarta kawontenan waoe pantjen pantes dipoen pengeti, djalaran kalampahanipoen pantjen saweg sapisan poenika*).

Lima tahun kemudian, Nagari Yogyakarta (Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman) bergabung dengan Negara Indonesia. Hal itu berimplikasi pada perubahan sosio-kultural yang radikal. Perubahan itu berjalan mulus karena kran perubahan sudah dibuka oleh Sultan HB IX sejak hari penobatannya pada 1940 tersebut.

### **Perubahan Politik**

Sultan HB IX bukan hanya pemimpin perubahan budaya tetapi juga pemimpin perubahan politik. Dalam hal politik, ia mempunyai kemampuan untuk “melihat perubahan” dan “menjalankan perubahan”. Tentang kemampuan melihat perubahan, ternyata hal itu bukan sekedar kemampuan untuk menyusun visi misi dan program masa depan, tetapi Sultan HB IX punya intuisi yang akurat dalam mengambil keputusan yang menentukan masa depan.

Cara Penjajah Belanda mengendalikan dan berusaha menundukkan pemerintahan kerajaan-kerajaan Jawa adalah dengan mengadakan perjanjian-perjanjian. Pada awalnya, perjanjian itu bersifat perjanjian ekonomi yang menyangkut kesepakatan perdagangan. Sejak datang ke Indonesia sampai pada tahun 1705, VOC sudah mengadakan 111 perjanjian perdagangan dengan kerajaan Mataram Islam.

Setelah berhasil melakukan intervensi yang semakin kuat, perjanjian-perjanjian yang dibuat merambah ke

bidang politik (disebut *politiek contract*). Ada politik kontrak jangka pendek (*korte verklaring*) dan ada pula politik kontrak jangka panjang (*lange contract*). Perjanjian-perjanjian politik itu senantiasa merugikan pihak pribumi (Mataram dan kemudian Kasultanan). *Politiek contract* terakhir antara Kasultanan dan Belanda dibuat antara Sri Sultan HB IX dengan Gubernur Lucien Adam 1940.

Sebelum GRM Dorodjatun naik tahta menjadi Sultan HB IX, Belanda menyodorkan politik kontrak yang merugikan pihak Kasultanan, sebagai berikut:

1. Soal jabatan patih. Seorang patih harus mengemban dwi-kesetiaan, mengabdikan kepada dua pihak. Di satu sisi ia adalah pegawai Pemerintah Hindia Belanda dan di sisi lain ia adalah pegawai Kasultanan. Dwi-kesetiaan itu ditegaskan dalam logo topi yang dikenakan oleh pejabat tersebut, yaitu di satu sisi ada lambang singa Belanda dan di sisi lain ada lambang sayap bersinar (*lar praba*) Kasultanan.
2. Soal Dewan Penasihat. Komposisi dewan ini bersifat 50-50, separuh diusulkan oleh Gubernur Belanda dan separuhnya oleh Sultan. Dengan demikian dewan terbelah menjadi dua.
3. Soal Prajurit Kraton. Prajurit Kraton dijadikan suatu legiun yang merupakan bagian dari tentara Hindia Belanda di bawah komando KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Pihak Kasultanan tidak punya otoritas untuk memerintah mereka namun wajib menggaji mereka.

GRM Dorodjatun sangat berkeberatan sehingga proses perundingan mejadi alot dan lama (November 1939 – Februari 1940). Sememntara, Lucien Adam yang adalah seorang ahli kebudayaan Jawa yang cerdas terus gencar dalam melakukan lobi-lobi. Tetapi, saat sedang tiduran sore di suatu senja di bulan Februari 1940, tiba-tiba GRM Dorodjatun mendengar bisikan gaib (*wisik*), "*Tole tekena wae, Landa bakal lunga saka bumi kene*" (Nak, tanda tangani saja kontrak itu sebab Belanda akan pergi dari daerah ini). Benar, dua tahun setelah Henkie menandatangani perjanjian itu (1940) dan kemudian naik tahta (*jumenengan dalem*), Belanda pergi dari bumi pertiwi sebab Jepang datang menjajah Indonesia (1942). Catatan peristiwa gaib yang diungkap dalam buku "Tahta untuk Rakyat" itu menunjukkan bagaimana HB IX mampu melihat perubahan di masa depan.

Ketika tiba momennya, Sultan HB IX tidak membuang waktu untuk mewujudkan perubahan politik itu. Hal itu sudah terlihat di jaman pendudukan Jepang setelah Belanda pergi dari Indonesia. Dalam rangka mengurangi kekuasaan Patih Dalem atau *Sumotyokan* yang berpotensi berpihak pada penjajah, Sultan HB IX melakukan perubahan politik dengan membentuk jawatan-jawatan yang disebut *Paniradya*. Segala urusan pemerintahan yang semula ditangani oleh *sumotyokan* didistribusikan kepada para *Paniradya*. Tim *Paniradya* bertanggung jawab langsung kepada Sultan HB IX. Jadi,

tim itu merupakan “kabinet” yang berada di bawah kepemimpinan Sultan HB IX secara langsung. Dengan cara demikian, kekuasaan *Sumotyokan* dikurangi bahkan diambil alih oleh Sultan HB IX. Menurut Sujamta (1988), tim *Paniradya* itu terdiri dari: (1) Paniradya Kapanitiaan atau Kantor Sekretariat, (2) Paniradya Ayahan Umum atau Jawatan Urusan Umum, (3) Paniradya Wiyatapraja atau Jawatan Pendidikan dan Kebudayaan, (4) Paniradya Ekonomi atau Jawatan Perekonomian, (5) Paniradya Yayasan Umum atau Jawatan Pekerjaan Umum, (6) Paniradya Penerangan dan Propaganda.

Keistimewaan Yogyakarta pada era pendudukan Jepang itu memungkinkan Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta melakukan perubahan dan pembenahan sistem pemerintahan. Kasultanan Yogya melakukan reorganisasi sistem pemerintahan (reorganisasi pangreh praja) pada bulan April 1945. Dalam reorganisasi itu, kawedanan (distrik) dihapus. Setiap Kabupaten langsung dibagi menjadi beberapa asistenan dan dinamakan kapanewon yang dipimpin oleh panewu pangreh praja. Kawedanan dan asistenan yang berada di dalam Kabupaten Kota Yogyakarta dihapus. Kabupaten kota dibagi menjadi beberapa Kemantren yang masing-masing dipimpin oleh Mantri Pangreh Praja. Setiap Kemantren dibagi menjadi beberapa Rukun Kampung (*Aza Shokai*). Setiap rukun kampung terdiri atas beberapa Rukun Tetangga (*Tonari Kumi*).

## Perubahan Politik 1945

Kiprah dan karya Sang Pemimpin Perubahan Sultan HB IX selama lima tahun pertama kepemimpinannya (1940-1945) akhirnya memuncak pada peristiwa di tahun 1945. Setelah Republik Indonesia diproklamkan, Sultan HB IX bersama Paku Alam VIII bertindak untuk menggabungkan Nagari Yogyakarta ke dalam Negara RI. Hal ini jelas merupakan tindakan politik yang radikal, apalagi sebenarnya Kasultanan Yogyakarta mempunyai peluang untuk tetap mandiri sebagai kerajaan yang merdeka.

Sebagai pemimpin perubahan, Sultan HB IX adalah visioner yang didukung penuh para kader dan masyarakat luas. Komitmen Sultan HB IX didukung penuh oleh para *abdi dalem* Kasultanan yang mempersembahkan sebuah mosi “PEKIK” (Pemuda Kita Kasultanan) pada tanggal 27 September 1945. Dalam mosi itu, mereka berjanji untuk, pertama, selalu berdiri di belakang Sultan. Kedua, berjanji jika ada kekuasaan asing yang hendak memerintah atau menjajah Indonesia, atas titah Sri Paduka, mereka sekalian sanggup serentak meletakkan jabatan. Ketiga, berjanji untuk memelihara dan mempertahankan Kemerdekaan RI sampai pada akhir jaman. Mosi yang berisi komitmen senada juga dibuat oleh para *abdi dalem* Puro Pakualaman (13 Oktober 1945).

Perubahan demi perubahan yang digulirkan oleh Sultan HB IX sejak 1940 sampai 1945 menunjukkan wibawa beliau sebagai tokoh perubahan itu sendiri. Padahal perubahan-perubahan itu sendiri merubah banyak paradigma, konsep-konsep dan tatanan-tatanan sosial-budaya-politik internal di Nagari Yogyakarta. Perubahan itu bersifat melawan arus dan menjadi pertarungan nasib Nagari Yogyakarta. Namun yang menarik adalah minimnya resistensi terhadap kepemimpinan perubahan itu. Rakyat Yogya *nyawiji* mendukung perubahan itu dan *manunggal* dengan Sultan HB IX untuk melancarkan perubahan tersebut.

Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono dan Keistimewaan DIY adalah kepemimpinan dan keistimewaan di dalam perubahan. Sultan dan DIY adalah pribadi dan entitas sosial-kultural-politik yang progresif dan transformatif. Yogya istimewa tidak statis tetapi dinamis.



## **Bab 2.**

### **Mendukung Pendirian Negara**

*Begitu Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX segera menyatakan dukungan dan menggabungkan Nagari Yogyakarta ke dalam Negara RI.*

Nagari Yogyakarta yang eksis sampai pada tahun 1945 mencakup dua kerajaan yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berdiri sejak 1755 dan Kadipaten Pakualaman yang berdiri sejak 1813. Raja Kasultanan adalah Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Pakualaman adalah Sri Paku Alam. Pada tahun 1945, Sultan Hamengku Buwono IX bertahta sejak 1940 hingga wafatnya pada 1988. Sedangkan Paku Alam VIII bertahta sejak 1937 sampai wafatnya pada 1998.

#### **Konsolidasi sebelum Bergabung**

Sejarah mencatat bagaimana Nagari Yogyakarta mendukung pendirian Negara RI dengan bergabung dengan Negara RI. Namun hal itu didahului oleh konsolidasi antara dua kerajaan di Yogyakarta tersebut (Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman). Konsolidasi ini sangat penting sebab sejak dulu penjajah ingin memecah belah. Persatuan Yogyakarta merupakan kunci keberhasilan.

Menurut catatan Sudomo Sunaryo yang mewawancarai secara pribadi Sri Paku Alam VIII, konsolidasi itu terjadi pada jaman pendudukan Jepang. Waktu itu, Jepang ingin mengadu domba Kasultanan dengan Kadipaten Pakualaman. Penjahar yang mengaku sebagai "saudara tua" itu memancing persaingan di antara kedua *projo kejawen* tersebut. Bibit perselisihan sengaja ditebar supaya pihak Kadipaten Pakualaman merasa iri dengan pihak Kasultanan yang pada waktu itu memiliki *Schakle School* dan beberapa aset lain yang lebih besar.

Baik Sri Sultan HB IX maupun Sri Paku Alam VIII sama sekali tidak terpancing dengan taktik *divide et impera* tersebut. Sri Paku Alam VIII mengontak Sri Sultan HB IX dan menyatakan keinginannya untuk menggabungkan kembali Kadipaten Pakualaman dengan Kasultanan Yogya. Sri Sultan HB IX pun menanggapi dengan senang hati. Mulai saat itu, kedua pemimpin ini berkantor bersama di Kepatihan, Yogya. Mereka berdua bangkit menjadi dwi tunggal pemimpin Yogya yang gerak dan kepemimpinannya berdampak nasional.

### **Kepemimpinan Sultan HB IX**

Bergabungnya Yogyakarta (Kasultanan dan Kadipaten) ke dalam Republik Indonesia terjadi karena kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX. Proses itu menunjukkan betapa Sultan HB IX adalah seorang

negarawan. Karena itu Sultan HB IX diakui sebagai salah seorang Pahlawan Nasional dan *founder father* Negara RI.

Akan tetapi, meskipun kepemimpinan Sultan HB IX sangat menonjol, keputusan untuk bergabung dengan RI itu adalah wujud kesehatan antara HB IX dan Paku Alam VIII. Menurut hasil wawancara Sudomo Sunaryo dengan Paku Alam VIII, prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah RI memproklamakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII memutuskan untuk bergabung dengan RI. Dalam sebuah diskusi pribadi saat mempertimbangkan keputusan itu, Sri PA VIII berkata kepada Sri Sultan HB IX: "*Saenipun kito bergabung mawon kaliyan Republik*" (Sebaiknya kita bergabung saja dengan Republik). Spontan, Sri Sultan HB IX menanggapi: "Yes, aku setuju!". Segera setelah itu, Sri Sultan HB IX memanggil sekretarisnya (Kanjeng Raden Tumenggung Hanggawangsa) untuk mengirim telegram kepada Bung Karno yang berisi ucapan selamat dan pernyataan bahwa Kasultanan dan Pakualaman Yogya mendukung dan bergabung dengan RI.

Kronologi penggabungan Yogyakarta dengan Republik Indonesia merupakan bagian dari peristiwa Kemerdekaan RI yang bersejarah itu. Dalam buku "Tahta untuk Rakyat" (1982), kronologi itu dicatat sebagai berikut:

- 17 Agustus 1945 – Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Sukarno-Hatta.
- 18 Agustus 1945 – UUD 1945 disahkan. Pasal 18 mengakui daerah istimewa berdasar hak asal-usulnya. Pada Bagian Penjelasan dari Pasal 18 ditulis demikian: “Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.
- 18 Agustus 1945 – HB IX mengirim “kawat” kepada Sukarno-Hatta dan KRT Radjiman Wedjodiningrat (Ketua BPUPKI) mengucapkan selamat atas terbentuknya Negara RI
- 19 Agustus 1945 – Soekarno menandatangani Piagam Kedudukan untuk Sultan HB IX dan Piagam Kedudukan untuk Paku Alam VIII
- 20 Agustus 1945 – HB IX kembali mengirim “kawat”, kali ini HB IX sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat (Hokokai) Yogyakarta. Kawat ditujukann kepada Soekarno-Hatta (Presiden dan Wapres RI). Isinya HB IX menyatakan “sanggup berdiri di belakang pimpinan mereka” . Lalu Paku Alam VIII mengirim pernyataan yang sama.

- 5 September 1945 – Sultan HB IX dan Paku Alam VIII masing-masing mengeluarkan Amanat yang menegaskan bahwa Kasultanan dan Pakualaman yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia. Amanat ini adalah EMBRIO Keistimewaan DIY sekaligus juga menjadi tonggak pengintegrasian antara Kasultanan dan Pakualaman (Sujamto, 1988, hal 205).
- 6 September 1945 – Dua utusan Pemerintah Pusat (Menteri Negara Mr. Sartono dan Mr. A.A. Maramis) datang ke Yogya menyampaikan Piagam Kedudukan dari Soekarno untuk HB IX dan PA VIII

### **Piagam Kedudukan**

Setelah menerima “kawat” ucapan selamat atas terbentuknya Republik Indonesia dari Sultan HB IX pada tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno segera mengirimkan “Piagam Kedudukan” yang ditandatanganinya pada tanggal 19 Agustus 1945. Ada dua piagam, yang satu untuk Sultan HB IX dan yang satu lagi untuk Sri Paku Alam VIII. Namun kedua piagam itu baru sampai di Yogyakarta pada tanggal 6 September 1945, dibawa oleh dua utusan Pemerintah Pusat (Menteri Negara Mr. Sartono dan Mr. A.A. Maramis),

Isi “Piagam Kedudukan” dari Presiden Soekarno untuk Sultan Hamengku Buwono IX adalah sebagai berikut.

**PIAGAM KEDUDUKAN  
SRI PADUKA INGGANG SINUWUN KANJENG  
SULTAN HAMENGGU BUWONO IX**

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan  
Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono ,  
Senopati ing Ngalaga, Abdurahman Sayidin  
Panotogomo, Kalifatullah Inggang Kaping IX ing  
Ngayogyokarto Hadiningrat,  
pada kedudukannya, dengan kepercayaan bahwa  
Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala  
pikiran, tenaga, jiwa, dan raga  
untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian  
daripada Republik Indonesia  
Jakarta, 19 Agustus 1945  
Presiden Republik Indonesia

Sukarno

Beberapa poin penting dari piagam itu adalah sebagai berikut:

- Presiden RI menghormati kekuasaan (otoritas) Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Kasultanan Yogyakarta. Hal itu terlihat dari penyebutan gelar.
- Presiden RI menetapkan kedudukan Sultan HB IX sebagai Raja Kasultanan Yogyakarta. Hal itu berarti

merupakan pengakuan kedaulatan Kasultanan Yogyakarta, tidak seperti perlakuan Penjajah Belanda maupun Penjajah Jepang yang menekan, meminggirkan, dan akhirnya hendak menumpas Raja dan Kasultanan Yogya.

- Namun demikian hal itu bukan berarti ada negara di dalam negara. Kasultanan Yogyakarta tidak menjadi negara merdeka di dalam Negara RI. Karena itu Presiden RI menegaskan bahwa Daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Sampai pada tahap ini Yogyakarta belum disebut atau ditetapkan sebagai Daerah Istimewa di dalam RI.
- Presiden RI menetapkan Sultan HB X untuk memimpin Daerah Yogyakarta itu. Dalam hal ini Presiden RI menaruh kepercayaan bahwa Sultan HB IX akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan Daerah Yogyakarta itu,

Adapun isi “Pagam Kedudukan” dari Presiden Soekarno untuk Sri Paku Alam VIII adalah sebagai berikut.

**PIAGAM KEDUDUKAN  
SRI PADUKA KANJENG GUSTI  
PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM VIII**

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan  
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam Ingkang  
Kaping VIII,

pada kedudukannya, dengan kepercayaan bahwa  
Sri Paduka Kanheng Gusti akan mencurahkan segala  
pikiran, tenaga, jiwa, dan raga  
untuk keselamatan Daerah Pakualaman sebagai bahan  
daripada Republik Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 1945  
Presiden Republik Indonesia  
Sukarno

Beberapa poin penting dari piagam itu adalah sebagai berikut:

- Presiden RI menghormati kekuasaan (otoritas) Sri Paku Alam VIII sebagai Adipati Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Hal itu terlihat dari penyebutan gelar.
- Presiden RI menetapkan kedudukan Sri Paku Alam VIII sebagai Adipati Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Hal itu berarti merupakan pengakuan

kedaulatan Kasultanan Yogyakarta, tidak seperti perlakuan Penjajah Belanda maupun Penjajah Jepang yang menekan, meminggirkan, dan akhirnya hendak menumpas kerajaan-kerajaan di Yogyakarta.

- Namun prinsipnya di dalam Negara RI tidak ada negara di dalam negara. Karena itu ditegaskan bahwa Daerah Pakualaman sebagai bahan daripada Republik Indonesia.

Presiden RI menetapkan Sultan HB X untuk memimpin Daerah Yogyakarta itu. Dalam hal ini Presiden RI menaruh kepercayaan bahwa Sri Paku Alam VIII akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa, dan raga untuk keselamatan Daerah Pakualaman itu.

Peristiwa Sultan HB IX dan Paku Alam VIII mengirim kawat ucapan selamat dan komitmen untuk mendukung Negara RI dan respon cepat Presiden Soekarno dengan memberikan dua Piagam Kedudukan itu merupakan bentuk “deal” antara Nagari Yogyakarta dan Negara RI. Hal itu yang sering dimaknai sebagai “*ijab kabul*” atau perjanjian luhur antara Yogyakarta dan Republik Indonesia. Hal ini pulalah yang mendasari sejarah Keistimewaan DIY.

*Deal* yang jelas antara Yogya dan Pemerintah Pusat itu juga mendorong Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII bertindak tegas dan nyata untuk mendukung kemerdekaan RI dan berjuang habis-habisan untuk RI.

Mereka berdua benar-benar melakukan apa yang ditugaskan oleh Presiden RI sebagaimana tertulis dalam Piagam Kedudukan itu, yaitu mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesia.

Setelah Piagam Kedudukan itu sampai di Yogya pada tanggal 6 September 1945, segenap *wong* Yogya bergerak untuk menguasai Yogya sepenuhnya bagi RI. Pada tanggal 26 September 1945, semua pegawai kantor-kantor (pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan perusahaan, karyawan pabrik) menjalankan aksi untuk mengambil alih kekuasaan dan pimpinan yang sampai saat itu masih berada di tangan orang asing. Aksi-aksi itu didukung penuh oleh rakyat, pemuda-pemuda, dan BKR. Keesokan harinya, tanggal 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengeluarkan pengumuman kepada seluruh penduduk bahwa pada tanggal 26 September 1945 kekuasaan Pemerintah Daerah Yogyakarta seluruhnya telah berada di tangan bangsa Indonesia.

### **Komitmen Kasultanan dan Kadipaten**

Sehubungan dengan Piagam Kedudukan yang diberikan oleh Presiden RI kepada Sri Sultan HB IX dan Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan HB IX, segenap pegawai Kasultanan

menyatakan komitmen untuk mendukung Sultan dan kemerdekaan RI. Pada tanggal 27 September 1945, para pegawai Kasultanan yang berjumlah sekitar 400 orang mempersempahkan sebuah mosi “PEKIK” (Pemuda Kita Kasultanan). Mosi yang ditujukan kepada Sri Sultan HB IX sebagai Kepala Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia itu berisi sebagai berikut. Pertama, Angkatan Muda dari pegawai Kasultanan selalu berdiri di belakang Sri Paduka Kanjeng Sultan, siap sedia menjalankan perintah dan petunjuknya. Kedua, berjanji, jika ada kekuasaan asing yang hendak memerintah dan menjajah Indonesia atas titah Sri Paduka, hamba sekalian sanggup serentak meletakkan jabatan. Ketiga, berjanji akan memelihara dan mempertahankan tetapnya kemerdekaan Indonesia sampai di akhir jaman. Mosi itu ditandatanganani oleh Suprodjo Samsi sebagai ketua.

Demikian juga segenap pegawai (*abdi dalem*) Kadipaten Pakualaman, menyatakan mosi yang berisi komitmen untuk mendukung Kemerdekaan RI. Mosi yang dibuat pada tanggal 13 Oktober 1945 itu berisi pernyataan dan keputusan. Pernyataan yang disampaikan adalah, pertama, bahwa dengan berdirinya Negara Republik Indonesia “merdeka”, akan memberi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada masyarakat umumnya. Kedua, bahwa dengan kembalinya pemerintah Belanda, berarti penjajahan yang akan membawa penindasan kesengsaraan

penduduk Indonesia. Ketiga, bahwa sekarang makin nyata gentingnya suasana, yang dibuktikan oleh kejadian-kejadian yang sangat menghina negara Republik Indonesia. Keempat, bahwa Praja Pakualaman telah diakui oleh P.J.M. Presiden Republik Indonesia, sebagai Daerah Istimewa, yang mendapat kepercayaan sepenuhnya dari P.J.M. Presiden Republik Indonesia. Dengan dasar keempat pernyataan itu maka diputuskan, pertama, bahwa para Abdi Dalem Praja Pakualaman harus teguh bersatu padu dalam lingkungan Negara Republik Indonesia Merdeka, tetap mencurahkan segala tenaga, jiwa, dan raga membela Indonesia merdeka. Kedua, tetap setia dan berdiri di belakang Sri Paduka Ngarsa Dalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII yang telah mendapat penuh kepercayaan dari P.J.M. Presiden Republik Indonesia. Ketiga, serentak meletakkan jabatannya, jika bangsa lain memerintah Indonesia.

Jelas sekali bahwa kedua mosi di atas menunjukkan bagaimana komitmen total Kasultanan dan Pakualaman kepada RI. Mereka menunjukkan sikap militan yang tanpa kompromi untuk hanya mendukung RI dan melawan setiap penjajah dari bangsa lain. Hal itu juga menunjukkan bahwa mereka hanya menginginkan negara bernama RI dan tak hendak mendirikan negara Yogyakarta sendiri.

Satu hal yang harus dicatat adalah, komitmen total kepada RI itu diberikan sebagai respon atas sikap

tegas Pemerintah Pusat tentang status Daerah Istimewa Yogyakarta (Daerah Istimewa dari Republik Indonesia). Hal itu tampak jelas dalam mosi yang diberikan para abdi dalem Praja Pakualaman. Dikatakan dalam mosi itu bahwa “Praja Pakualaman telah diakui oleh P.J.M. Presiden Republik Indonesia, sebagai Daerah Istimewa, yang mendapat kepercayaan sepenuhnya dari P.J.M. Presiden Republik Indonesia”.

Dalam rangka mewujudkan komitmen pada RI itu, Sri Sultan HB IX menggerakkan seluruh rakyat Yogyakarta untuk membentuk “Laskar Rakyat” guna mendukung Tentara Keamanan Rakyat. Untuk itu, Sri Sultan HB IX mengeluarkan Maklumat No. 5 Tanggal 26 Oktober 1945 yang dibaharui dengan Maklumat No 8 Tanggal 7 Desember 1945.

HB IX dan PA VIII beserta segenap rakyat Yogyakarta bukan hanya menyatakan bergabung dengan RI, lalu menyatakan komitmen, namun juga secara nyata berjuang untuk tegaknya bangsa Indonesia. Bagi Sri Sultan HB IX, tindakan itu sudah menjadi visinya sebagai seorang *Senapati Ing Ngalogo* (Panglima Perang). Karena itulah Presiden Soekarno memberi apresiasi sangat tinggi atas perjuangan Yogyakarta.

### **Harga Sebuah Komitmen**

Tak lama setelah menyatakan komitmen untuk RI, Yogya segera harus membayar harganya. Ini baru permulaan, namun sudah memporak-porandakan

kondisi Yogya. Kota Yogya dibombardir dengan sangat mengerikan.

Pada tanggal 25 November 1945, Inggris menghancurkan Yogya dengan bom. Pada jam 08.15 WIB, pesawat pembom R.A.F. membombardir gedung stasiun RRI Yogya. Kemudian, dari jam 08.30 sampai 09.00 WIB, Inggris menghujamkan enam bom yang menghancurkan gedung Nillmy, gedung Sonobudoyo, serta menembak dengan metraliur kawasan di sekitar pabrik Watson. Hari itu, tujuh orang tewas, puluhan luka-luka, termasuk banyak wanita dan anak-anak.

Setelah itu, Inggris merencanakan penghancuran untuk kedua kalinya. Sebelumnya, mereka membuat pamflet-pamflet yang bertuliskan demikian: "Pemboman kami terhadap stasiun radio Yogyakarta pada pagi hari tanggal 25 November yang baru lalu ini, kami tidak menghancurkan stasiun radio itu dengan secukupnya. Berhubung dengan alasan-alasan yang telah kami siarkan lebih dulu, maka kami akan menghancurkan stasiun itu kembali. Kami tidak akan mencelakakan tuan-tuan sama sekali, kami hanya akan menyempurnakan penghancuran stasiun radio itu saja. Tuan-tuan sekalian sudah diperingatkan adanya!" Lalu, pada tanggal 27 November 1945 jam 13.30 WIB datanglah 4 buah bomber dan 1 pesawat pemburu. Yogya porak poranda dan banyak korban berjatuhan. Bukan hanya stasiun RRI, namun juga Balai Mataram, Gedung Sonobudoyo, kantor telepon, gedung C.H.T.H, serta banyak rumah penduduk sipil hancur berantakan.

### **Bab 3. Menegaskan Keistimewaan DIY**

*Sultan Hamengku Buwono IX melakukan tindakan taktis, di satu sisi menyatakan Nagari Yogyakarta bergabung dengan Negara RI, di sisi lain menegaskan status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Sampai Negara RI berdiri, keempat kerajaan Jawa itu tetap eksis. Meskipun perjuangannya melawan penjajah tidak segigih Kasultanan dan Pakualaman di Yogyakarta, Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta juga merupakan kerajaan-kerajaan Jawa yang anti penjajahan.

Menurut Sujamto (1988), setelah Sultan HB IX dan Paku Alam VIII memutuskan bergabung dengan RI, Pemerintah RI sangat menghargai bukan hanya kedua *projo kejawen* di kawasan Yogyakarta itu tetapi juga dua kerajaan yang ada di Surakarta. Dari Penjelasan UU No 1 Tahun 1945 (yang ditetapkan dan diumumkan pada 23 November 1945, yang penjelasannya dibuat oleh Menteri Dalam Negeri) terlihat bahwa Pemerintah RI memandang keempat daerah-daerah swapraja itu, yang merupakan pecahan-pecahan Kerajaan Mataram Islam sebagai satu Daerah Istimewa. Maka dalam penjelasan itu dituliskan "Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta". Dalam rangka itu maka diangkat oleh Pemerintah Pusat seorang Komisaris Tinggi untuk keempat swapraja tersebut yang berkedudukan di Surakarta. Sikap hendak menetapkan Yogya dan

Surakarta sebagai satu daerah istimewa itu menunjukkan bagaimana pemerintah pusat menghargai keputusan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII untuk berintegrasi dengan RI.

Pada masa awal kemerdekaan RI, Sultan HB IX mengirim utusan ke Surakarta untuk mengajak kedua kerajaan itu bersama-sama mengupayakan keistimewaan bersama. Hal itu merupakan wujud keseriusan HB IX untuk 'membangun kembali' Mataram Islam – yang terdiri dari keempat kerajaan itu – menjadi sebuah daerah istimewa di dalam RI.

Sejarah akhirnya mencatat bahwa kedua *projo kejawen* Surakarta itu gagal menjadi daerah istimewa, sedangkan Yogya berhasil menjadi DIY. Meski Sultan HB IX mendambakan dan mengajak untuk bersatunya kembali Mataram Islam di era RI sebagai sebuah daerah istimewa, ternyata keadaan di Surakarta tidak kondusif.

Menurut Sujamto (1988), keadaan di Surakarta waktu itu jauh lebih rumit, merupakan daerah *wild west* dan ajang perkelahian antar berbagai kekuatan politik dan laskar-laskar bersenjata. Kecuali itu, yang paling menentukan gagalnya Surakarta menjadi daerah istimewa adalah adanya gerakan anti swapraja yang kuat sekali. Gerakan itu bukan hanya didukung oleh PKI dan kekuatan-kekuatan kiri namun juga oleh PNI dan Barisan Banteng yang berpengaruh besar.

Hal itu menunjukkan bahwa di Yogya, masyarakatnya mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap Sultan HB IX. Kawula Yogya mengakui kepemimpinan Kasultanan. HB IX dan Paku Alam VIII juga bersatu untuk membangun DIY di dalam NKRI. Sebaliknya, menurut Soedarisman Poerwokoesoemo dalam Sujamto (1988), Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro di Surakarta tidak mau dan tidak dapat bersatu.

Sultan HB IX melakukan tindakan taktis dan bergerak cepat untuk menegaskan Keistimewaan DIY. Pertama-tama, Sultan HB IX mengeluarkan Amanat 5 September 1945 yang menurut Sujamto (1988) merupakan embrio Keistimewaan DIY. Kemudian, ia bersama Paku Alam VIII mengeluarkan Amanat 30 Oktober 1945 yang menegaskan adanya satu daerah istimewa yaitu DIY.

### **Amanat 5 September 1845 dan 30 Oktober 1945**

Dengan bergabungnya Yogyakarta ke dalam Negara RI maka hal itu berarti Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman tidak bisa menjadi kerajaan yang merdeka. Sebab, di dalam Republik Indonesia tidak ada negara di dalam negara. Bergabung dengan RI berarti menjadi bagian dari Negara RI.

Adapun sejarah panjang eksistensi Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman tidak boleh hilang begitu saja. Di satu sisi harus menundukkan diri sebagai bagian

dari Negara RI namun di sisi lain ingin melanjutkan warisan leluhur sebagai kerajaan-kerajaan yang kuat. Karena itu pilihannya adalah menjadi “daerah istimewa” di dalam Negara RI.

Karena itu, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII masing-masing menerbitkan Amanat tertanggal 5 September 1945 yang keduanya menegaskan bahwa Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman adalah “daerah istimewa di dalam Negara Republik Indonesia”. Dengan demikian Sultan HB IX dan Paku Alam VIII sebagai raja Kasultanan dan Adipati Kadipaten Pakualaman menegaskan bahwa kerajaan-kerajaannya itu adalah “daerah istimewa di dalam Negara Republik Indonesia”. Karena itu menurut Sujamto (1988), Amanat 5 September 1945 adalah “embrio” Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII itu sendiri konstitusional, sebab UUD 1945 (asli yang disahkan pada 18 Agustus 1945, sebelum sekarang diamandemen) memberi peluang terbentuknya daerah-daerah istimewa di dalam Negara RI. Pasal 18 UUD 1945 itu berbunyi demikian: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Pada Bagian Penjelasan dari Pasal 18 tersebut berbunyi demikian: “Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.

Adapun isi dari Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX adalah sebagai berikut.

## **AMANAT**

### **SRI PADUKA INKENG SINUWUN KANJENG SULTAN**

Kami, Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menetapkan

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa di dalam Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya Kami pegang seluruhnya.

3. Bahwa berhubung antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggungjawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngayogyakarta Hadiningrat, 5 September 1945

Hamengku Buwono IX

Beberapa poin penting dari amanat itu adalah:

- Secara lugas Sultan HB IX menegaskan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan. Hal itu berarti bahwa asal-usulnya merupakan sebuah negara tersendiri yang memiliki (1) pemerintahan, (2) penduduk, (3) wilayah, (4) diakui kedaulatannya.
- Secara lugas Sultan HB IX menegaskan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta setelah bergabung dengan Negara RI adalah “daerah istimewa di dalam Negara Republik Indonesia”.
- Di dalam daerah istimewa ini, Sultan HB IX menegaskan dirinya sebagai Kepala Daerah yang memegang semua kekuasaan dan pemerintahan di Yogyakarta,

- Hubungan Negeri Kasultanan Ngayogyakarta dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung
- Sultan HB IX sebagai Kepala Daerah bertanggungjawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Setelah terbitnya dua Amanat 5 September 1945, tonggak perkembangan Keistimewaan Yogya yang berikutnya adalah terbitnya Amanat 30 Oktober 1945. Menurut Sujamto (1988), Amanat 30 Oktober 1945 menegaskan bahwa Yogyakarta yang terdiri dari Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman adalah satu (1) Daerah Istimewa di dalam Negara RI. Sebab sebelumnya, Amanat 5 September 1945 itu berimplikasi bahwa ada dua daerah istimewa yaitu daerah istimewa Kasultanan dan daerah istimewa Pakualaman.

Sujamto menulis demikian, “Menyadari bahwa dengan dua Amanat 5 September 1945 itu lahir dua daerah istimewa di Yogyakarta dan dengan demikian kurang menguntungkan untuk perkembangan selanjutnya maka pada fase berikutnya, yaitu dalam Amanat 30 Oktober 1945 tidak lagi dibuat dua amanat dengan isi yang sama akan tetapi satu amanat yang ditandatangani berdua. Ini untuk menunjukkan bahwa di Yogyakarta hanya ada satu Daerah Istimewa” (Sujamto, 1988, hal 205).

Kecuali itu, Amanat 30 Oktober 1945 itu juga diterbitkan untuk mensikapi dua peristiwa yang terjadi setelah terbitnya Amanat 5 September 1945. Kedua peristiwa itu adalah:

- 22 Oktober 1945 – Komisaris Tinggi di hadapan HB IX dan PA VIII menyatakan tidak perlu adanya “Subcommisariat” di Yogyakarta
- 29 Oktober 1945 – “Komite Nasional Daerah Yogyakarta” membentuk “Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta” yang menjadi Badan Legislatif (Badan Pembuat Undang-Undang).

Isi dari Amanat 30 Oktober 1945 yang dikeluarkan dan ditandatangani bersama oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII adalah sebagai berikut.

**AMANAT  
SRI PADUKA INKENG SINUWUN KANJENG SULTAN  
HAMENGKU BUWONO IX & SRI PADUKA KANJENG  
GUSTI  
PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM,  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**

1. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Amanat Kami berdua pada tanggal 5 September 1945.

2. Bahwa kekuasaan-kekuasaan yang dahulu dipegang oleh Pemerintah jajahan (dalam jaman Belanda dijalankan oleh Gubernur dengan kantornya, dalam jaman Jepang oleh Koti Zimu Koku Tyokan dengan kantornya) telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali kepada Kami berdua.
3. Bahwa Tuan Komisari Tinggi pada tanggal 22 Oktober 1945 di Kepatihan Jogjakarta di hadapan Kami berdua dengan disaksikan oleh para Pembesar dan para Pemimpin telah menyatakan tidak perlunya akan adanya Subcommisariat dalam Daerah Kami berdua.
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1945 oleh Komite Nasional Daerah Yogyakarta telah dibentuk suatu Badan Pekerja yang dipilih dari antara anggota-anggotanya, atas kehendak rakyat dan panggilan masa, yang disertai untuk menjadi Badan Legislatif (Badan Pembikin Undang-undang) serta turut menentukan haluan jalannya Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab kepada Komite Nasional Daerah Yogyakarta, maka Kami Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta, dengan ini menyatakan:

Supaya jalannya Pemerintahan dalam Daerah Kami berdua dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia, bahwa Badan Pekerja tersebut adalah suatu Badan Legislatif (Badan Pembikin Undang-undang) yang dapat dianggap sebagai wakil rakyat dalam Daerah Kami berdua untuk membikin undang-undang dan menentukan haluan jalannya Pemerintahan dalam Daerah Kami berdua yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dari segala bangsa dalam Daerah Kami berdua mengindahkan Amanat Kami ini.

Jogyakarta, 30 Oktober 1945  
HAMENGKU BUWONO IX  
PAKU ALAM VIII

### **Menepis Upaya Pengguguran DIY**

Amanat 5 September 1945 yang kemudian diikuti dengan Amanat 30 Oktober 1945 menunjukkan tindakan tegas Sultan HB IX dan Paku Alam VIII untuk menegakkan DIY. Dalam amanat pertama, mereka berdua menegaskan status keistimewaan, kepemimpinan mereka berdua atas Yogya, dan sistem pertanggungjawaban langsung kepada Presiden RI. Sedangkan dalam amanat yang kedua, mereka berdua dengan tegas menolak keberadaan Komisariss Tinggi di Yogya, sebuah tindakan yang memungkinkan Yogya dapat terus menjadi daerah istimewa di dalam negara RI.

Di satu sisi, Pemerintah Pusat memang *care* dengan upaya pembentukan daerah-daerah istimewa di nusantara, khususnya berkaitan dengan eksistensi keempat kerajaan Jawa (Kasultanan, Pakualaman, Kasunanan, dan Mangkunegaran). Menurut Sujamto (1988), UU No. 1/1945 menunjukkan bahwa pemerintah pusat memandang keempat *projo kejawen* itu sebagai sebuah daerah istimewa. Dalam Penjelasan dari UU No. 1/1945 itu dinyatakan adanya Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta yang merupakan satu (sebuah) Daerah Istimewa yang meliputi Kasultanan Yogya, Kasunanan Surakarta, Pakualaman Yogya, dan Mangkunegaran Surakarta. Hal itu merupakan sikap konsisten Pemerintah Pusat terhadap Amanat Pasal 18 UUD 1945 tentang daerah-daerah istimewa di nusantara.

Di sisi lain, pemerintah pusat melakukan penetrasi ke setiap daerah yang menurut sejarah – terutama kasus Surakarta – berdampak kegagalan terbentuknya daerah-daerah istimewa. Penetrasi pemerintah pusat itu yang merupakan tindakan wajar dalam rangka membangun sistem yang kuat itu dilakukan dengan mengirim dan menempatkan apa yang disebut sebagai Komisariss-Komisariss Tinggi. Mereka adalah wakil pusat yang bertugas membentuk pemerintahan di daerah-daerah.

Menurut Soedarisman Poerwokoesoemo (1984), kehadiran Komisariss Tinggi itu bisa menjadi salah satu

sebab kegagalan terbentuknya sebuah daerah istimewa. Karena Yogya (Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII) menolak keberadaan Komisaris Tinggi di Yogya maka Yogya dapat terus menjadi daerah istimewa. Berikut adalah salah satu alasan yang menurut Soedarisman Poerwokoesoemo (1984) menyebabkan terbentuknya DIY (hal 46-47).

“Sebab-sebab dapat dipertahankannya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah ... ditolaknya fungsi Komisaris Tinggi atau wakilnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menurut sejarahnya seperti yang terjadi di Surakarta, ternyata justru merupakan salah satu sebab dapat dilikuidasinya Kasunanan Surakarta dan daerah Mangkunegaran sebagai swapraja dan tidak dapatnya kedua daerah tersebut menjelma sebagai Daerah Istimewa Surakarta berdasarkan UUD 1945.”

Yogya berbeda dengan Solo dalam hal melakukan *bargaining* dengan Pemerintah Pusat. Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII digambarkan oleh Soedarisman Poerwokoesoemo (1984) sebagai sangat tegas menolak kehadiran Komisaris Tinggi. Itulah yang menurutnya menyebabkan Yogya tetap bisa menjadi DIY seperti ditulisnya sebagai berikut (hal 25).

“Pemerintah Pusat Republik Indonesia hanya mengangkat satu orang Komisaris Tinggi untuk empat daerah swapraja itu (Kasultanan, Kasunanan,

Pakualaman, Mangkunegaran). Akan tetapi seperti di atas telah dikemukakan adanya Komisaris Tinggi sebagai perantara antara Sri Sultan dan Presiden Republik Indonesia itu, apapun juga namanya, tidak dikehendaki atau dengan tegas ditolak oleh Sri Sultan, sebab Sri Sultan dalam Amanat 5 September 1945 itu menentukan bahwa segala kekuasaan di daerahnya berada di tangannya seluruhnya dan bahwa perhubungan antara Kasultanan Yogyakarta dengan Republik Indonesia bersifat langsung dan kepada Presiden Republik Indonesia. Penolakan Sri Sultan terhadap adanya perantara antara Sri Sultan dengan Presiden Republik Indonesia yang bernama Komisaris Tinggi itu lebih ditandaskan lagi dalam Amanat kedua 30 Oktober 1945 diktum keempat....”

Sedangkan Sujamto (1988) lebih menggambarkan bahwa ada semacam “keengganan” dalam diri Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII untuk mengklaim Yogya sebagai DIY. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh loyalitas tinggi mereka berdua terhadap RI.

Mengenai komitmen tinggi Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII terhadap RI, sebenarnya tidak diragukan lagi. Sejarah memberikan banyak bukti mengenai loyalitas tanpa pamrih itu. Namun, mengenai sikap tegas Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII mengenai DIY juga sangat jelas. Amanat 5 September 1945 yang mereka keluarkan jelas-jelas menunjukkan pendirian itu. Demikian juga dalam Amanat 30 Oktober 1945,

mereka berdua menegaskan status DIY dan tidak perlunya kehadiran Komisaris Tinggi yang merupakan utusan atau wakil Pemerintah Pusat tersebut. Dalam Amanat itu dikatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang dahulu dipegang oleh pemerintah jajahan (dalam zaman Belanda dijalankan oleh gubernur dengan kantornya, dalam zaman Jepang oleh Koti Zimu Koku Tyokan dengan kantornya) telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali pada Kami berdua (Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII). Kemudian, Amanat itu menegaskan bahwa Paduka Tuan Komisaris Tinggi pada tanggal 22 Oktober 1945 di Kepatihan Yogyakarta di hadapan kami berdua dengan disaksikan oleh para pembesar dan para pemimpin telah menyatakan tidak perlunya akan adanya *Subcommissariat* dalam daerah Kami berdua.

Penolakan HB IX dan PA VIII terhadap kekuasaan Komisaris Tinggi itu menunjukkan bahwa mereka berdua bertekad memegang kekuasaan penuh atas DIY. Seperti sudah ditegaskan dalam Amanat 5 September 1945, HB IX dan PA VIII tidak menghendaki adanya perantara antara mereka dengan Presiden RI sebab mereka bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI itu (Poerwokoesoemo, 1984). Ini merupakan prinsip kepemimpinan yang dilakukan HB IX dan PA VIII.

Dalam masa penjajahan, perantara yang berupa Papatih Dalem ditolak oleh Sultan HB IX. Bahkan HB IX

bukan hanya menghapuskan fungsi Papatih Dalem itu namun juga berusaha menghapuskan fungsi Gubernur Belanda yang berkuasa atas tanah Yogya. Tujuannya adalah menjadi gubernur atas Yogya dan mengusir semua penjajahan asing atas Yogya. Politik Sultan HB IX adalah berusaha mengoper semua fungsi Papatih Dalem dan fungsi gubernur ke tangan dirinya (Poerwokoesoemo, 1984).

Politik itulah yang diterapkan ketika mengintegrasikan Yogya ke RI. Sultan HB IX berpolitik untuk berkuasa penuh atas DIY dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. HB IX menolak adanya perantara, apapun namanya itu, termasuk yang bernama Komisariss Tinggi. Hal itu dilakukan untuk menepis usaha memecah belah dan menggembosi kekuasaan HB IX dan PA VIII atas DIY (Poerwokoesoemo, 1984).

Dalam Amanat 30 Oktober 1945 itu juga disebut beberapa kali istilah "Kami Berdua" yang menunjukkan bahwa mereka berdualah penguasa DIY sebagai gubernur dan wakil gubernur. Amanat itu mengatakan bahwa "kekuasaan-kekuasaan yang dahulu dipegang oleh pemerintah jajahan (dalam jaman Belanda dijalankan oleh gubernur dengan kantornya, dalam jaman Jepang oleh Koti Zimu Koku Tyokan dengan kantornya) telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali pada Kami Berdua". Hal itu jelas menunjukkan

bagaimana berkuasanya mereka berdua atas rakyat Yogya.

Jadi, Sultan HB IX menegakkan DIY dan memimpin DIY sepenuhnya. HB IX telah berpolitik praktis untuk menepis usaha-usaha penggemboan kekuasaan dirinya atas DIY. Ia tidak ragu untuk menolak perangkat pemerintah pusat yang meskipun maksudnya baik namun dapat menggagalkan status keistimewaan Yogya. Dengan demikian HB IX berani bersikap tegas kepada pemerintah pusat demi tegaknya DIY.

## Bab 4.

### Menyelamatkan Negara

*Selama masa revolusi Kemerdekaan RI (1945-1950, Daerah Istimewa Yogyakarta memainkan peran istimewa bagaimana ibu pengasuh yang merawat bayi Negara RI (Slamet Sutrisno, Harian Kedaulatan Rakyat, 17 Maret 2008).*

Deal yang jelas dan komitmen Yogya yang kuat menyebabkan Presiden Soekarno, wakilnya, para menteri, dan para tokoh pimpinan nasional RI menaruh kepercayaan dan pengharapan pada Yogya. Ketika itu, situasi sedemikian gawat karena tentara Belanda merajalela dan melancarkan aksi-aksi teror di Jakarta. Sementara itu, pasukan marinir Belanda mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 30 Desember 1945 dan segera melancarkan aksi-aksinya untuk kembali merebut Indonesia. Dalam keadaan darurat itu, Bung Karno mengirim kawat kepada Sri Sultan HB IX, menanyakan apakah sekiranya Yogya sanggup menerima Pemerintahan RI karena situasi di Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi. Sri Sultan HB IX menyatakan sanggup dan bahkan segenap rakyat Yogyakarta sanggup untuk membela kewibawaan Pemerintahan RI.

Akhirnya, pada tanggal 4 Januari 1946, Yogya resmi menjadi Ibukota Republik Indonesia. Pagi-pagi benar, Bung Karno, Bung Hatta, dan segenap kerabat mengungsi ke Yogya. Segenap menteri juga hijrah

secara diam-diam ke Yogya. Namun, Perdana Menteri Sjahrir untuk sementara tetap tinggal di Jakarta.

Mengenai keputusan untuk menjadikan Yogya sebagai ibukota RI, Wakil Menteri Penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo menyampaikan pidato yang disiarkan RRI Yogya sebagai berikut: "Merdeka! Saudara-saudara, pertama kami atas nama Pemerintah mengumumkan dengan resmi, bahwa mulai pagi ini tanggal 4 Januari 1946 sebagian dari Pemerintah Agung buat sementara dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Dari sebab itu mulai hari ini presiden kita Bung Karno dan Wakil Presiden Bung Hatta buat sementara waktu berkedudukan di kota Mataram."

Yang menarik adalah mengenai alasan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogya tersebut. Dalam pidatonya itu, Mr. Ali Sastroamidjojo mengatakan ada dua alasan, pertama alasan keadaan tidak aman yang terjadi di Jakarta. Alasan kedua adalah untuk menyempurnakan organisasi dalam negeri. Mr. Ali mengatakan: "Akan tetapi sebetulnya lebih pentinglah alasan yang tersebut kedua tadi untuk memindahkan buat sementara kedudukan Pemerintah Agung. Alasan itu pada hakikatnya mengenai bagian yang terpenting daripada perjuangan kita, bahkan dari revolusi rakyat Indonesia pada masa ini. Sebab Pemerintah Agung mulai sekarang dari kedudukannya yang baru, ialah Kota Mataram akan dapat melangsungkan dengan lebih tepat dan cepat segala pimpinan dan usaha untuk

menyempurnakan organisasi pemerintah di daerah-daerah....”

Jadi, Yogya dipilih menjadi ibukota RI karena alasan untuk mempercepat proses penyempurnaan organisasi negara. Hal itu jelas menunjukkan bahwa Yogya dinilai mampu memberi legitimasi dan kontribusi bagi pengembangan Pemerintah RI. Para pemimpin pusat melihat bahwa kondisi pemerintahan dan kepemimpinan di Yogya sangat kuat karena merupakan kerajaan di bawah dwi tunggal yang kuat pula.

Pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogya jelas menunjukkan keyakinan Pemerintah Pusat akan komitmen Yogya kepada NKRI. Dalam hal ini Indonesia bergantung harap kepada Yogya. Slamet Sutrisno menggambarkan Yogya seperti seorang ibu yang dengan penuh perjuangan mengasuh, merawat, dan menyelamatkan bayi NKRI (*Kedaulatan Rakyat*, 17 Maret 2008).

### **Kontribusi Kasultanan bagi RI**

Komitmen Sri Sultan HB IX dan Kasultanan kepada RI tak sebatas ucapan, tetapi berwujud karya nyata dan pengorbanan tanpa pamrih. Sejak Ibukota RI berpindah ke Yogya, Kasultanan memberikan banyak dukungan fasilitas dan juga finansial untuk memperlancar jalannya pemerintahan RI di Yogya.

Ketika keadaan menjadi sangat genting karena Belanda melancarkan agresinya, Sri Sultan HB IX

memainkan peran sangat penting. Dalam serbuan Belanda sejak tanggal 19 Desember 1948 itu, Presiden RI dan Wakil Presiden RI ditangkap. Penduduk pun panik dan mengungsi ke Kraton Yogya. Dalam situasi perang, Sri Sultan HB IX memberi pesan khusus kepada Walikota Yogya Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, pertama, kalau kondisi benar-benar gawat maka Sultan akan mengambil alih. Kedua, walikota harus tetap di tempat, jangan pergi. Ketiga, walikota harus berusaha supaya tidak ikut ditangkap Belanda.

Setelah Presiden RI dan wakilnya ditangkap, terjadi kevakuman kekuasaan di Yogya. Dalam kondisi demikian, Sidang Kabinet RI menunjuk Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat. Sementara itu, dalam kondisi kevakuman tersebut, Sri Sultan HB IX tidak ikut ditangkap oleh Belanda. Dengan demikian, Sri Sultan HB IX menjadi tumpuan harapan bagi eksistensi RI di mata dunia internasional.

Belanda tahu bahwa Sri Sultan HB IX merupakan benteng pertahanan bagi berdirinya RI. Karena itu, Belanda berusaha membujuk Sri Sultan HB IX. Bahkan, Belanda memberi *iming-iming* untuk menjadikannya sebagai "Super Wali Nagari" atas Jawa dan Madura dalam rangka negara federal yang sedang direncanakan oleh Belanda. Karena komitmen kepada RI sudah membaja, Sri Sultan HB IX bertekad untuk

tidak pernah ingkar janji kepada RI. Apa pun janji setia yang telah diucapkannya tidak diingkarinya, *sabda pandhito ratu tan kena wola-wali*. Sri Sultan HB IX pun menolak semua bujukan itu. Semua utusan Belanda yang antara lain adalah Residen E.M. Stock, Dr. Berkhuis, Kolonel Van Langen, Sultan Hamid II, dan Prof. Husein Djajadiningrat ditolakny mentah-mentah.

Dalam bersikap anti kompromi itu, Sri Sultan HB IX pun bertaruh nyawa. Jenderal Spoor sudah mengancam untuk mendobrak pintu gerbang Kraton Yogya dengan tank. Dalam buku "Tahta untuk Rakyat", Mohammad Natsir memberi catatan tentang bagaimana Sri Sultan HB IX berjihad demi RI sebagai berikut. Pada waktu Jenderal Meyer datang ke Yogya dan ingin masuk Kraton untuk mencoba membujuk agar memihak kepada Belanda, dijawabnya dengan singkat: "*Over mijn lijk heen!*" Artinya, "Bila itu maksud tuan, maka tuan hanya bisa masuk Kraton ini dengan melangkahi mayat saya dulu!"

Sri Sultan HB IX memberikan strategi sangat penting berupa Serangan Umum 1 Maret 1949. Pada bulan Februari 1949 muncul berita dari radio bahwa masalah hubungan Indonesia dengan Belanda akan dibahas di PBB. Untuk itu, Sri Sultan HB IX berpikir keras tentang bagaimana supaya dunia internasional tahu bahwa RI masih ada. Kemudian, ia mencoba menghubungi komandan gerilya yang pada saat itu adalah Letkol Soeharto. Dalam sebuah perbincangan rahasia di

Kraton pada tanggal 13 Februari 1949, Sri Sultan HB IX bertanya kepada Letkol Soeharto apakah dalam tempo dua minggu bisa menyiapkan sebuah serangan umum. Menurut rencana semula, serangan umum itu akan dilancarkan pada tanggal 28 Februari 1949, tetapi dibatalkan karena informasi tentang itu bocor. Baru pada tanggal 1 Maret 1949 serangan itu dilancarkan. Aksi militer itu mencolokkan mata dunia bahwa RI masih ada!

Sampai pada momen puncak perjuangan kemerdekaan RI, yaitu Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda, Sri Sultan HB IX memainkan peran kunci. Ketika terjadi Perundingan KMB di Den Haag yang merupakan fase terakhir dari sengketa Indonesia-Belanda, Sri Sultan HB IX diminta Pemerintah RI untuk tidak ikut ke sana. Alasannya adalah Sri Sultan HB IX adalah "penjaga gawang" RI, benteng pertahanan terakhir seandainya terjadi hal-hal yang buruk. Akhirnya berhasil, pengakuan kedaulatan dinyatakan pada tanggal 27 Desember 1949. Bung Hatta mewakili Indonesia dalam upacara penyerahan pengakuan kedaulatan itu di Amsterdam. Upacara yang sama yang diadakan di Indonesia dipimpin oleh Sri Sultan HB IX.

### **Kontribusi Pakualaman bagi RI**

Penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kadipaten Pakualaman sebagai daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia dibalas dengan pemberian

kontribusi Kadipaten Pakualaman bagi RI. Dalam mendedikasikan diri untuk kepentingan bangsa, Sri Paku Alam VIII dan Kadipaten Pakualaman lebih banyak mengambil peran sebagai fasilitator. Sedangkan Sri Sultan HB IX, seperti telah diuraikan, lebih banyak tampil sebagai *master mind* dan *decision maker*. Namun, posisi Paku Alam VIII sebagai *the second leader* bukannya tidak penting. Dalam masa-masa sulit, peran seorang fasilitator seringkali justru sangat menentukan.

Peran Sri Paku Alam VIII dan Kadipaten Pakualaman sebagai fasilitator sangat berarti selama masa revolusi fisik (1945-1949). Selama ibukota RI berada di Yogyakarta (sejak 14 Januari 1946), Puro Pakualaman pernah dipakai sebagai tempat tinggal sementara oleh Presiden sekeluarga. Paku Alam VIII dan Puro Pakualaman memberi bantuan akomodasi dan logistik bagi semua peserta konferensi TKR. Dalam konferensi itu dipilih beberapa pimpinan baru, yaitu Kolonel Sudirman (Pimpinan Tertinggi TKR), Letjend. Urip Sumoharjo (Kepala Staf Umum TKR), dan Sri Sultan HB IX (Menteri Pertahanan). Seluruh pejabat TKR diberi bantuan berupa rumah-rumah dinas oleh Puro Pakualaman. Letjend. Urip Sumoharjo diberi rumah dinas yang berlokasi di jalan Widoro, Kotabaru. Selama perundingan KTN di Kaliurang (8-17 Desember 1947), Puro Pakualaman juga membantu akomodasi. Dengan demikian peran Sri Paku Alam VIII sejatinya sangat

signifikan. sehingga tepat jika masyarakat Yogya melalui Dinas Sosial Provisionsi DIY mengusulkan beliau juga sebagai Pahlawan Nasional. Adapun Sultan HB IX sudah lebih dulu ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

### Kontribusi Rakyat Yogya

Kepemimpinan dan keteladanan dwi tunggal Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII diikuti segenap rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Segenap penduduk berjuang keras untuk mempertahankan RI. Pemerintah DIY memberikan catatan resmi mengenai pengorbanan penduduk Yogya selama perang kemerdekaan (19 Desember 1948 – 30 Juni 1949). Kiranya perlu ditampilkan kembali tabel yang dibuat oleh Sujamto (1988, hal 254) mengenai pengorbanan itu.

#### Pengorbanan Rakyat Yogya

No	Tempat	Korban Manusia				Korban Uang (Rupiah)
		Mati	Luka	hilang	jumlah	
1	Kota Yogya	519	119	90	728	72.443.552
2	Kab. Bantul	1.005	160	221	1.436	67.391.209
3	Kab. Sleman	923	399	224	1.546	181.868.414
4	Kab. Gunung Kidul	157	30	1	188	8.400.765
5	Kab.	57	24	3	84	1.775.530

	Kulon Progo					
6	Kab. Adikarto	7	4	0	11	804.980
JUMLAH		2.718	736	539	3.993	332.684.450

Perjuangan rakyat Yogya untuk RI dilakukan dengan kesadaran penuh akan eksistensi Yogya sebagai daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Hal itu terlihat jelas dari bagaimana mereka mengidentifikasi diri sebagai rakyat dari Kasultanan Yogya. Ketika tentara Belanda ditarik mundur, seluruh rakyat berseru: "Merdeka! Merdeka! Hidup Sultan, hidup RI!"

Sujamto (1988) menyimpulkan bahwa Yogya bukan hanya sebuah daerah istimewa, tetapi telah memainkan peran istimewa dalam sejarah kemerdekaan RI. Kontribusi istimewa itu diberikan Yogya karena Pemerintah RI menaruh kepercayaan dan memberikan pengakuan proposional sebagai sebuah daerah istimewa di tengah republik ini.



## Bab 5.

### Mengatasi Krisis

*Ketika Ibukota RI akan dikembalikan lagi ke Jakarta, Sultan HB IX memberi bantuan dana sebesar 6 juta Gulden. Sementara ketika di awal era Orde Baru Indonesia mengalami krisis, Sultan HB IX berjuang mencari dana bantuan luar negeri.*

Pada masa awal Orde Baru terjadi sesuatu yang ironis. Di satu sisi, Sultan HB IX memperjuangkan usaha Pemerintahan Soeharto untuk mendapat dukungan finansial dari luar negeri. Namun di sisi lain, eksistensi DIY diobok-obok. Terlihat di sini kebesaran hati dan jiwa kenegarawanan HB IX. Keadilan pun dinyatakan Tuhan, DIY tetap tidak dihapuskan meskipun usaha untuk itu sangat gencar dan sistematis.

Jika pada masa-masa awal kemerdekaan RI DIY mendapat apresiasi, pada masa-masa awal Orde Baru DIY justru hendak dihapuskan. Jika pada permulaan Orde Lama DIY mendapatkan penguatan melalui Piagam Kedudukan, beberapa undang-undang, dan Penetapan Presiden, pada permulaan Orde Baru DIY hampir terganjal oleh sebuah undang-undang yang memperlumahkan status DIY dan DI Aceh.

Sedangkan mengenai komitmen DIY kepada RI, tidak pernah berubah baik pada jaman Orde Lama maupun pada jaman Orde Baru. Jika dulu Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII berjuang habis-habisan bahkan

berjihad untuk kemerdekaan RI, kontribusi mereka berdua pada periode Orde Baru pun tak kalah hebat.

### **Juruselamat Bangsa**

Memasuki masa pemerintahan Orde Baru, Sri Sultan HB IX tampil menjadi salah seorang tokoh nasional. Pertama-tama, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan dalam Kabinet Dwikora (1966). Empat bulan kemudian, dalam Kabinet Ampera, ia menjadi Menteri Utama bidang Ekonomi dan Keuangan. Dari tahun 1973 sampai tahun 1978, ia mendampingi Presiden Soeharto sebagai Wakil Presiden RI.

Masalah terbesar yang dihadapi pada masa awal Orde Baru itu adalah kesulitan ekonomi, tepatnya kebangkrutan ekonomi yang parah. Tingkat inflasi sebesar 650 persen. Cadangan devisa nyaris habis sehingga Presiden Soekarno memberhentikan impor beras yang mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan. Harga barang-barang terus melonjak, tiap bulan naik 50 persen. Harga bensin naik drastis, dari Rp. 4/liter menjadi Rp. 250/liter (22 November 1965). Pada bulan Januari 1966 sudah menjadi Rp. 1.000/liter.

Keadaan krisis tersebut diperparah setelah pemerintah mendevaluasi nilai rupiah, yaitu Rp. 1.000 menjadi Rp. 1. Siapa yang menukarkan Rp. 1.000 lama dengan Rp. 1 baru pun masih dikenai biaya sebesar 10

persen. Tentu saja wibawa rupiah hancur. Jika pada medium 1965 nilai tukar 1 dollar AS adalah Rp. 8.100, pada bulan Desember 1965 menjadi Rp. 50.000. Sementara itu, defisit APBN mencapai 300 persen pada tahun 1965 itu.

Dalam kondisi demikian, satu-satunya harapan Indonesia adalah bantuan luar negeri. Persoalannya, pertama, Indonesia tidak dipercaya lagi karena ketidakmampuannya membayar hutang-hutang asing. Beberapa perusahaan di Jerman Barat dan Perancis bahkan sudah bersiap-siap menuntut Indonesia di Pengadilan Internasional karena masalah hutang itu. Jepang telah menghentikan asuransi semua barang yang diekspor ke Indonesia. Kedua, idealisme Presiden Soekarno telah membawa Indonesia terasing dari pergaulan internasional. Indonesia telah keluar dari PBB, Bank Dunia, dan IMF (Dana Moneter Internasional). Idealisme Bung Karno dalam hal menentang kapitalisme dan imperialisme telah menjadi bumerang.

Dalam situasi darurat itu, Presiden Soeharto memutuskan untuk bergabung kembali dengan PBB, menjalin hubungan lagi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, dan mencari bantuan luar negeri. Meskipun kelak di kemudian hari, karena manajemen yang tidak beres akhirnya ketergantungan dari bantuan asing juga menjadi bumerang, kebijakan tersebut tepat untuk konteks saat itu. Namun, untuk

memulihkan kepercayaan internasional pada masa itu sama sekali bukan pekerjaan mudah! Menteri KLH saat itu, Emil Salim dalam buku "Tahta untuk Rakyat" (1982), berkata, "Kita sangat membutuhkan dana, masalahnya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan luar negeri yang menganggap kita tukang kemplang utang?". Di sinilah Sri Sultan HB IX tampil menjadi seorang juruselamat bangsa.

Kredibilitas dan kapasitas Sri Sultan HB IX ternyata diakui dunia dan oleh karena itulah dunia kembali mempercayai Indonesia dan tergerak memberi bantuan. Presiden Soeharto meminta bantuan Sri Sultan HB IX untuk mengurus kembalinya RI ke PBB, Bank Dunia, dan IMF, menjadwalkan kembali pembayaran hutang-hutang asing, serta mencari kredit baru. Ekonom Widjojo Nitisastro dalam buku "Tahta untuk Rakyat" (1982) berkomentar: "Peranan dan figur Sri Sultan telah berhasil mengembalikan kepercayaan terhadap Indonesia di luar dan di dalam negeri!"

Perjalanan Sri Sultan HB IX keliling dunia untuk mencari bantuan bagi Indonesia berhasil luar biasa. Kunjungan Sri Sultan HB IX ke Jepang menghasilkan kredit US \$ 30 juta (1966). Setelah berkeliling Eropa Barat, Sri Sultan HB IX mendapat kredit US \$ 170 juta dan janji bantuan US \$ 180 juta. Mata dunia pun tertuju pada Indonesia. Atas undangan Jepang, sejumlah negara kreditor (AS, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman Barat) bersama Bank Dunia dan IMF,

bertemu dalam “*Tokyo Meeting*” yang didisain khusus untuk membantu ekonomi Indonesia (19-20 September 1966). Ketika mengajukan dukungan dana di Belanda, wibawa Sri Sultan HB IX sangat besar. Menurut catatan Frans Seda dalam buku “*Tahta untuk Rakyat*” (1982), dalam perundingan yang alot itu Sri Sultan HB IX berani berkata lantang: “*Nu of nooit meer!*” (sekarang atau tidak pernah sama sekali). Lobi Sri Sultan HB IX yang mendapat simpati pers setempat mendorong Perdana Menteri Belanda, Joseph Luns, menyetujui perjanjian sebelum HB IX pulang ke Indonesia.

### **Sebuah Ironi**

Ironisnya, di tengah perjuangan Sri Sultan HB IX untuk menyelamatkan bangsa ini, nasib DIY di awal masa Orde Baru itu hampir saja kandas. Proses keluarnya Undang-undang No. 5 tahun 1974 ditengarai dengan lontaran-lontaran gagasan untuk menghapuskan DIY.

Visi ditelorkannya UU No. 5 tahun 1974 itu sebenarnya bagus, yaitu menegaskan NKRI. Namun sayangnya tidak mempertimbangkan aspek keistimewaaan daerah-daerah istimewa sebagaimana ditandakan oleh Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya. Hal itu terjadi karena undang-undang ini menekankan prinsip penyeragaman sistem pemerintahan di daerah-daerah.

Penekanan pada NKRI memang sangat kuat dalam undang-undang tersebut. Dalam Penjelasan Umum UU

No. 5 tahun 1974 butir h ditulis: "Oleh karena menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita adalah Negara Kesatuan, maka dalam penyusunan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan dalam melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan apapun dalam rangka kenegaraan harus tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia". UU No. 5 tahun 1974 ini juga menekankan prinsip bahwa: "Pelaksanaan/pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkuat negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya".

Kuatnya orientasi pada NKRI itu membawa pemikiran tunggal untuk menyeragamkan sistem pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Dalam konsideran "menimbang" huruf c pada UU No. 5 tahun 1974 itu ditulis demikian: "Bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan Pemerintah Daerah sejauh mungkin diseragamkan". Cita penyeragaman inilah yang mendorong munculnya ide untuk menghapus DI Aceh dan DIY dari bumi Indonesia.

Ironisnya lagi adalah karena Orde Baru merupakan rezim pemerintahan yang menyatakan diri berkomitmen menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kenyataannya, ada bagian dari UUD 1945 yang tidak dijalankan secara murni dan konsekuen. Pasal 18 dan penjelasannya

tentang daerah-daerah istimewa di Indonesia tidak diperhatikan. Sujamto (1988) mengatakan bahwa Pemerintah Orde baru tidak lagi memandang dan mengingati hak asal-usul susunan asli yang menjadi dasar keistimewaan suatu daerah.

### **Nilai Plus UU No. 5 Tahun 1974**

Sistem pemerintahan daerah sebagaimana dikonsepsikan dalam UU No. 5 tahun 1974 itu sebenarnya mempunyai banyak nilai plus. Penulis bersama tim dari Menpan, Depdagri, dan utusan dari DKI, DIY, dan Bali pernah diminta untuk mempresentasikan sistem Pemerintahan Daerah RI tersebut di Vietnam. Kami berkeliling negeri itu untuk memberi lokakarya karena mereka rupanya sangat tertarik. Beberapa waktu kemudian, para ahli pemerintahan Vietnam dikirim untuk belajar di Indonesia.

Undang-undang No. 5 tahun 1974 yang mejadi pilar kokohnya NKRI tersebut pada dasarnya menerapkan tiga azas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pertama, azas desentralisasi. Maksudnya, sejumlah urusan diserahkan (di-devolusi-kan) dari pemerintah pusat kepada daerah yang lebih rendah. Dengan penyerahan urusan itu maka daerah yang bersangkutan memperoleh wewenang dan tanggungjawab sepenuhnya, menyangkut soal kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai

pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah. Dengan demikian terwujudlah daerah yang otonom yang mengurus rumah tangganya sendiri.

Kedua, azas dekonsentrasi. Pemerintah tidak menyerahkan semua urusan kepada daerah karena pertimbangan daya guna serta eksistensi NKRI. Urusan pertahanan-keamanan, peradilan, moneter, dan luar negeri tetap ditangani oleh pemerintah pusat. Berbagai urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah ditangani oleh "Perangkat Wilayah". Perangkat itu memperoleh pelimpahan wewenang namun tanggungjawab tetap pada pemerintah pusat, baik kebijakannya, perencanaannya, pengendaliannya, dan pembiayaannya. Perangkat pelaksana di daerah-daerah itu adalah instansi-instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh kepala wilayah, yaitu gubernur, bupati/walikota, camat, dan jajarannya masing-masing.

Ketiga, azas tugas pembantuan (*medebewind*). Sejumlah urusan yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat atau pemerintah atasan dilaksanakan di daerah. tetapi, karena di daerah tidak atau belum dibentuk perangkat wilayah (instansi vertikal) yang dapat menerima pelimpahan maka urusan itu dititipkan kepada pemerintah daerah (otonom) meskipun tidak lantas diserahkan. Artinya pemerintah daerah (otonom) hanya membantu

melaksanakannya. Tanggungjawab mengenai perencanaan, pengendalian, pengawasan dan sampai pembiayaan tetap ada pada pemerintah pusat dan bukannya menjadi wewenang atau tanggungan rumah tangga pemerintah daerah.

Pelaksanaan ketiga azas itu berdampak positif bagi masyarakat. Meskipun ketiga azas itu dapat dibedakan dari aspek administrasi, tetapi dalam praktek di lapangan dalam hal usaha untuk mengayomi, membina, dan melayani masyarakat tidak dibedakan. Dengan demikian, masyarakat justru melihat dan merasakan bahwa pemerintahan kita itu bulat dan komprehensif.

Pelaksanaan sistem di atas sangat mendukung kokohnya NKRI. Cara berpikir dikotomis yang membedakan pemerintah pusat dan daerah tidak menimbulkan pemahaman keliru tentang penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan. Karena itu dikembangkan konsep bahwa “Pusat adalah pusatnya daerah, dan daerah adalah daerahnya pusat”. Dengan demikian terjadi harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah. dalam nkri tidak akan ada Pemerintahan di Daerah jikalau tidak terlebih dahulu ada pemerintahan pusat.

### **Kronologi Upaya Penghapusan DIY**

Penekanan yang kuat pada kepentingan NKRI di atas menyebabkan UU No. 5 tahun 1974 itu

mengedepankan penyeragaman sistem pemerintah di daerah. Akibatnya terjadi pergeseran pemikiran tentang status daerah-daerah istimewa di bumi pertiwi. Sujamto (1988) mencatat bagaimana munculnya ide-ide tentang penghapusan DI Aceh dan DIY dalam perkembangan draft-draft RUU tersebut.

Dalam Draft I RUU (4 Agustus 1971) prinsip penyeragaman belum ditekankan. Untuk daerah otonom masih dipakai istilah Daerah Swatantra. Pada bagian Peraturan Peralihan Pasal 59 ayat (2) dikatakan bahwa daerah istimewa masih diakui dan berlaku.

Pada ayat (3) dijelaskan mengenai ciri keistimewaan DIY sebagai berikut: “Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-undang ini, yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah lainnya menurut Undang-undang ini.

Dalam Draft II RUU (16 Agustus 1971) yang tidak banyak perubahan dibanding draft I ini belum memasukkan prinsip penyeragaman pemerintahan daerah. Jumlah pasalnya bertambah dari 60 menjadi 74.

Dalam Draft III RUU (2 Oktober 1971) prinsip penyeragaman pemerintahan daerah telah dimasukkan pada bagian Konsiderans “Menimbang”. Pada bagian d ditulis bahwa: ”Bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan

Pemerintahan Daerah sejauh mungkin harus diseragamkan”.

Namun, draft ini masih menjamin eksistensi DIY dan juga DI Aceh. Pasal 87 bagian b menjelaskan bahwa: ”Sebutan Daerah Istimewa yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangan berlaku terus sampai ditentukan lain dengan peraturan perundangan. Bagian c menjelaskan bahwa: ”Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta menurut undang-undang ini, yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah lainnya menurut undang-undang ini”.

Draft IV RUU (5 November 1971) ini mulai mempersoalkan eksistensi DI Aceh. Draft ini hanya mengakui DIY dan menolak eksistensi DI Aceh. Hal itu adalah karena berpatokan pada UUD 1945. DIY bertolak pada Pasal 18 UUD 1945. Sedangkan sumber hukum DI Aceh bukan pada Pasal 18 UUD 1945, namun pada Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959.

Mengenai eksistensi DIY terdapat dalam Aturan Peralihan, yakni Pasal 92. Pada huruf b ditulis bahwa: ”Sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku terus sampai ditentukan lain dengan Undang-undang. Sama seperti draft III, pada huruf c ditulis bahwa: ”Kepala dan

Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta menurut undang-undang ini, yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah lainnya menurut undang-undang ini”.

Konsep dan rumusan ketentuan tentang DIY pada Draft V RUU (4 Januari 1973)

persis sama dengan apa yang terdapat dalam draft IV. Sebutan dan kedudukan DI Aceh dihapuskan sama sekali. Sebagai catatan, dalam draft ini dipakai istilah ”otonomi yang riil dan sehat”.

Dalam Draft VI RUU (1 Maret 1974), DIY dipertahankan dan DI Aceh dihapuskan. Istilah Daerah Swatantra diganti dengan Daerah Otonom. Istilah ”otonomi yang riil dan sehat” diganti dengan ”otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab”.

Dalam Draft VII (5 Maret 1974), DIY mulai dipersoalkan. Pada Aturan Peralihan, yaitu bagian b ditulis bahwa: ”Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-undang ini, yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah lainnya, yang kemudian untuk pengangkatan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berikutnya berlaku ketentuan-ketentuan yang

dimaksud dalam pasal-pasal 14, 15, dan 17 sampai 26 Undang-undang ini". Dengan demikian, status istimewa bagi DIY hanya dipertahankan sementara sampai terjadinya penggantian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rumusan ketentuan tentang DI Aceh dan DIY dalam draft VIII (28 Maret 1974) dan draft IX (30 April 1974) ini sama persis dengan yang ada dalam draft VII.

### **Reaksi, Musyawarah, dan Kesepakatan Akhir**

Pergeseran pemikiran ke arah penyeragaman pemerintah daerah dan penghapusan daerah-daerah istimewa itu mengundang reaksi. Menurut catatan Sujamto (1988), terjadi pro-kontra di kalangan intelektual Aceh mengenai penghapusan DI Aceh. Kaum ulama Aceh jelas-jelas menolak penghapusan itu. Sedangkan Gubernur DI Aceh waktu itu mengatakan bahwa DI Aceh dapat ditiadakan namun membutuhkan waktu lebih lama lagi.

Meskipun penolakan keras tidak terjadi karena budaya Orde Baru mengharamkan protes, reaksi ketidaksetujuan muncul pula. Menurut catatan Sujamto (1988), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia melalui Sabam Sirait mengatakan bahwa penghapusan itu belum perlu. Bagi PDI, penghapusan Daerah Istimewa berarti pengingkaran terhadap Pasal 18 UUD 1945. Hal sama juga ditandaskan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya, H. Imam Sofyan.

Akhirnya, setelah dimusyawarahkan maka disepakati bahwa dalam UU No. 5 tahun 1974 itu DI Aceh dan DIY sama-sama tidak jadi dihapuskan. Untuk DI Aceh dijamin dalam penjelasan Pasal 93. Sedangkan untuk DIY dijamin dalam Pasal 91 pada huruf b.

### **Pendirian Sultan HB IX tentang DIY**

Mengenai hiruk-pikuk upaya penghapusan status keistimewaan DI Aceh dan DIY itu Sultan HB IX tidak memberi komentar. Ia lebih memfokuskan diri pada pengabdianya kepada Pemerintah RI. Dalam masa itu, HB IX menjabat sebagai Wakil Presiden RI sejak 24 Maret 1973 sampai 23 Maret 1978 setelah sebelumnya menjadi Menteri Negara Ekuin sejak 1968 dan 1971. Dalam hal ini terlihat bahwa tentang DIY ia menyerahkan keputusannya pada kehendak rakyat yang diwakili oleh DPR RI. Dan terbukti bahwa rakyat tetap menghendaki keistimewaan itu. HB IX sendiri tidak mau mengintervensi dan justru orang-orang lainlah yang memperjuangkan tegaknya DIY.

## Bab 6.

### Memimpin Bangsa dengan Memberi Contoh

*Eskalasi kepemimpinan Sultan HB IX sebagai tokoh nasional dibarengi dengan kemajuan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai contoh (demplot) bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Hal itu sekaligus membuktikan bahwa DIY merupakan tatanan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis sejak dulu.*

Sejak berkontak dengan Presiden Soekarno, menyatakan bergabung dengan RI, dan mendapatkan Piagam Kedudukan dari Presiden Pertama RI itu, Sultan HB IX tampil di etalase kepemimpinan nasional. Apalagi setelah Ibukota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta dan Sultan HB IX memainkan banyak peran kunci, ketokohnya di level nasional tidak diragukan lagi. Dan yang menarik, pada tahun-tahun itu Sultan HB IX masih terhitung muda sebab ia lahir pada 1912 – pemimpin milenial untuk ukuran masa kini.

Sejak awal 1946 hingga 1978, Sultan HB IX menjabat posisi-posisi penting nasional yaitu sebagai: Menteri Negara dalam Kabinet Syahrir (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947), Menteri Negara dalam Kabinet Amir Syarifuddin I (3 Juli 1947 – 11 November 1947), Menteri Negara dalam Kabinet Amir Syarifuddin II (11 November 1947 – 29 Januari 1948), Menteri Negara dalam Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 – 4 Agustus

1949), Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan Dalam Negeri dalam Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949), Menteri Pertahanan dalam Kabinet Hatta era RIS (20 Desember 1949 – 6 September 1950), Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951), Menteri Pertahanan dalam Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953), Menteri/Ketua BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (13 November 1963 – 27 Agustus 1964), Menteri Koordinator Pembangunan (21 Februari 1966), Wakil Perdana Menteri Bidang Ekubang – Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (27 Maret 1966), Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan (25 Juni 1966), Menteri Negara Ekuin – ekonomi, keuangan, dan industri (11 Oktober 1967), Menteri Negara Ekuin (6 Juni 1968), Menteri Negara Ekuin (9 September 1971), Wakil Presiden RI (24 Maret 1973 – 23 Maret 1978).

### **Pembangunan Demokrasi**

Setelah periode Revolusi Kemerdekaan berakhir dan Ibukota RI dikembalikan dari Yogyakarta ke Jakarta, mulailah Indonesia membangun. Sejarahwan M.C. Rickleds (2008) menyebut periode 1950-1957 sebagai “periode percobaan demokrasi yang pertama”. Pada 1955, diselenggarakan pemilihan umum legislatif untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Waktu itu cukup berhasil, diikuti banyak orang yaitu 39 juta orang yang memberika

suara. Mereka mewakili 91,5% para pemilih yang terdaftar. Hasil pemilihan itu adalah sebagai berikut.

Tabel  
Hasil Pemilu Legislatif 1955

Partai	Suara sah	% Suara sah	Kursi parlemen	% kursi parlemen
PNI	8.434.652	22,3	57	22,2
Masyumi	7.903.886	20,9	57	22,2
NU	6.955.141	18,4	45	17,5
PKI	6.176.904	16,4	39	15,2
PSII	1.091.160	2,9	8	3,1
Parkindo	1.003.325	2,6	8	3,1
Partai Katolik	770.740	2,0	6	2,3
PSI	753.191	2,0	5	1,9
Murba	199.588	0,5	2	0,8
Lain-lain	4.496.701	12,0	30	11,7
Jumlah	37.785.299	100	257	100

Namun yang menarik, Pemilu 1955 itu didahului dengan Pemilu 1951 yang merupakan ujicoba pemilu legislatif yang diadakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Minahasa. Pada 18-24 Juli 2019, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi DIY menggelar pameran Pemilu di Sasono Hinggil Dwi Abad yang menampilkan arsip Pemilu 1951 di Yogyakarta itu.

Dalam pameran arsip bertajuk “Daulat Rakyat Yogyakarta, Cermin Demokrasi Indonesia” itu ditunjukkan bagaimana Pemilu Legislatif di DIY pada 1951 sangat sukses dengan partisipasi masyarakat sebesar sebesar 88% (Kedaulatan Rakyat, 18 Juli 2019)

Percontohan demokrasi dari Yogyakarta pada tahun 1951 itu didahului oleh terbitnya UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian percontohan demokrasi itu adalah percontohan demokrasi yang terjadi di dalam Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk konteks saat itu, percontohan ini menjadi fenomena tersendiri mengingat DIY sangat kental dengan kepemimpinan monarkisnya.

### **Kemajuan Demokrasi di Yogyakarta**

Kasultanan Yogyakarta yang merupakan penerus sah Mataram Islam adalah sebuah kerajaan Jawa (*projo kejawen*) dengan Sri Sultan sebagai rajanya. Sejak 1744 sampai akhir masa penjajahannya di Indonesia (1942), Belanda memunculkan status dan peran ganda Patih Dalem (*rijksbestuurder*) yang dalam praktek lebih memihak kepada pemerintahan kolonialis. Patih Dalem adalah pemimpin yang berkuasa menjalankan pemerintahan kerajaan Jawa, yang bertanggungjawab kepada Gubernur Belanda (pihak penjajah) dan Sri Sultan yang sedang bertahta sekaligus.

Keberpihakan para Sultan kepada rakyat menyebabkan konflik dengan para Patih Dalem. Sultan pernah mengangkat Patih Dalem tanpa persetujuan Belanda. Bahkan, pernah ada Patih Dalem yang dibunuh karena dianggap sebagai antek Penjajah yang jahat. Ia dikenal sebagai *Patih Sedo Kedhaton*.

Dalam perspektif budaya Jawa, seorang raja yang arif haruslah seorang pemimpin yang tidak sewenang-wenang, namun memihak kepada rakyat. Menurut Kismoyo (2004), kepemimpinan Jawa sarat akan nilai-nilai demokrasi. Misalnya adalah prinsip *sura dira jayaningrat bakal lebur dening pangastuti* (orang yang menyalahgunakan kekuasaan akan hancur oleh orang yang berbudi pekerti luhur). Pemimpin juga harus mawas diri dan bertanggungjawab (*mulat sarira hangrasa wani, rumangsa handarbeni, melu hangrungkebi*).

Dialog antara raja dan rakyat juga telah membudaya di Nagari Ngayogyakarta. Tradisi *laku pepe* misalnya, adalah wujud sikap raja yang harus merengkuh rakyat. Dalam tradisi itu, para wakil *kawulo* berjemur di alun-alun atau duduk di Pagelaran Kraton sambil mengenakan busana putih-putih. Biasanya, mereka kemudian diterima langsung oleh Sultan. Dalam kesempatan ini rakyat diperkenan mengajukan pengaduan-pengaduan sehubungan dengan nasib mereka. Rakyat juga boleh komplain jika merasakan perlakuan yang tidak adil.

Amanat 30 Oktober 1945 yang dikeluarkan menyusul Amanat 5 September 1945 menegaskan bahwa HB IX dan PA VIII membuka akses bagi masyarakat untuk turut menjalankan roda pemerintahan di DIY. Pada diktum kelima dari amanat itu ditulis bahwa sebagai berikut.

”Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1945 oleh Komite Daerah Yogyakarta telah dibentuk suatu Badan Pekerja yang dipilih dari antara anggota-anggotanya, atas kehendak dan panggilan masa yang disertai untuk menjadi Badan Legislatif (Badan Pembikin Undang-Undang) serta turut menentukan haluan jalannya Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab kepada Komite Nasional Daerah Yogyakarta, maka Kami Sri Paduka Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta, dengan ini menyatakan: Supaya jalannya pemerintahan dalam daerah kami berdua dapat selaras dengan Undang-undang Dasar RI, bahwa Badan Pekerja tersebut adalah suatu Badan Legislatif (Badan Pembuat Undang-undang) yang dapat dianggap sebagai wakil rakyat dalam daerah kami berdua untuk membikin undang-undang dan menentukan haluan jalannya pemerintahan dalam pemerintahan daerah kami berdua yang sesuai dengan kehendak rakyat.”

Menurut Soedarisman Poerwokosoemo (1984), diktum kelima di atas, bila dikaitkan dengan diktum kedua Amanat itu dan diktum kedua dari Amanat sebelumnya (5 September 1945) menunjukkan dengan jelas terjadinya proses demokratisasi di Yogya. Pada diktum kedua Amat 5 September 1945 ditegaskan bahwa Sultan HB IX dan PA VIII memegang kekuasaan di daerahnya masing-masing (Kasultanan dan Pakualaman yang merupakan daerah Yogya itu sendiri). Sedangkan dalam diktum ke dua Amanat 30 Oktober 1945 menegaskan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang dulunya dipegang oleh pemerintah jajahan (dalam jaman Belanda dijalankan oleh gubernur dengan kantornya, dalam jaman Jepang oleh Koti Zimu Koku Tyokan dengan kantornya) telah direbut oleh rakyat Yogya dan diserahkan kembali kepada kekuasaan HB IX dan PA VIII. Jadi, jelas sekali bahwa HB IX dan PA VIII berkuasa penuh atas daerah Yogya.

Kronologi yang terjadi menurut Poerwokoesoemo (1984) adalah proses di mana rakyat menyerahkan kekuasaan kepada HB IX dan PA VIII yang dilanjutkan dengan penyerahan kembali kekuasaan itu oleh HB IX dan PA VIII kepada rakyat. Proses itu adalah sebagai berikut. Pertama, dengan Amanat 5 September 1945, HB IX dan PA VIII menyatakan diri sebagai penguasa atas Yogya.

Kedua, meskipun sudah ada Amanat tersebut, kenyataannya Yogya masih dikuasai oleh Jepang.

Karena itu rakyat berjuang dan berperang merebut Yogya dari kekuasaan Jepang. Hasilnya, 7 Oktober 1945 Jepang menyerah. Yogya direbut dari kekuasaan Jepang itu. Maka, rakyat menyerahkan kembali kekuasaan Yogya itu kepada HB IX dan PA VIII.

Ketiga, melalui Amanat 30 Oktober 1945 HB IX dan PA VIII menyerahkan kembali kekuasaan Yogya itu kepada rakyat. Caranya adalah memberi kesempatan kepada rakyat untuk berama-sama dengan HB IX dan PA VIII menjalankan pemerintahan atas Yogya. Dalam diktum kelima Amanat 30 Oktober 1945 itu jelas ditegaskan bahwa Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (KNI) DIY dianggap sebagai "wakil rakyat" dalam Kasultanan dan Pakualaman, dianggap sebagai Badan Legislatif (Badan Pembuat Undang-Undang) untuk mengatur DIY atas nama rakyat. Jadi, Badan Pekerja KNI itu mendapat kekuasaan untuk turut menentukan haluan jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan kehendak rakyat.

Selanjutnya, HB IX dan PA VIII bersama-sama dengan Badan Pekerja KNI DIY sebagai wakil rakyat berkuasa untuk mengeluarkan segala peraturan yang mengatur kehidupan DIY. Inilah perubahan sosial-politik yang terjadi di Yogya. Menurut Selo Soemardjan (1986), terjadilah peralihan orientasi dari sikap rakyat untuk "menunggu perintah Sultan" menjadi sikap untuk "menunggu keputusan KNI". Dengan demikian DIY berevolusi dari monarki menjadi demokrasi!

Bukan hanya itu, komitmen Yogya pada demokrasi juga ditunjukkan dengan pengembangan dasar-dasar kehidupan demokrasi di tingkat akar rumput. Dalam bukunya tentang DIY, Poerwokosoemo (1984) mencatat bahwa Yogya segera mengadakan reformasi fundamental kehidupan desa-desanya. Reformasi yang mengarah pada demokratisasi dan otonomisasi desa itu digerakkan oleh Maklumat No 7 tahun 1945 dan Maklumat-maklumat No 14, 15, 16, dan 17 Tahun 1946. Maklumat-maklumat itu ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Kepala Daerah DIY), Sri Paku Alam VIII (Wakil Kepala Daerah DIY), dan Moh Saleh (Ketua Badan Pekerja KNI-DIY).

Reorganisasi dan regulasi pemerintahan kelurahan/desa dilakukan untuk menumbuhkan kehidupan yang demokratis. Berdasar Maklumat No 7 tanggal 6 Desember 1945, dibentuklah DPR Kelurahan (Dewan Kelurahan). Tugasnya adalah mewakili seluruh rakyat di dalam daerah perwakilannya itu untuk membicarakan rumah tangga daerah perwakilan itu dan membuat aturan-aturannya.

Maklumat No 14 tanggal 11 April 1946 mengatur tentang DPR Kelurahan dan Majelis Permusyawaratan Desa. Pada pasal 6 diatur tentang kewajiban Majelis desa yaitu (1) mendorong Dewan Kelurahan ke arah perwakilan yang sempurna, (2) mengamati-amati peraturan dan pekerjaan Dewan Kelurahan agar semua itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum

desa, (3) mengabsahkan rancangan anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran yang dibuat oleh Dewan Kelurahan, (4) mengabsahkan peraturan-peraturan tentang hak tanah yang dibuat oleh Dewan Kelurahan dan mengabsahkan putusan-putusan Dewan Kelurahan tentang perselisihan (sengketa) tanah.

Maklumat ini rupanya menekankan aspek keharmonisan dalam kehidupan demokrasi di desa. Jangan sampai reformasi demokrasi justru menimbulkan konflik dan *chaos* seperti sekarang ini. Karena itu ditekankan prinsip “persaudaraan” yang maknanya lebih dari sekedar koordinasi. Hal itu terlihat pada Pasal 7 yang berbunyi: “Agar ada persaudaraan (koordinasi) antara Dewan-dewan Kelurahan itu di dalam menjalankan kewajibannya masing-masing, maka Badan Eksekutif Kapanewon (sementara KNI Kapanewon bersama-sama Panewu PP) berkewajiban mengawasi pekerjaan Dewan-Dewan Kelurahan di dalam daerahnya.

Demokrasi Pancasila di Indonesia seharusnya dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Ketika reformasi demokrasi melanda kehidupan di desa, Yogya menghendaki supaya nafas kehidupan paguyuban (*gemeinschaft*) tetap terjaga. Demokrasi tidak boleh memicu tumbuhnya suasana persaingan yang saling menjatuhkan dan mau menangnya sendiri. Inilah model demokrasi yang dikembangkan di Yogya yang semoga tetap dikembangkan sampai sekarang.

Maklumat No 15 tahun 1946 mengatur masalah pemilihan pamong kalurahan. Menurut Pasal 1 ayat (1), yang berhak memilih Lurah Desa dan Prabot-prabot Desa (Pamong Kalurahan) ialah segenap Kepala somah warganegara baik laki-laki maupun perempuan berumur 18 tahun ke atas, sehat fikirannya, dan telah 6 bulan jadi penduduk kelurahan itu. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1), pemilihan lurah desa itu dilakukan secara langsung.

Pemilihan lurah desa secara langsung saat itu unik. Dibuat sangat sederhana karena masih banyak penduduk pemilih yang masih buta huruf. Kalau ditulis nama kandidat A atau B atau C, mereka tidak tahu. Penduduk hanya tahu bila melihat langsung orang-orangnya. Karena itu, pada hari "H" pemilu, beberapa kandidat diminta duduk di sebuah ruangan tempat pemilu itu diadakan. Setiap kandidat diidentikkan dengan simbol berupa benda-benda tertentu. Misalnya di tempat duduk kandidat A ditaruh jagung, di tempat duduk kandidat B ditaruh padi, dan di tempat duduk kandidat C ditaruh pisang.

Bagaimana cara mengumpulkan suara? Tak jauh dari situ, dibuatlah 3 wadah terbuat dari bambu (*bumbung*). *Bumbung* pertama diberi simbol jagung, untuk menampung suara bagi kandidat A. *Bumbung* kedua diberi simbol padi, untuk menampung suara bagi kandidat B. *Bumbung* ketiga diberi simbol pisang, untuk menampung suara bagi kandidat C. Pemilih yang

datang diberi sebatang lidi (*biting*) untuk dimasukkan ke *bumbung* mana yang sesuai dengan pilihannya.

Jadi, kepemimpinan nasional Sultan HB IX disertai dengan kemajuan Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pembangunan demokrasi. Sultan HB IX memimpin bangsa dengan memberi contoh konkret, bukan sekedar dengan menyampaikan visi, pemikiran, dan narasi.

## **Bab 7.**

### **Memihak Rakyat**

*Panitia Peringatan 70 Tahun Sri Sultan Hamengku Buwono IX, atas perkenan Sultan HB IX memberi judul buku peringatan itu “Tahta untuk Rakyat”, merepresentasikan Sang Sultan sebagai figur demokrat pro-rakyat.*

Sultan HB IX senantiasa berpihak kepada rakyat. Tahtanya sudah dianugerahkan untuk rakyat. Dengan demikian ia tidak lagi mengedepankan pola feodalisme yang menempatkan dirinya sebagai raja yang berkuasa dan rakyat jelata sebagai pihak yang dikuasainya. Sultan HB IX adalah seorang demokrat sejati yang bahkan memelopori demokrasi sebelum masanya tiba.

### **Kebijakan yang Demokratis**

Menurut catatan Moedjanto (1994) yang pendapatnya juga dikutip Purwadi (2007), ada beberapa kebijakan Sultan HB IX yang menyebabkan semakin tumbuhnya suasana demokratis di Yogya. Pertama, seperti juga telah dibahas, HB IX menghilangkan jabatan Papatih Dalem. Pada masa silam patih ini menjadi jembatan antara raja dengan rakyat. Semua urusan rakyat baru sampai kepada raja melalui dirinya. Dengan dihilangkannya perannya maka Sultan menjadi dekat dengan rakyat.

Kedua, upacara-upacara kraton yang rumit yang memakan dana besar disederhanakan tanpa

mengurangi maknanya. Hal itu membuat raja bisa lebih berinteraksi dengan rakyat. Jarak antara bangsawan dan rakyat jelata terkikis.

Ketiga, sejak 1943 semua jabatan pamong praja di Yogya sudah dibuka untuk semua pelamar dari seluruh lapisan masyarakat. Dasar pemilihannya adalah melalui ujian saringan (*achieved status*) bukan oleh faktor keturunan (*ascribed status*).

Keempat, jabatan wedana yang menjadi penghubung antara bupati dari penewu (camat) dihapuskan pula. Dengan itu pemerintahan lebih ramping dan demokratis.

Kelima, masyarakat diajak memberi kontribusi. Pada 1944 dibentuklah Panitia Pembantu Pamong Praja yang merupakan semacam badan pertimbangan tingkat kapanewon (kecamatan). Anggota badan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat sehingga bisa ikut memberi masukan-masukan secara demokratis.

Keenam, pada awal kemerdekaan di Yogya sudah dibentuk KNID dan kemudian Sultan HB IX dan PA VIII menyatakan bahwa Badan Pekerja KNID berkedudukan sebagai badan legislatif pembentuk undang-undang yang mewakili rakyat.

Ketujuh. Kepemimpinan HB IX merubah konsep *nderek ngarsa dalem* menjadi konsep kepemimpinan *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karso, tut wuri handayani* (di depan memberi teladan, di tengah

mengembangkan prakarsa, dan di belakang memberi dukungan).

### **Pribadi Demokrat**

Pada Bab 10 dijelaskan bagaimana Sultan HB IX bertumbuh dalam pendidikan Barat. Sejak usia 4 sampai 27 tahun senantiasa hidup bersama keluarga Belanda. Ia pun berkuliah di universitas bergengsi di Nederland. Karena itu ia mempunyai kepribadian demokrat yang modern.

Sebagai seorang demokrat, kecuali karena sesuatu yang bersifat protokoler, HB IX sebenarnya ingin diperlakukan biasa-biasa saja. Tidak seperti seorang raja Jawa pada masa-masa silam yang harus dihormati begitu rupa dengan sikap-sikap tertentu yang bersifat simbolis sakral.

Pada hari penobatannya, 18 Maret 1940, HB IX sudah menunjukkan sikap egalitariannya. Ia memberi kesempatan kepada dua wartawan lokal untuk duduk bersanding dengan para bangsawan dan tamu Belanda. Dalam buku "Tahta untuk Rakyat" (1982, hal 49) dimuat laporan salah seorang wartawan yang bernama Bramono seperti sudah dibahas pada Bab 1.

Apa yang dialami oleh kedua wartawan itu memang sebuah kejadian luar biasa. Para pribumi mendapat kesempatan duduk sejajar dengan para bangsawan dan para pembesar Belanda, suatu hal yang tidak lazim terjadi. Bramono menyebutnya sebagai kejadian

yang pertama. Sebuah perubahan baru yang dulu tidak pernah mungkin terjadi.

Dalam kehidupan feodal pada masa itu, stratifikasi sosial terbangun dengan sistem pelapisan yang ketat. Antara golongan bangsawan dengan rakyat jelata dibedakan dengan sangat jelas (Sumarsih, 1990). Golongan bangsawan pun masih diklasifikasi lagi menjadi, pertama, mereka yang benar-benar termasuk kerabat raja. Kelompok ini adalah orang-orang yang memiliki gelar-gelar kebangsawanan seperti telah dibahas dalam Bab 19. Kedua, mereka yang menjadi pegawai pemerintahan pada jaman pemerintahan Hindia Belanda. Ketiga, mereka yang menjalankan tugas dari raja.

Sistem pelapisan sosial itu berimplikasi pada pola-pola penghormatan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam acara-acara resmi. Untuk menghadap seorang Sultan menyembah dan berjalan sambil jongkok (*laku ndodok*). Dalam bertutur kata pun ada tingkatan-tingkatannya untuk menghormati. Lapisan bawah harus berbahasa Jawa halus kepada lapisan atas sebagai ekspresi penghormatan itu.

Jadi, kalau dalam acara penobatan itu kedua wartawan tadi mendapatkan kedudukan yang sama dengan para bangsawan dan para pembesar Belanda, benar-benar merupakan sebuah perubahan. Sejak

awal, meskipun perubahan tidak bisa dilakukan dengan drastis, Sultan HB IX telah membuat perubahan-perubahan yang sangat signifikan.

Dalam buku "Tahta untuk Rakyat" (1982) yang legendaris itu juga diceritakan pengalaman HB IX berinteraksi dengan rakyat biasa di jalanan. Kisahnya, pada 1946 HB IX memberi tumpangan kepada seorang pedagang beras saat dalam perjalanan mobil *jeep* dari luar kota sampai ke kota Yogya. Waktu itu HB IX memberi tumpangan karena si pedagang tadi menyetopnya di pinggir jalan. Sultan bahkan membantu mengangkat barang-barang dagangannya itu ke mobil. Namun waktu *simbok* tadi akan memberi uang maka HB IX menolaknya. Setelah tahu siapa sang sopir itu, wanita tadi langsung jatuh pingsan. Berita tentang hal itu dimuat di koran-koran Yogya.

Untuk situasi waktu itu, dalam hal mana seharusnya seorang Sultan dihormati dan ditakuti, HB IX bersikap lain. Ia tidak membedakan orang. Demokratis. Dekat dengan *kawulo alit*. Hal itu bukan semata-mata karena latar belakang pendidikan Baratnya, tapi karena visi "tahta untuk rakyat" yang dilakoninya dengan konsisten.

Karena itu, ketika wafat, seluruh rakyat berkabung. Besar kecil, tua muda, kaya miskin, semua merasa kehilangan. Harian *Kedaulatan Rakyat* (sejak 4 sampai 15 Oktober 1988) menuliskan laporan istimewa

sehubungan dengan wafat dan pemakaman Sultan HB IX. Salah satu laporannya adalah sebagai berikut.

Ratusan ribu warga menyambut dan menghormati kedatangan jenazah Sri Sultan. Jum'at, 7 Oktober 1988 sekitar pukul 09.00 sepanjang jalan yang dilalui massa menanti dengan antusias. Mereka ada yang lalu bersimpuh dan melakukan sembah. Ada yang memberi hormat ala tentara. Tak jarang pula yang melambaikan tangannya. Banyak yang menitikkan air mata. Ketika iringan jenazah sampai di depan Kantor *KR* di Jalan Mangkubumi, orang menanti dan menghormati dengan taksim, "Dhuh Gusti...selamat jalan Sultan."

Ketika Sri Sultan HB IX wafat, tak berlebihan jika dikatakan bahwa dunia memberikan penghormatan terakhirnya. Amerika Serikat meminjamkan pesawat *Air Force Two* yang bisa digunakan wakil presiden untuk mengangkut jenazah Sri Sultan HB IX sampai ke Honolulu, Hawaii. Pada tanggal 4 Oktober 1988, jenazah diberangkatkan dari *Andrew Air Force Base* di Maryland, Amerika Serikat dengan lebih dahulu dilakukan upacara resmi. Sampai di Hawaii, jenazah dibawa dengan pesawat DC-10 Garuda sampai ke Jakarta.

Peristiwa kematian dan pemakaman Sri Sultan HB IX yang merupakan masa perkabungan nasional di seluruh Indonesia menunjukkan betapa besarnya

aspirasi masyarakat Yogya dan Indonesia atas sang raja, Kasultanan, dan tentu saja DIY. Ratusan ribu rakyat melayat, menjadikan Yogya hening sejenak untuk memberikan penghormatan terakhir kepada raja mereka. Harian *Kedaulatan Rakyat* dari tanggal 4 sampai 15 Oktober 1988 memberikan berita-berita menarik seputar betapa besarnya aspirasi masyarakat itu.

- Tiga ratus wartawan dari dalam dan luar negeri meliput prosesi pemakaman Sri Sultan HB IX. Ada tim wartawan dari ibukota yang mencarter pesawat supaya rombongan mereka tiba tepat waktu di Yogya.
- Jalan dari Bandara Adisucipto sampai Kraton Yogya ditutup selama 4 jam (06.00-10.00 WIB) untuk memperlancar prosesi jenazah Sri Sultan HB IX.
- Ratusan ribu warga Yogya *tumplek-blek* untuk melihat dan memberi penghormatan terakhir kepada almarhum Sri Sultan HB IX.
- Seratus lima belas ribu kuntum bunga aggreg dipersembahkan untuk pemakaman Sri Sultan HB IX.
- Beberapa hotel berbintang di Yogya penuh dengan pelayat dari dalam dan luar negeri yang datang ke Yogya untuk melayat Sri Sultan HB IX.

- Dua hari Yogya tanpa kejahatan yang berarti. Kapolwil Yogya Kol. Drs. A. A. Soegiyo memberikan pernyataan resmi: "Tidak ada laporan kejahatan serius selama dua hari ini, hanya diterima laporan mengenai pencopetan di beberapa Polsek di Yogya."
- Rakyat Yogya memadati pinggiran jalan dari Yogya sampai tempat makam raja-raja di Imogiri, Bantul. Mereka berjubel, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang bersila, ada yang bersikap menyembah, semua memberi penghormatan yang sangat khidmad.
- Seorang tewas dan puluhan pingsan karena begitu berjubelnya kerumunan yang melihat dan mengantarkan jenazah Sri Sultan HB IX. Tujuh korban di antaranya masih harus dirawat di rumah sakit sampai beberapa hari kemudian.
- Warung-warung dan toko-toko ditutup sementara karena semua aktivitas berhenti dan semua mengalihkan perhatian pada pemakaman Sri Sultan HB IX. Beberapa stand Sekaten yang saat itu sedang digelar juga dibongkar.

## Bab 8.

### Memimpin dengan Visi Global

*Berkat kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX, Yogyakarta dan Indonesia diperhitungkan, diakui kedaulatannya, dan didukung oleh dunia internasional. Yogyakarta dan Indonesia pun berkibar dan berdampak secara global.*

Sebelum naik tahta menjadi Sultan Hamengku Buwono IX, Gusti Raden Mas Dorodjatun yang biasa dipanggil Henkie dipersiapkan oleh ayahandanya sedemikian sehingga berwawasan global. Dalam buku “Tahta untuk Rakyat” (1982) dikisahkan bagaimana sejak kecil sampai masa pemuda Henkie tumbuh dalam atmosfer global.

Semakin dewasa, Henkie hidup semakin menjauh dari kehidupan Kraton Yogya. Setamat dari *Neutrale Europese Lagere School* pada 1925, ia melanjutkan ke sekolah HBS di Semarang. Di kota ini Henkie *mondok* di rumah keluarga Voskuil, seorang Belanda yang bekerja sebagai kepala penjara Mlaten.

Karena udara panas di Semarang membuat Henkie tidak sehat badan, ayahnya memindahkan dirinya untuk studi di Bandung. Di kota kembang ini Henkie tinggal di keluarga De Boer. Atas pesan ayahnya, keluarga De Boer mendidiknya dalam kehidupan sederhana dan kedisiplinan yang tinggi.

Akhirnya Henkie melanjutkan kuliah ke Negeri Belanda. Pada 1930, Henkie masuk ke Rijksuniversiteit di kota Leiden, sebuah universitas tertua dan terkemuka. Ia masuk ke Fakultas Indologi yang merupakan gabungan ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Fakultas ini mempersiapkan orang-orang yang akan terjun ke bidang pemerintahan di Nederlands Indie.

Demikianlah perjalanan hidup Henkie dari kecil sampai dewasa. Dari usia 4 sampai 27 tahun mengenyam pola kehidupan Barat karena selalu tinggal di rumah keluarga-keluarga Belanda dan tinggal pula di Belanda. Selama 23 tahun itu ia tidak dekat dengan ayahnya, juga tidak karib dengan ibunya. Ia sangat mandiri.

Pengalaman berinteraksi dan belajar di Barat membuat Sultan HB IX berpikiran dan bervisi global. Ia pun membangun Yogyakarta dengan visi global. Pertama, memimpin perubahan budaya Yogyakarta agar relevan di tengah kemajuan. Kedua, melindungi rakyat Yogyakarta dari tekanan penjajah asing, Ketiga, membawa Yogyakarta dan Indonesia berani berkonfrontasi dengan penjajah asing yang hendak menguasai kembali. Keempat, membuktikan eksistensi politik Yogyakarta dan Indonesia di hadapan dunia internasional. Kelima, membawa Indonesia berprestasi internasional. Keenam, bertindak melebarkan sayap di negeri asing untuk memperkuat eksistensi Indonesia.

## **Memimpin Perubahan**

Pertama, Sultan HB IX memimpin perubahan budaya Yogyakarta agar relevan di tengah kemajuan. Mengenai hal ini telah dibahas dalam Bab 1. Intinya, Sultan HB IX membuka kran perubahan dan pembaruan budaya di lingkup kerajaannya supaya tidak terkungkung dalam kekolotan dan stangasi. Ia terbuka dengan budaya Barat dan bertekad untuk mengharmonisasi budaya Barat dengan budaya Timur (Jawa, Indonesia) tanpa kehilangan jati diri sebagaimana diungkapkannya dalam pidato saat penobatannya pada tahun 1940.

## **Melindungi Rakyat dari Penjajah Asing**

Kedua, Sultan HB IX melindungi rakyat Yogyakarta dari tekanan penjajah asing. Begitu Belanda pergi dari Indonesia, Jepang yang merangsek masuk sama saja motivasinya, yaitu ingin menjajah Indonesia. Bahkan penjajah Jepang terkenal keji menyiksa dan mempekerjaksakan rakyat Indonesia, bahkan memperlakukan perempuan-perempuan secara tidak manusiawi.

Sebagai Raja Yogyakarta yang berwawasan global, Sultan HB IX tak gentar menghadapi Jepang. Dalam buku “Tahta untuk Rakyat” (1982) dikisahkan bagaimana ia mencari akal untuk “menyembunyikan” angka-angka statistik yang sebenarnya tentang penduduk dan daerah Yogyakarta. Hal itu dilakukan

untuk mengelabui pihak Jepang agar penjajah itu tidak memeras, merampas, dan mempekerjapaksakan rakyat.

Sultan HB IX berhasil mengelabui pihak Jepang bahwa Yogyakarta adalah daerah minus. Kepada pihak Jepang diinformasikan bahwa (1) daerah Yogyakarta terlalu sempit, (2) dalam wilayah yang sempit itu tamah yang dapat ditanami hanya sedikit karena jika musim hujan tergenang air, sementara daerah lain tandus dan tidak subur untuk pertanian. Pihak Jepang pun percaya akan hal itu sehingga tidak melakukan pemerasan atas rakyat Yogyakarta.

Kemudian, Sultan HB IX malahan melakukan diplomasi agar diberi bantuan dana untuk membangun irigasi guna memajukan pertanian di Yogyakarta. Tidak diduga, ternyata diplomasi itu berhasil. Pihak Pemerintahan Pendudukan Jepang memberi bantuan dana untuk (1) membangun saluran dan pintu air untuk mengatur air hujan dari daerah yang tergenang ke laut, terutama di daerah Adikarto, (2) membangun saluran-saluran untuk mengalirkan air dari Kali Progo ke daerah-daerah kering yang kekuarangan air di kawasan Sleman ke arah timur.

Saluran dan pintu air itu akhirnya terbangun dan masih berfungsi sampai sekarang, dikenal sebagai "Selokan Mataram". Waktu itu dinamakan dalam

bahasa Jepang “*Gunsei Hasuiro*”. Proyek hasil diplomasi itu telah menyelamatkan ribuan warga Yogyakarta dari paksaan kerja romusha Jepang. Sultan HB IX tidak memberikan rakyatnya ikut romusha dengan alasan mereka sedang berkonsentrasi untuk membangun proyek irigasi tersebut.

### **Konfrontasi dengan Penjajah Asing**

Ketiga, Sultan HB IX membawa Yogyakarta dan Indonesia berani berkonfrontasi dengan penjajah asing yang hendak menguasai kembali setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Bagi Sultan HB IX, keberanian berkonfrontasi itu bukan hanya dilandasi oleh semangat nasionalisme, tetapi juga kepercayaan diri di hadapan bangsa-bangsa lain. Posisi tawar Sultan dan Kasultanan Yogyakarta selama masa penjajahan Belanda sangat besar. Posisi tawar juga sangat besar di hadapan Pemerintah Pendudukan Jepang.

Ketika keadaan menjadi sangat genting karena Belanda melancarkan agresinya, Sri Sultan HB IX memainkan peran sangat penting. Dalam serbuan Belanda sejak 19 Desember 1948 itu, Presiden RI dan Wakil Presiden RI ditangkap. Penduduk pun panik dan mengungsi ke Kraton Yogya. Dalam situasi perang, Sri Sultan HB IX memberi pesan khusus kepada Walikota Yogya Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, pertama, kalau kondisi benar-benar gawat maka Sultan akan

mengambil alih. Kedua, Walikota harus tetap di tempat, jangan pergi. Ketiga, Walikota harus berusaha supaya tidak ikut ditangkap Belanda.

Setelah Presiden RI dan wakilnya ditangkap, terjadi kevakuman kekuasaan di Yogya. Dalam kondisi demikian, Sidang Kabinet RI menunjuk Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat. Sementara itu, dalam kondisi kevakuman tersebut, Sri Sultan HB IX tidak ikut ditangkap oleh Belanda. Dengan demikian, Sri Sultan HB IX menjadi tumpuan harapan bagi eksistensi RI di mata dunia internasional.

Belanda tahu bahwa Sri Sultan HB IX merupakan benteng pertahanan bagi berdirinya RI. Karena itu, Belanda berusaha membujuk Sri Sultan HB IX. Bahkan, Belanda memberi *iming-iming* untuk menjadikannya sebagai "Super Wali Nagari" atas Jawa dan Madura dalam rangka negara federal yang sedang direncanakan oleh Belanda. Karena komitmen kepada RI sudah membaja, Sri Sultan HB IX bertekad untuk tidak pernah ingkar janji kepada RI. Apa pun janji setia yang telah diucapkannya tidak diingkarinya, *sabda pandhito ratu tan kena wola-wali*. Sri Sultan HB IX pun menolak semua bujukan itu. Semua utusan Belanda yang antara lain adalah Residen E.M. Stock, Dr.

Berkhuis, Kolonel Van Langen, Sultan Hamid II, dan Prof. Husein Djajadiningrat ditolaknya mentah-mentah.

Dalam bersikap anti kompromi itu, Sri Sultan HB IX pun bertaruh nyawa. Jenderal Spoor sudah mengancam untuk mendobrak pintu gerbang Kraton Yogya dengan tank. Dalam buku "Tahta untuk Rakyat" (1982), Mohammad Natsir memberi catatan tentang bagaimana Sri Sultan HB IX berjihad demi RI sebagai berikut. Pada waktu Jenderal Meyer datang ke Yogya dan ingin masuk Kraton untuk mencoba membujuk agar memihak kepada Belanda, dijawabnya dengan singkat: "*Over mijn lijk heen!*" Artinya, "Bila itu maksud tuan, maka tuan hanya bisa masuk Kraton ini dengan melangkahi mayat saya dulu!"

### **Membuktikan Eksistensi kepada Dunia**

Keempat, Sultan HB IX membuktikan eksistensi politik Yogyakarta dan Indonesia di hadapan dunia internasional. Wawasan dan pengalaman internasional membuat Sultan HB IX selalu memantau perkembangan di luar negeri. Serangan Umum 1 Maret 1949 dirancangnya karena ia memantau akan datangnya tim pencari fakta dari PBB. Serangan itu menjadi pembuktian eksistensi Yogyakarta dan Indonesia di mata dunia internasional.

Dalam buku "Tahta untuk Rakyat" (1982) suntingan Atmakusumah itu ditegaskan bahwa pengagas SO 1

Maret 1949 itu adalah Sultan HB IX. Beliauah *master mind* atau aktor intelektual di balik serangan itu. Buku itu menulis demikian: "Otaknya berputar keras mencari akal....la kemudian mendapat satu akal" (1982, hal 79). Pada waktu itu, HB IX mendengar berita dari radio luar negeri bahwa pada akhir Februari 1949 masalah antara Indonesia-Belanda akan dibicarakan di forum PBB. Karena itu tim pencari fakta (*fact finding*) dari PBB akan datang ke Yogya yang waktu itu Ibukota RI. Demi mendengar berita itu, HB IX mencari akal bagaimana caranya memberitahukan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih hidup. Kesan bahwa Belanda berkuasa di Indonesia harus dipatahkan. Ide yang diperoleh HB IX adalah melancarkan sebuah serangan umum terhadap Belanda.

Langkah cepat HB IX selanjutnya adalah mengontak Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk memberitahu siasatnya itu. Kontak itu dilakukan lewat seorang kurir karena Jenderal Sudirman sedang bergerilya. Panglima Besar setuju dan meminta supaya Sultan HB IX memberitahukan rencana serangan itu kepada Letnan Kolonel Soeharto.

Pada 13 Februari 1949, Sultan HB IX memanggil Letkol Soeharto untuk bertemu dengannya di Kraton Yogya. Dalam pertemuan itu, HB IX menanyakan apakah Letkol Soeharto sanggup melakukan serangan umum itu. Kepada penulis, Sultan HB IX menyatakan

bahwa dulu beliau menanyakan kesanggupan Letkol Soeharto itu sampai dua kali karena waktunya singkat. HB IX waktu itu juga mengatakan bahwa sasaran serangan adalah Hotel Toegoe dan beliau mewanti-wani supaya jangan ada peluru nysar di hotel tempat tim PBB menginap (sekarang Hotel Garuda). Jelaslah bahwa ide datang dari HB IX dan Letkol Soeharto adalah pelaksana ide itu. Mengenai Soeharto memimpin serangan itu adalah benar sebab Soeharto waktu itu adalah Komandan Gerilya. Serangan itu berlangsung selama 9 jam (06.00 – 15.00 WIB). Tetapi secara efektif Yogya berhasil diduduki oleh pasukan gerilya (TNI) selama 6 jam saja (peristiwa 6 jam di Jogja).

Jika dalam buku "30 Tahun Indonesia Merdeka" terbitan 1997 dicantumkan foto Letkol Soeharto (sendiri dan bersama kesatuannya), dalam buku "Tahta untuk Rakyat" dicantumkan foto relief yang ada di kompleks Kraton Yogya (hal 78). Relief yang terpajang di dekat Pagilaran Kraton itu menggambarkan pertemuan pada 13 Februari 1949 untuk membicarakan rencana SO 1 Maret 1949 antara HB IX dengan Letkol Soeharto yang menyelinap masuk Kraton dengan mengenakan pakaian *abdi dalem*. Dalam relief itu dilukiskan pula sebuah pesawat radio yang menunjukkan bahwa HB IX selalu mengikuti siaran radio dalam negeri dan luar negeri.

Namun dalam versi buku ini peran besar Soeharto juga dibebankan. Digambarkan ada kerjasama erat antara HB IX sebagai penggagas ide dengan Soeharto sebagai pemimpin lapangan yang mewujudkan gagasan serangan itu. Tanpa peran Soeharto maka SO itu tidak akan terjadi. Kepercayaan kepada Soeharto juga ditegaskan oleh Pangsar Jenderal Sudirman. Tetapi, aktor intelektual di balik SO itu adalah HB IX.

### **Mendorong Prestasi di Tingkat Internasional**

Kelima, Sultan HB IX mendorong dan membawa Yogyakarta dan Indonesia berprestasi internasional. Hal itu karena Sultan HB IX selain menjadi pejabat negara juga punya banyak kiprah dan karya internasional di antaranya: Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (1956), Ketua Sidang ke-4 ECAFE – Economic Commission for Asia and The Far East (1957), Ketua Federasi Asian Games (1958), Ketua Pertemuan Regional ke-11 Panitia Konsultatif Colombo Plan (1959), Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1968) dan mendapat penghargaan *Bronze Wolf Award* dari kepanduan dunia dan *award* kepanduan dari Amerika Serikat, Ketua Umum KONI – Komite Olahraga Nasional Indonesia (1968), Ketua Dewan Peniagaan dan Perusahaan (1968). Kecuali itu, ia juga banyak bertugas ke luar negeri di antaranya: Ketua Delegasi Misi Muhibah Indonesia ke Birma (1952), Ketua Delegasi Indonesia ke Konferensi PATA – Pacific Area Travel Association di

California Amerika Serikat (1958), menghadiri Konferensi Komite Olimpiade Internasional di Roma Italia (1959), sebagai Ketua Dewan Pariwisata Indonesia menghadiri pertemuan persiapan partisipasi Indonesia dalam World Fair New York, dilanjutkan ke Jepang (1962), Ketua delegasi dalam pertemuan Badan PBB tentang Perjalanan dan Pariwisata (1963).

Wawasan internasional dan pengalaman kiprah global itu memotivasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk juga bergerak dan berdampak di dunia internasional. Banyak tokoh dari Yogyakarta yang mengikuti jejak kiprah dan karya global Sang Sultan. Yogyakarta dengan Kraton, candi, dan berbagai destinasi wisata pun menjadi semakin dikenal secara internasional.

### **Melebarkan Sayap di Mancanegara**

Keenam, Sultan HB IX bertindak melebarkan sayap di negeri asing untuk memperkuat eksistensi Indonesia. Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Prof. Hj, Suwarsih Madya, Ph.D. memberikan informasi kepada tim penulis tentang testimoni dari salah seorang putra Sultan HB IX, yaitu GBPH H Prabukusumo. Testimoni itu berkaitan dengan peran Sultan HB IX dalam melebarkan sayap eksistensi Indonesia di kancah dunia.

Menurut GBPH H Prabukusumo, gedung Kantor Kedutaan Besar RI di Washington DC Amerika Serikat adalah hibah dari Sultan HB IX. Sejarahnya adalah sebagai berikut. Pada 1949 Sultan HB IX (saat itu menjabat Menteri Pertahanan) mengirim utusan ke PBB yaitu Mr. Ali Sastroamidjojo (yang di kemudian hari menjadi Dubes RI pertama di AS) dan Mr Datuk Djamin (yang di kemudian hari menjadi Gubernur Jawa Barat). Tujuannya adalah mendaftarkan Republik Indonesia ke PBB agar secara internasional diakui sebagai negara merdeka.

Setelah bertandang ke PBB, kedua utusan itu pulang dan melapor kepada Sultan HB IX. Mereka menginformasikan bahwa untuk dapat mendaftarkan RI di PBB maka RI harus mempunyai Perwakilan Pemerintah RI di Washington DC. Kemudian, pada tahun berikutnya keduanya kembali diutus ke Amerika Serikat untuk membeli gedung yang sekarang menjadi Kantor Kedubes RI di Washington DC. Menurut GBPH H Prabukusumo, gedung itu adalah hibang dari Sultan HB IX untuk dijadikan kantor Kedubes RI tersebut. GBPH H Prabukusumo mendapat konfirmasi tentang hal ini dari seorang bernama Muntas yang adalah putera dari Mr Datuk Djamin dan kesaksian dari salah seorang pegawai di KBRI itu yang berasal dari Yogyakarta,

Sedangkan menurut *Wikipedia.com*, gedung itu dikenal dengan nama “Walsh-McLeanHouse yang

berlantai 4 dan memiliki 60 ruangan. Pada 19 Desember 1951, Ali Sastroamidjojo membeli gedung itu atas nama Pemerintah Indonesia dengan harga US \$ 335.000 untuk dijadikan sebagai kantor perwakilan Indonesia.

Mengenai sumbangan dana untuk Indonesia, Sultan HB IX tidak pernah mempublikasikan. Kepada Pemerintah RI Sultan HB IX juga menyumbang dana sebesar 6 juta Gulden. Belum lagi fasilitas dan dukungan finansial yang diberikan selama Yogyakarta menjadi Ibukota RI, tidak digembar-gemborkan.

Namun dari *untold story* sejarah kantor perwakilan RI di Washington DC itu disimpulkan bahwa Sultan HB IX punya kiprah dan karya global untuk memajukan Indonesia. Kepemimpinan global itulah yang juga menyemangati Daerah Istimewa Yogyakarta untuk juga mendunia.



# BAGIAN I

## Kepemimpinan Sultan HB X

### Bab 9.

#### Meneguhkan Tahta untuk Rakyat

*Sultan Hamengku Buwono X melanjutkan visi dan misi “Tahta untuk Rakyat” dari ayahandanya, Sultan Hamengku Buwono IX.*

Saat dinobatkan menjadi raja pada 7 Maret 1989, Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan pidato *jumenengan* “Tahta bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat”. Dalam pidato itu beliau menyampaikan lima tekad kepemimpinannya yaitu.

1. Tekad untuk tidak mempunyai prasangka, rasa iri dan dengki serta untuk tetap *hangrengkuh* siapa pun, baik terhadap mereka yang senang, maupun yang tidak senang, atau bahkan juga terhadap yang menaruh rasa benci sekalipun.
2. Tekad untuk lebih banyak memberi daripada menerima.
3. Tekad untuk tidak melanggar *paugeran* negara.
4. Tekad untuk lebih berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah memang benar-benar salah.

5. Tekad untuk tidak memiliki ambisi apapun, selain senantiasa berusaha hanya bagi kesejahteraan rakyat.

### **Pesan Sang Ayah**

Dalam buku “Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat” (1999) dan buku “Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik” (2011) dijelaskan bagaimana Sultan HB IX memberikan pesan-pesan kepada putranya itu (Pangeran Mangkubumi) sebelum naik tahta menjadi Sultan HB X. Pesan-pesan itulah yang kemudian diformulasikan menjadi lima tekad kepemimpinan Sultan HB X tersebut.

Pesan kepada Pangeran Mangkubumi itu disampaikan pada 1987. Pada bulan Februari tahun itu, HB IX memanggil sang pangeran untuk membicarakan masalah suksesi. Pada April 1987, pembicaraan tentang suksesi di antara keduanya semakin serius. Sultan HB IX menegaskan bahwa Pangeran Mangkubumi adalah penerusnya yang harus memimpin dengan standar kepemimpinan yang ditetapkan HB IX tersebut.

Kemudian ketika HB IX menyatakan rencana teknisnya dengan jelas untuk memberikan tongkat estafet kepada Pangeran Mangkubumi, ia memberikan lima syarat yang harus dilakukan sang pangeran terpilih untuk menjadi sultan (Nusantara, 1999). Pertama, seorang sultan harus berjanji tidak boleh berprasangka

dan iri kepada orang lain biar pun orang itu tidak senang kepadanya. Kedua, seorang sultan harus berjanji untuk tidak melanggar peraturan negara. Ketiga, seorang sultan harus berjanji menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Keempat, seorang sultan harus berjanji untuk tidak mempunyai ambisi, kecuali ambisi untuk mensejahterakan rakyat. Kelima, seorang sultan harus berjanji untuk lebih banyak memberi daripada menerima.

Kelima pesan HB IX itu kemudian dijadikan “Lima Tekad Dasar” kepemimpinan Sultan HB X. Kelima tekad itu dikumandangkan sebagai janji peneguhan tekad dalam pidato *jumenengan* Sultan HB X pada 7 Maret 1989. Pidato *jumenengan* saat itu diberi judul “Tahta bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat”. Lebih lanjut, kelima tekad itu dijadikan sebagai “Garis-Garis Besar Strategi Kebudayaan Kraton”.

Kepada media, Sultan HB IX telah berpesan bahwa sultan yang bertahta tidak otomatis menjadi Gubernur DIY, semua terserah pada pemerintah dan rakyat. Berikut adalah keterkaitan pesan tentang DIY itu dengan kelima tekad yang harus dijalankan oleh Sultan HB X.

### **Pesan 1. Tidak Berprasangka dan Iri Hati**

HB IX menekankan bahwa masa depan DIY itu terserah pada pemerintah pusat dan rakyat. Adapun tekad pertama yang ditegaskan HB IX untuk dilaksanakan HB

X adalah jangan berprasangka buruk dan iri hati. Hal itu penting sebab bisa saja dalam praktiknya, pemerintah pusat terlihat tidak senang dengan adanya DIY. Atau, seperti terbukti sekarang, pemerintah pusat lebih memperhatikan daerah-daerah istimewa atau daerah-daerah khusus lainnya seperti Aceh dan Papua ketimbang mengurus DIY. Untuk itu HB X tidak boleh berburuk sangka dan terjebak dalam perasaan iri.

Pada saat dikukuhkan menjadi Gubernur DIY pada 26 Agustus 1998 oleh rakyat Yogyakarta, Sultan HB X menegaskan tekad pertamanya itu. Setelah pengukuhan itu, dalam pidatonya tanpa teks seperti dicatat editor Nusantara (1999), HB X mengatakan sebagai berikut. "... Dan saya paham, tahu dan saya mengerti sedalam-dalamnya apa yang terjadi di dalam gedung DPRD ini. Tapi siapa pun juga, apalagi para pemimpin, ada sebagian rakyat yang tidak senang dengan saya, dan saya ikhlas. Ada sebagian orang yang dendam sama saya, saya pun ikhlas menerimanya.... Ada sebagian dari anggota DPRD kita, yang mengaku wakil rakyat, mengkhianati aspirasi saudara-saudara. Untuk itu sekali lagi saya berharap, kita jangan menaruh dendam...."

Jika mengaitkan dengan pesan HB IX tentang masa depan DIY, tekad itu semestinya juga membuat HB X untuk tetap baik hati sekali pun mungkin DIY dihapuskan sama sekali. Pengampunan seperti itulah yang dipesankan HB IX.

## **Pesan 2. Hormati Peraturan Negara**

Pesan HB IX tentang masa depan DIY berkaitan dengan tekad yang diwajibkan oleh HB IX untuk dilakukan penerusnya. HB IX menegaskan bahwa apakah sultan mendatang merangkap sebagai Gubernur DIY atau tidak itu adalah tergantung pada pemerintah. Sebab, status dan peran gubernur di Indonesia berada di dalam sistem pemerintahan yang diatur dengan perundang-undangan.

HB IX konsisten dengan integrasi yang dulu dilakukan. Setelah Nagari Yogyakarta bergabung dengan RI maka sistem di daerah ini juga tunduk kepada pemerintahan dan peraturan negara yang ada. Dengan demikian tidak mungkin ada tindakan makar atau gerakan memisahkan diri dari NKRI. Berbeda dengan daerah lain seperti Aceh dan Papua yang menuntut keistimewaan atau kekhususan dengan mengancam hendak memisahkan diri dari NKRI.

Hal itu juga berarti bahwa keberadaan, status dan peran sultan Yogya dalam konteks DIY harus diatur dengan undang-undang. Entah sultan yang bertahta otomatis menjadi gubernur atau tidak, yang jelas harus ada sistem perundangan yang mengaturnya dengan jelas. Sebab, peraturan yang ada tentang hal itu, khususnya UU No 3 Tahun 1950 masih belum memberikan kejelasan dan kepastian yang tegas.

Tekad untuk tunduk kepada hukum itu merupakan bukti bahwa Sultan HB IX adalah seorang demokrat. Raja dalam sistem monarki adalah pembuat hukum, penentu hukum dan penegak hukum itu sendiri. Sedangkan dalam sistem demokrasi jelas dibedakan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau sultan bertahta di Yogya menjadi gubernur maka harus tunduk kepada *paugeran* negara. Ia bukan raja yang memerintah dalam sebuah kerajaan yang bisa menjadi otoritarian.

### **Pesan 3. Menegakkan Kebenaran**

Yang perlu dicermati lebih lanjut adalah keterkaitan antara pesan HB IX tentang masa depan DIY dengan tekad ketiga yang ditekankan HB IX untuk dilakukan putranya. Pesan tentang masa depan DIY adalah tentang jabatan sultan sebagai gubernur. Sedangkan tekad ketiga adalah tekad untuk menegakkan kebenaran, menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Artinya, ketika masalah kelanjutan DIY diserahkan kepada pemerintah dan rakyat, bukan berarti kebenaran tidak ditegakkan. Baik pemerintah maupun rakyat bisa salah. Rupanya, pesan untuk menegakkan kebenaran, untuk menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah sungguh-sungguh diamalkan oleh Sultan HB X. Selama Orde Baru, Sultan HB IX tidak pernah secara terang-terangan menyatakan

soal “ini yang benar dan itu yang salah” sehubungan dengan DIY. Tetapi, setelah Reformasi 1998, Sultan HB X dengan lantang berbicara soal kebenaran DIY. Saat dikukuhkan oleh masyarakat Yogyakarta sebagai Gubernur DIY pada 26 Agustus 1998, Sultan HB X membeberkan kesalahan yang dilakukan oleh rezim yang baru saja runtuh. Rezim Soeharto jelas akan melenyapkan DIY dan HB X menunjukkan kebenaran tentang DIY yang harus ditegakkan. Hal itu dilontarkannya dengan lantang dalam pidatonya tanpa teks seperti dicatat editor Nusantara (1999) yang cuplikannya sebagai berikut: “Tapi jangan sekedar mengatakan DIY tak akan diubah dengan melaksanakan UU No 5 Tahun 1974. Itu jelas bohong. Sebab dengan menggunakan UU No 5 Tahun 1974 berarti DIY ini telah berubah. Ada lebih dari satu calon di DIY, selain diri saya, jelas itu akan mengubah DIY. Kita tidak usah berargumentasi ini demokratis, tapi itu fakta. Dalam UU No 5 Tahun 1974 kalau calonnya lebih dari satu itu jelas mengubah UU No 3 Tahun 1950. Itu sudah pasti. Dan itu harapannya. Makanya, saya katakan itu semua terserah pada rakyat Yogyakarta. Tetapi ternyata rakyat Yogya tidak ikhlas.”

Kita tidak tahu apakah Sultan HB IX meminta putranya itu menyampaikan tentang kebenaran tersebut. Yang jelas HB IX selama hidup dan sampai meninggalnya tidak pernah menuduh pemerintah pusat telah menzolimi dirinya dan DIY. Kalau kemudian

Sultan HB X membongkar ketidakberesan itu sepertinya terdorong oleh energi Reformasi 1998 yang sedang berkobar pada waktu itu.

#### **Pesan 4. Tidak Ambisius**

Pesan HB IX tentang masa depan DIY jelas terkait dengan pesan tentang tekad keempat yang harus diamalkan oleh putranya, yaitu tekad untuk tidak mempunyai ambisi apa pun kecuali ambisi untuk mensejahterakan rakyat. Kalau konsisten dengan kedua pesan itu maka Sultan HB X semestinya juga tidak berambisi untuk tetap menjadi gubernur dan mempertahankan substansi keistimewaan Yogya dalam hal mana sultan yang bertahta otomatis menjadi Gubernur DIY. Semua ambisi harus ditanggalkan. Semua tergantung pada kehendak rakyat.

Dalam praktiknya, HB X cukup melaksanakan amanat itu. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan bersedia lagi menjadi Gubernur DIY. Tuturnya, "Dengan tulus ikhlas, saya menyatakan tidak bersedia lagi menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi DIY setelah pada purna masa jabatan 2003-2008 nanti" (Harian *KR*, 8 April 2007).

Pernyataan sikap itu disampaikannya dalam sebuah momen yang cukup penting. *Statement* bersejarah itu diutarakannya saat berorasi dalam acara "Malam Bhakti Ibu Pertiwi" yang diadakan di Pagelaran Kraton. Pada perhelatan yang dihadiri banyak tokoh

masyarakat dan tokoh kebudayaan ini, Sri Sultan menerima penghargaan "Saya Bangga menjadi Orang Indonesia" dari Anand Krishna. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Sri Sultan bersikap sangat serius dengan *statement*-nya itu.

Pernyataan sikap HB X di atas mengingatkan kita pada penegasan beliau untuk menolak jabatan gubernur seumur hidup. Harian KR tanggal 6 September 1998 menorehkan sebuah judul berita "Sultan Tolak Gubernur Seumur Hidup: DPRD DIY Tak Perlu Lagi Konsultasi ke Jakarta". Artinya, selang 9 tahun setelah penegasan itu, HB X tetap konsisten. Penegasannya pada waktu itu diberikan berkaitan dengan akan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres). Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie saat itu, akan dibuat sebuah Keppres yang salah satu bagiannya memuat materi tentang penegasan bahwa Sultan HB X tidak ingin menjadi gubernur seumur hidup.

Ketika belakangan diketahui bahwa pernyataan sikap HB X yang kontroversial itu adalah dalam rangka menyentil pemerintah pusat agar memperhatikan status dan kejelasan hukum DIY, pernyataan itu menunjukkan bahwa sekalipun HB X tidak berambisi untuk kekuasaan namun DIY harus ditegakkan. Ketiadaan ambisi HB X tidak berarti membiarkan ketidakjelasan nasib DIY. Artinya, harus dibedakan antara HB X dengan DIY. Kalaupun dengan

ditegakkannya DIY maka HB X menjadi Gubernur DIY, itu bukan masalah ambisi tetapi konsekuensi dari keistimewaan Yogya.

### **Pesan 5. Lebih Banyak Memberi**

Pesan HB IX tentang masa depan DIY jelas bukanlah sebuah tuntutan. HB IX tidak menuntut kepada pemerintah dan rakyat. HB IX seperti menundukkan diri pada pemerintah dan rakyat dengan mengatakan bahwa semua – masalah substansi keistimewaan DIY di mana sultan bertahta otomatis menjadi gubernur – terserah pada pemerintah dan rakyat. Hal itu sejalan dengan pesan HB IX kepada putranya supaya tidak banyak menuntut tetapi lebih banyak memberi.

Sejarah mencatat dengan jelas bagaimana Kraton Yogya memberi untuk negara, bangsa, dan rakyat. Setelah Pangeran Mangkubumi bertahta sebagai raja (Sultan HB X), tekad untuk lebih banyak memberi itu benar-benar dipraktikkannya.

Dalam pidato *jumenengan* pada tanggal 7 Maret 1989 yang berjudul “Tahta bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat”, HB X menyatakan untuk senantiasa *hangrengkuh* siapa pun, merangkul semua pihak. Untuk itu HB X bertekad untuk lebih banyak memberi daripada menerima. Sejauh ini, HB X telah menunjukkan konsistensinya, misalnya dalam memberi perhatian kepada berbagai kelompok agama.

## Bab 10.

### Memimpin Perubahan: Gerakan Nasional Reformasi

*Sultan Hamengku Buwono X adalah pemimpin yang berani melawan arus dan menggulirkan pembaruan lokal dan nasional.*

Sosiolog Dr. Selo Soemardjan, sebagaimana disitir dalam buku “Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat” (1999), mengatakan bahwa Sri Sultan HB X adalah sosok pemimpin yang berani melawan tradisi kepemimpinan Orde Baru yang banyak menyimpang. Pada waktu Soeharto masih berkuasa, Sri Sultan HB X menyatakan diri mendukung Gerakan Nasional Reformasi. Ketika Soeharto berkeinginan menjadi penguasa kekal, Sri Sultan HB X menolak gagasan tentang pemimpin seumur hidup.

Pada masa Reformasi 1998, Sri Sultan HB X tampil menjadi salah seorang tokoh reformator. Buku “Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat” (1999) memberikan laporan dinamika yang terjadi saat itu. Menjelang runtuhnya rezim Orde Baru, seluruh rakyat bergolak. Tanggal 15 Mei 1998, gelombang aksi mahasiswa di Yogya bergelora dan mulai cenderung anarkis. Mereka merusak *show room* mobil Timor dan gedung Bank Tamara. Di tengah massa yang beringas itu, Sri Sultan HB X muncul mengendalikan situasi. Rakyat pun menjadi tenteram.

Pada tanggal 20 Mei 1998, ratusan ribu rakyat Yogya berkumpul di alun-alun kraton. Dalam kegiatan spontan yang dikenal sebagai *pisowanan ageng* itu, Sri Sultan HB X memberi orasi yang mendukung gerakan reformasi. Kantor berita Inggris, *Reuters*, menyatakan bahwa Sri Sultan HB X ternyata masih disegani rakyat dan mempunyai peran strategis yang berdampak luas.

Mengenai gaya kepemimpinan Soeharto, Sri Sultan HB X berani memberi kritikan yang sangat tajam. Sultan HB X menyinggung gaya kepemimpinan Soeharto yang cenderung membenarkan dirinya sendiri. Menurutnya, Soeharto memakai konsep *mikul dhuwur mendhem jero* untuk membenarkan sikap memaafkan pemimpin yang korup dan mendiamkan saja pemimpin yang bersalah. Semua keburukan pemimpin harus dipendam dan tidak boleh diungkit-ungkit. Soeharto telah membuat rakyat mendukung dirinya tanpa bersikap kritis.

Menjelang reformasi, Sri Sultan HB X memberi orasi berisi kritikan tajam terhadap rezim Orde Baru. Sebagaimana ditulis dalam buku “Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat” (1999), orasi Sri Sultan HB X mengkritik penyimpangan kepemimpinan saat itu,

“...Orde Baru yang menyalahgunakan konsep kearifan Jawa tentang “*ora ilok*” (tidak layak), “*mbeguguk mangutho waton*” (keras kepala), “*mbalelo*” (memberontak), “*aja dumeh*” (jangan

merasa sok), “*unggah-ungguh*” (sopan santun), “*tepo-sliro*” (tenggang rasa), dan “*ewuh pakewuh*” (rasa segan). Inilah kritik peradaban yang dilontarkan Sultan HB X dalam orasi Reformasi 1998 silam: “*Ora ilok* diartikan tidak boleh mengkritik penguasa. *Mbeguguk mangutho waton* dan *mbalelo* hanya disandangkan bagi rakyat yang menuntut haknya sehingga pantas digebug dan dilibas, bukan bagi penguasa yang sudah tidak bisa lagi menangkap aspirasi rakyat, karena terlalu asyik dengan permainan kekuasaan saja. *Aja dumeh* malah dialamatkan bagi rakyat yang tergusur, bukan bagi mereka yang menggusur dan makmur di atas beban pundak rakyat banyak. *Unggah-ungguh, tepo sliro*, dan *ewuh pakewuh* hanya boleh dikenal oleh rakyat, bukan pejabat yang korup, main kolusi, dan sebagainya. Inilah saudara-saudaraku, yang dinamakan krisis moral, yang berlanjut pada krisis kepercayaan rakyat kepada penguasa!”

Melalui kepemimpinan Sri Sultan HB X yang didukung oleh Sri Paku Alam IX, Yogya tampil sebagai salah satu motor penggerak roda reformasi Indonesia. Di bawah kepemimpinan mereka berdua, DIY memainkan peran istimewa.

Dalam buku “Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat” (1999) dicatat bagaimana Sri Sultan HB X menjadi tokoh sentral di Yogya semasa momentum reformasi. Ketika terjadi insiden pengrusakan pada tanggal 15 Mei 1988, Sri

Sultan HB X berbicara kepada massa: "Tolong saya pesan, sebagai warga Yogya saudara-saudara saya minta menjaga agar tidak merusak apa yang sudah dibangun. Saya minta saudara-saudara menjaga agar jangan sampai ada orang luar yang akan membuat kerusuhan di Yogyakarta. Apakah saudara-saudara sanggup?" Massa pun menjawab: "Sangguuuuup!" sambil mereka bertepuk tangan dengan gemuruhnya lalu menggelorakan teriakan-teriakan: "Hidup Sultan...hidup Sultan...hidup Sultan!"

Sejak itulah massa Yogya mengekspresikan respek dan aspirasi mereka terhadap kepemimpinan Sri Sultan HB IX secara masif. Apalagi Sri Sultan HB X kemudian menunjukkan sikap pro-reformasi dan dukungannya kepada rakyat yang sudah tidak tahan lagi untuk menggulirkan gerakan reformasi tersebut.

Sebagai puncaknya adalah aspirasi rakyat terhadap kepemimpinan Sri Sultan HB X dalam aksi massa Yogya yang dikenal sebagai *Pisowanan Ageng*. Gelombang aksi massa yang dimotori oleh para mahasiswa itu dilakukan sebagai puncak tuntutan untuk reformasi. Sejuta orang Yogya menyemut dan bergerak menuju Alun-alun Utara Kraton Yogya. Mereka bermaksud untuk mendengarkan Maklumat 20 Mei 1998 dari Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam VIII. Maklumat itu mendapatkan sambutan dan dukungan penuh dari segenap rakyat Yogya, menandakan aspirasi penuh mereka terhadap kepemimpinan Sri Sultan HB X bersama Sri PA VIII di DIY dan di Indonesia.

## Maklumat

### Sri Sultan Hamengku Buwono X dan dan KGPAА Paku Alam VIII

Kami, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAА Paku Alam VIII, atas dasar tradisi kejuangan yang dijiwai oleh azas kerakyatan yang murni serta dengan berpegangan pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAА Paku Alam tanggal 5 September 1945, menyatakan bahwa:

1. Kami mengajak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia, untuk bersama kami mendukung Gerakan Reformasi dan memperkuat kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh memihak rakyat.
2. Kami mengajak seluruh ABRI dalam persatuan yang kuat untuk melindungi rakyat dan Gerakan Reformasi sebagai wujud kemanunggalan ABRI dan rakyat.
3. Kami mengajak semua lapisan dan golongan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Indonesia untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan mencegah setiap tindakan anarkis yang melanggar moral Pancasila.

4. Kami menghimbau masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Indonesia untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk keselamatan Negara dan Bangsa.

Yogyakarta, Rabu Kliwon. 20 Mei 1998 (23 Sura 1931)

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Kadipaten Pakualaman Sultan HB X

KGPAA Paku Alam VIII

### **Visi Ilahi Perubahan**

Melawan arus dan melakukan perubahan bukan hal mudah. Resiko dan resistensi senantiasa menghadang. Dalam hal inilah para Sultan di Yogyakarta tidak asal melakukan perubahan, tidak *gambling* dalam mengambil keputusan yang berbeda. Sebagai seorang raja, Sultan mengembangkan kapasitas intelektual-spiritual untuk menangkap wahyu sebelum memutuskan melakukan hal-hal baru.

Bada uraian tentang kepemimpinan Sultan HB IX, telah dibahas bagaimana beliau memutuskan untuk menandatangani kontrak politik pada tahun 1940 itu berdasarkan petunjuk ilahi. Setelah berpikir lama akhirnya ia mendapatkan wangsit untuk segera menandatangani kontrak politik itu karena Belanda akan segera meninggalkan Indonesia. Keputusan intuitif itu ternyata tepat dan terjadilah perubahan radikal yang membawa pembaruan-pembaruan,

Kepemimpinan para sultan di *Ngayogyakarta Hadiningrat* tidak pernah lepas dari spiritualitas. Sri Sultan sendiri mempunyai gelar lengkap *Sampeyan Dalem Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati ing Ngalaga Ngabdul Rahman Sayidin Panata Gama Kalifatullah*. Artinya, disamping menjadi pemimpin secara politik dan kebudayaan, Sri Sultan adalah seorang pemimpin spiritual. Dengan kapasitas ini, keputusan-keputusan raja sedikit banyak memiliki kadar spiritual.

Sultan Hamengku Buwono I dikenal dengan kepahlawanannya. Semasa kepemimpinan Paku Buwono II (1727-1749), Belanda melumpuhkan kedaulatan Mataram. Dengan Perjanjian Ponorogo (1743), Belanda merebut daerah-daerah pelayaran dan perdagangan Mataram. Sejak 11 Desember 1749, Mataram menyerahkan kedaulatannya ke tangan Belanda. Namun, Pangeran Mangkubumi berontak dan berjuang melawan penjajah. Sampai tahun 1752, sebagian besar Mataram kembali direbut dari Belanda. Akhirnya, P. Mangkubumi memperoleh sebagian wilayah Mataram melalui Perjanjian Giyanti (1755). Sejak itu, ia mendirikan Kasultanan Yogya dan menjadi Sri Sultan HB I (1755-1792). Sultan HB I juga dikenal sebagai raja dengan multi kapasitas. Ia menguasai ilmu pemerintahan, ilmu kemiliteran, filsafat, seni, dan juga arsitektur. Sultan pertama Yogya ini adalah arsitek dari bangunan kraton yang tetap berdiri kokoh hingga

sekarang. Dalam hal olah kerohanian, HB I sering melakukan *tapa brata*. Ketika bersamadi di desa Beton, beliau mendapat wahyu illahi untuk menjadi pemimpin yang memberi pengayoman kepada rakyat. Kepemimpinan HB I dimulai dan didasarkan pada visi spiritual yang kuat.

Sultan Hamengku Buwono X yang naik tahta pada 1989 juga seorang pemimpin dengan visi spiritual. Dalam buku "Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat" (1999) diceritakan bahwa HB X melakukan tindakan spiritual menjelang akhir masa Orde Baru. HB X mengatakan, "Jika pemimpin tak benar, kewajiban saya adalah untuk mengingatkan. Karena memang kabangetan (keterlaluan), *ya tak pasani sesasi tenan* (ya saya puasai sebulan penuh)." Tepat sebulan setelah masa puasanya berakhir (19 April – 19 Mei 1998) dan setelah munculnya maklumat bersama HB X dan Paku Alam VIII, Soeharto tumbang.

Mengenai runtuhnya rezim Orde Baru itu, HB X juga mendapat petunjuk illahi. Setelah berpuasa sebulan, ia mendapat wahyu: "*yen wis ana laron ewon-ewon ngrubung omah tawon kembar, bakal ana penggede ditinggal nagane*". Artinya, kalau sudah ada gerakan massa rakyat (*laron ewon-ewon*) di alun-alun kraton Yogya yang memiliki dua pohon beringin (*omah tawon kembar*), maka akan ada pemimpin besar lengser (*ana penggede ditinggal nagane*). Kenyataannya memang

demikian, setelah *pisowanan ageng* di Yogya, Soeharto pun turun tahta.

Demikianlah Sultan HB IX adalah sang pemimpin perubahan yang arif dan bijaksana. Keputusan yang melawan arus dan *out of the box* bukan hanya dipikirkannya dengan masak, dikonsultasikan dengan para pakar, tetapi juga dibawanya ke dalam pergulatan spiritual hingga mendapatkan petunjuk dari Sang Khalik.



## **Bab 11.**

### **Memihak Rakyat**

*Sejak Reformasi 1998 bergulir hingga satu dasawarsa implemetasi UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Sultan Hamengku Buwono X mau menjabat*

*sebagai Gubernur DIY karena memenuhi permintaan rakyat.*

Dalam masa-masa penggodokan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY, Sultan HB X sempat menyatakan tidak mau menjadi Gubernur DIY seumur hidup. Namun pernyataan yang kala itu menjadi teka-teki yang sulit dimengerti ternyata punya dua maksud. Pertama, menjadi sindiran bagi pemerintah pusat yang tidak tanggap dan lamban mengesahkan RUUK. Kedua, memberi ruang bagi rakyat untuk memikirkan Keistimewaan DIY.

Dan ternyata, dari sejak Reformasi 1998 bergulir hingga masa penggodokan RUUK DIY itu, rakyat berulang kali mengukuhkan Sultan HB IX sebagai Gubernur DIY. Rakyat konsisten beraspirasi bahwa Keistimewaan DIY terletak dari Sultan yang bertahta sebagai Gubernur DIY. Demikian juga dengan para wakil rakyat di DPRD DIY, mendukung penuh Sultan HB X sebagai Gubernur DIY.

Dengan demikian, Sultan HB X mau melanjutkan kepemimpinannya hingga sekarang itu karena beliau memihak pada kepentingan dan aspirasi rakyat. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Sultan HB X telah menyatakan tekadnya “untuk tidak memiliki ambisi apapun, selain senantiasa berusaha hanya bagi kesejahteraan rakyat” (pidato Jumenengan Sultan HB X pada 7 Maret 1989).

### **Penetapan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY**

Kalau Sri Sultan HB X kembali ditetapkan sebagai Gubernur DIY setelah masa jabatannya berakhir tahun 2008, berarti sudah tiga kali peristiwa itu terjadi. Semuanya didahului oleh aksi massa rakyat secara besar-besaran. Pertama, terjadi pada tahun 1998. Waktu itu, sebelum akhirnya penetapan dilakukan, paling tidak rakyat menggelar dua kali aksi massa. Pada tanggal 11 Agustus 1998, para pedagang pasar menggelar aksi *Pisowanan Kawulo Mataram*. Kemudian, pada tanggal 26 Agustus 1998, ribuan rakyat dari semua kabupaten di DIY bergerak menuju kota dan membacakan deklarasi untuk mengukuhkan Sri Sultan HB X menjadi Gubernur DIY. Kedua, penetapan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur Kepala Daerah DIY kembali terjadi pada tahun 2003, juga diakselerasi oleh aksi-aksi massa rakyat yang serupa. Semua itu menunjukkan bagaimana besarnya aspirasi masyarakat Yogya terhadap DIY yang dicirikan oleh kepemimpinan Sri Sultan dan Sri Paku Alam sebagai

kepala daerah yang tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan seperti pada daerah-daerah lain.

Setelah reformasi bergulir, aspirasi rakyat untuk penetapan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY sangat kuat. Dalam buku “Meneguhkan Tahta untuk Rakyat“ digambarkan cukup detil bagaimana besarnya aspirasi rakyat itu. Waktu itu, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DIY melakukan jejak pendapat dari 2.458 responden. Seperti dimuat di harian *Bernas* (8 Agustus 1998), hasil jejak pendapat itu adalah 97,32% responden memilih Sri Sultan HB X sebagai calon Gubernur DIY, 44,02% responden menginginkan Sri Sultan HB X menjadi Gubernur seumur hidup, 55,94% responden menginginkan Sri Sultan HB X sebagai calon tunggal, dan 96,14% responden menghendaki agar status DIY dipertahankan.

Surat kabar *Bernas* sendiri pada waktu itu juga mengadakan jejak pendapat. Dari 398 telepon yang masuk ke redaksi, 94% menyatakan mendukung penuh Sri Sultan HB X sebagai gubernur dan menyatakan bahwa status DIY harus tetap dipertahankan.

Seperti disebut di atas, tanggal 26 Agustus 1998, ratusan ribu rakyat mengukuhkan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY. Sebelum pengukuhan, seperti ditulis dalam buku “Meneguhkan Tahta untuk Rakyat”, seorang tukang becak bernama Kuat Budisantoso

membacakan Maklumat Rakyat yang berisi empat hal. Pertama, rakyat Yogya mempertahankan UU No. 3 tahun 1950 sebagai dasar hukum keberadaan DIY. Kedua, mengangkat dan mengukuhkan Sri Sultan HB X sebagai Kepala Daerah DIY. Ketiga, menolak diberlakukannya UU No. 5 tahun 1974 di DIY karena itu merupakan produk Orde Baru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar aspirasi rakyat DIY. Keempat, apabila ketiga tuntutan itu tidak dipenuhi maka rakyat DIY menuntut pemerintah untuk melakukan referendum tentang keistimewaan seperti yang termaktub dalam UU No. 3 tahun 1950 dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

### **Penetapan Sri Paku Alam IX sebagai Wagub DIY**

Kecintaan rakyat pada Kadipaten Pakualaman terbukti ketika mereka menginginkan Sri Paku Alam IX untuk menjadi Wakil Gubernur DIY. Pada bulan Oktober 2001, sejumlah besar rakyat berkumpul di halaman gedung DPRD DIY. Dalam "Sidang Rakyat Yogyakarta" yang digelar saat itu, mereka menyampaikan "Maklumat Rakyat". Pernyataan yang dibacakan oleh Noor Harish (Ketua DPRD Kulon Progo) itu berisi dua hal, pertama, menetapkan Yogyakarta tetap sebagai daerah istimewa. Kedua, menetapkan dan mengangkat KGPAA Paku Alam IX sebagai wakil gubernur untuk mendampingi Gubernur DIY (Sri Sultan Hamengku Buwono X).

Dua bupati turut mendukung aksi rakyat tersebut. Pertama adalah Bupati Bantul, Drs. H.M. Idham Samawi. Kedua adalah Bupati Kulon Progo, Toyo S. Dipo. Kepada wartawan, Toyo S. Dipo mengatakan bahwa dukungan itu sangat wajar karena selama bertahun-tahun rakyat Kulon Progo menerima banyak berkah dari Pakualaman. Banyak sekali tanah milik Pakualaman di Kulon Progo digunakan untuk kepentingan rakyat tanpa dikenai pungutan atau biaya sepeser pun.

Dari peristiwa pengukuhan itu, terlihat bahwa masyarakat Yogya memahami DIY sebagai daerah istimewa yang dipimpin langsung oleh Sri Sultan dan Sri Paku Alam. Dwi tunggal ini merupakan sebuah pakat kepemimpinan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

### **Aspirasi Masih Sama**

Sampai akhir tahun 2007, aspirasi terhadap kepemimpinan Sri Sultan dan Sri Paku Alam dalam rangka DIY masih tetap kuat. Menurut jejak pendapat *Kompas* yang dilakukan pada tanggal 8-9 November 2007, setidaknya 367 responden yang berdomisili di Kota Yogya masih memilih Sri Sultan dan Kerabat Kraton sebagai pemimpin untuk DIY (*Kompas*, 13 Desember 2007).

Kepada *Kompas*, Bupati Bantul Idham Samawi mengatakan bahwa mayoritas warga Bantul masih mendukung kepemimpinan Sri Sultan dan Sri Paku Alam dalam kerangka DIY. Katanya, "Saya sudah

datangi 75 desa dan 900 lebih dusun di Bantul. Mayoritas warga masih ingin Sultan kembali memimpin” (*Kompas* 13 Desember 2007).

Sebagai catatan tambahan, dukungan rakyat kepada GKR Hemas yang adalah permaisuri Sri Sultan HB X juga menunjukkan bagaimana masih kuatnya kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan khas DIY. Pada tahun 2004, GKR Hemas mencalonkan diri sebagai anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD). Pada waktu itu, ketika calon lain paling banter memperoleh 133.000 suara, GKR Hemas melesat jauh dengan memperoleh sebanyak 800.000 suara.

### **Komitmen dan Konsistensi DPRD DIY**

Ketika Orde Baru sedang mengalami masa jaya, DPRD DIY tetap berpendirian bahwa DIY dengan Sri Sultan dan Sri Paku Alam sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerahnya harus tetap dipertahankan. Pada tanggal 9, 11, dan 18 Juli 1980, DPRD DIY melakukan pembicaraan-pembicaraan dalam Sidang Paripurna yang membawa kepada keputusan untuk tetap menegakkan DIY. Bertolak dari itu dibuatlah Keputusan DPRD DIY No. 4/K/DPRD/1980 tentang Sebutan dan Kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada bagian ”Menimbang” dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa kedudukan istimewa dari DIY hendaknya tidak dikurangi. Kedudukan istimewa itu harus diletakkan dasar-dasarnya pada kenyataan

sejarah perjuangan Yogyakarta sejak sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945). Kedudukan Istimewa DIY juga harus diletakkan dasar-dasarnya pada peranan dan kepemimpinan Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII beserta seluruh rakyat DIY dalam mempertahankan tegaknya NKRI.

Masih pada bagian "Menimbang" disebutkan hal-hal sebagai berikut, pertama, adanya kepercayaan Pemerintah RI yang dinyatakan dengan pemberian Piagam Kedudukan kepada Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII. Kedua, prinsip bahwa Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat, dan cara pengangkatan seperti daerah lain. Ketiga, Amanat 5 September 1945 dan Amanat 30 Oktober 1945. Keempat, Yogya pernah mendapat kepercayaan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan ketika sebagian besar Wilayah RI dipecah oleh Pemerintah Kolonial Belanda menjadi beberapa negara bagian dari RIS, DIY tetap utuh sebagai modal wilayah Negara RI seluruhnya. Kelima, dengan modal wilayah Negara RI yang beribukota di Yogya itu maka berhasil dikembalikan kedaulatan seluruh NKRI. Keenam, dengan mengingat sejarah perjuangan itu maka DIY harus dijaga kelestariannya.

Adapun isi Keputusan No 4/K/DPRD/1980 itu adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan sebutan

pemerintah daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah serta DPRD untuk DIY, menurut UU No. 5 tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, hendaknya tidak mengurangi kedudukan istimewa bagi DIY sebagaimana isi dan jiwa UUD 1945 Pasal 18 serta isi dan maksud UU No. 3 tahun 1950, yaitu berlakunya terus kedudukan istimewa sampai masa-masa mendatang.

Kedua, menghendaki agar Pemerintah Daerah dan DIY dipertahankan sebagai suatu Pemerintah Daerah Istimewa yang monumental berdasarkan kenyataan sejarah dalam NKRI, mengingat nilai-nilai perjuangannya di masa lalu baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, untuk diketahui dan dijadikan suri tauladan bagi generasi mendatang.

Ketiga, kepada pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab terhadap DIY, terutama yang mempunyai kewenangan di bidang perundang-undangan diharapkan untuk tetap memantapkan bergemanya aspirasi rakyat DIY dalam undang-undang yang menjamin kelestarian Kedudukan Istimewa tersebut bagi DIY.

Hampir 20 tahun kemudian, saat reformasi 1998, DPRD DIY masih tetap konsisten dengan visinya itu. Dalam buku "Meneguhkan Tahta untuk Rakyat" dicatat bahwa para anggota DPRD DIY dari tiga fraksi (FKP,

FPDI, FABRI) siap membubarkan diri bila Keputusan Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan aspirasi rakyat yang menghendaki pengukuhan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY melalui Keppres. Yang menarik, Kol (Inf) Ginto Bagianto waktu itu berkomentar: "Bukan jamannya lagi FABRI harus mengajukan calon Gubernur dari ABRI!" Lalu, pada tanggal 21 Agustus 1998 DPRD DIY menetapkan Sri Sultan HB X sebagai satu-satunya calon Gubernur DIY.

Pada tanggal 21 Agustus 1998 itu juga, DPRD DIY menandatangani surat kesepakatan bersejarah di depan ratusan massa. Isinya, pertama, mempertahankan UU No. 3 tahun 1950 sebagai dasar hukum keberadaan DIY. Kedua, mengangkat dan mengukuhkan Sri Sultan HB X sebagai Kepala Daerah DIY. Ketiga, menolak UU No. 5 tahun 1974 karena dianggap sebagai produk Orde Baru yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Yogya.

Sepuluh tahun reformasi berjalan, setelah hiruk-pikuk Pilkada membahana di seantero negeri, sebagian dari DPRD DIY masih memegang teguh visi DIY. Sampai pertengahan 2008, beberapa parpol (PDIP, Golkar, PKB) juga setuju dengan penetapan kembali Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY, sementara PAN menyatakan sikap mendukung keistimewaan Yogya (*Kedaulatan Rakyat*, 24 Maret 2008).

Sikap DPRD DIY yang sebagian besar tetap mendukung visi DIY itu tak bisa dilepaskan dari desakan yang berasal dari akar rumput. Aksi-aksi massa menuntut supaya DPRD DIY bersikap komit dan konsisten dengan visi DIY. Demikian juga para lurah dan pamong desa se-DIY, mereka meminta supaya para wakil rakyat itu tetap menjaga kelestarian DIY. Di bawah ini adalah Keputusan Sidang Rakyat Kawula Agung Yogyakarta yang ditandatangani oleh H. M. Mulyadi (Pimpinan Sidang) dan Bibit Rustamta (Sekretaris Sidang) serta dibubuhi cap dari “Paguyuban Lurah dan Pamong Desa ISMAYA (*Ing Sedya Memetri Aslining Ngayogyakarta*) Propinsi DIY”.

#### Keputusan Sidang Rakyat

Kawula Agung Yogyakarta (25 Maret 2008)

1. Batalkan RUUK yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Minta kepada DPRD DIY untuk segera menyelenggarakan Rapat Paripurna Khusus untuk membuat keputusan politik sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY dan minta kepada Pemerintah Pusat segera mengeluarkan keputusan hukum untuk memberi kepastian hukum bagi masa depan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan amanat Pancasila, UUD 1945, Piagam Presiden Soekarno, dan Amanat 5 September 1945.

3. Pertahankan dan lestarikan status Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Negara Republik Indonesia dengan menetapkan Sultan dan Paku Alam yang bertahta sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemimpin Dwi Tunggal) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Akhirnya, sampai buku ini selesai ditulis pada medio 2008, DPRD DIY telah bersepakat untuk mendesak pemerintah pusat supaya menetapkan kembali Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX menjadi Gubernur Dan Wakil Gubernur DIY. Demikianlah surat kabar di Yogya melaporkan: “DPRD DIY akhirnya secara resmi mengeluarkan sikap resmi agar pemerintah pusat menetapkan kembali Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2008-2013. Sikap ini merupakan hasil dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Tindak Lanjut Keistimewaan DIY yang disetujui dalam Rapat Paripurna, Senin 30 Juni malam” (*Kedaulatan Rakyat*, 1 Juli 2008, hal 23).

Menurut pengamat politik A.A.G.N. Ari Dwipayana dalam wawancara dengan TVRI Yogya (2 Juli 2008), keputusan DPRD DIY kali ini merupakan keputusan yang bersifat kompromis. Para wakil rakyat ini lebih memilih jalan tengah dari dua ekstrim alternatif. Ekstrim yang pertama adalah Pilkada. Ekstrem yang kedua adalah pengangkatan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

seumur hidup. DPRD DIY pada medio 2008 ini, ditengah ketidakjelasan sikap pemerintah pusat, memilih untuk menetapkan kembali Sri Sultan HB X dan Sri PA VIII sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2008-2013.

## **Bab 12.**

### **Merajut Keindonesiaan dengan Memberi Contoh**

*Pada 2007, buku karya Sultan Hamengku Buwono X berjudul “Merajut Kembali Keindonesiaan Kita” diterbitkan.*

Buku itu muncul saat menjelang satu dasawarsa pasca-gerakan Reformasi 1998 dan lima tahun sebelum UU Keistimewaan DIY disahkan. Sisa-sisa ketercabikan Indonesia akibat berbagai konflik dan kerusakan masih belum sepenuhnya terpulihkan. Karena itu tepat jika judul buku itu mengangkat gagasan tentang upaya merajut kembali Indonesia.

Buku ini juga lahir pasca-gempa buki dahsyat yang memporak-porandakan Yogyakarta pada tahun 2006. Ribuan penduduk tewas dan kerugian material sangat besar. Dua tahun sebelumnya, 2004, Aceh yang juga merupakan daerah istimewa di dalam NKRI diluluhlantakkan oleh gempa dan tsunami. Karena itu sangat tepat waktu jika Sultan HB IX menulis buku yang intinya merajut kembali Indonesia dalam beberapa bidang atau sektor yaitu:

1. Merajut kembali kebudayaan
2. Merajut kembali kebangsaan
3. Merajut kembali ekonomi
4. Merajut kembali politik
5. Merajut kembali hukum dan pertahanan-keamanan

## **Buku Kepemimpinan**

Buku ini merupakan paparan konsep kepemimpinan untuk pembangunan Indonesia. Penerbit Gramedia memberikan penjelasan sebagai berikut.

Melalui buku ini, Sultan Hamengku Buwono X menawarkan jalan keluar bagi pembangunan politik masa depan Indonesia Baru yang aman, adil, makmur, dan sejahtera – sebuah gagasan mendalam yang menjawab pertanyaan: bagaimana dan sarana apa yang seyogyanya kita pakai untuk menjangkau masa depan – berikut menawarkan alternatif dalam mengatasi kebekuan, berpikir yang sedang membelenggu masa kini. Wacana ini sungguh relevan sebagai sumbangan pemikiran, ketika masyarakat kita sedang miskin gagasan mendalam yang mampu menjangkau masa depan. Dengan demikian, buku ini sesungguhnya merupakan cetak biru yang bisa dimanfaatkan oleh setiap calon pemimpin dalam melihat kenyataan yang ada, berikut mengintip cakrawala kaki langit sebuah Indonesia Baru, sekaligus sarana untuk bisa mewujudkannya.

Buku ini merepresentasikan kepemimpinan Sultan HB X dalam hal visi, misi, pemikiran, dan komitmen-komitmen kenegarawanannya. Hal itu menunjukkan bagaimana jangkauan kepemimpinan Raja Yogya ini yang bukan hanya mencakup kawasan Daerah

Istimewa Yogyakarta namun nusantara. Hal itu meneguhkan kembali kapasitas Yogyakarta yang sebelum bergabung dengan Negara Indonesia merupakan sebuah nagari tersendiri yang berbentuk kerajaan, yang seandainya dulu tidak bergabung dengan RI maka bisa merdeka menjadi negara sendiri.

Seorang pemimpin nasional menurut Sultan HB X adalah seorang negarawan yang harus mampu merajut kebudayaan Indonesia yang berbhinnekatunggalika. Indonesia Baru menurut HB X harus berbasis kehidupan masyarakat yang multikultural. Dalam hal ini, masyarakat plural Indonesia cukup kuat. Ia mengutip hasil studi Arend Lijphard (1977) yang mengatakan bahwa hanya 15 persen dari 114 negara demokrasi yang masyarakatnya plural yang stabil. Kebanyakan masyarakat plural rentan konflik, Indonesia pun demikian. Karena itu pemimpin Indonesia harus berfokus untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada Bab 2 dan Bab 3 buku karya Gubernur DIY ini, dijelaskan bahwa pemimpin nasional yang hendak merajut kebudayaan Indonesia mutlak harus memajukan kearifan lokal dan memperkuat dialog antarumat beragama. Menurut HB X, kearifan budaya yang berasal dari budaya daerah dapat dijadikan “modal dasar baru” bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Pemimpin menurut HB X harus menjadi sosok pengayom bagi seluruh umat beragama.

Untuk merajut kembali kebangsaan (nasionalisme) Indonesia, pemimpin nasional harus fokus untuk menegakkan kembali Pancasila. Menurut HB X, pemimpin negarawan harus berjuang untuk mewujudkan Pancasila sebagai “*a living ideology*” dalam menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Pancasila harus dijadikan filosofi bangsa yang hidup membumi dengan melakukan pernyataan terus-menerus (*continual re-statement*) untuk memberikan makna baru melalui pemafsiran yang kritis.

Sultan HB X mengatakan dalam bukunya itu bahwa untuk merajut ekonom Indonesia masa kini, kita perlu memajukan teknologi digital. Namun penggunaan teknologi untuk memajukan ekonomi itu harus disertai dengan harmonisasi antara teknologi itu dengan kebudayaan. Kebudayaan berkembang jika ada keseimbangan antara *challenge* dan *response*. Pengembangan teknologi perlu dimaknai sebagai usaha manusia untuk merespon tantangan yang muncul, menghadapinya untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan,

Mengenai bagaimana merajut kembali politik, Sultan HB X memulai dengan menyadarkan tren perubahan pemerintahan yang kini terjadi. Tren reformasi birokrasi yang terjadi secara global adalah perubahan menuju sistem pemerintahan entrepreneur seperti terlihat dalam tabel di bawah ini (Sultan HB X, 2007: hal 220).

## Tren Reformasi Pemerintahan secara Global

Sistem Birokratis	Sistem Pemerintahan Entrepreneur
<i>Rowin</i> Bekerja sendiri	<i>Steering</i> Mengarahkan
<i>Service</i> melayani	<i>Empowering</i> Memberdayakan
<i>Monopoly</i> Menguasai sendirian	<i>Competition</i> Bersaing (secara sehat)
<i>Rule-driven</i> Digerakkan oleh aturan	<i>Mission-driven</i> Digerakkan oleh misi
<i>Budgeting input</i> Menunggu anggaran	<i>Funding-outcomes</i> Menghasilkan dana
<i>Bureaucracy-driven</i> Digerakkan oleh birokrat	<i>Customer-driven</i> Dikendalikan oleh pelanggan (masyarakat pembayar pajak)
<i>Spending</i> Pengeluaran	<i>Earning</i> Penghasilan/tabungan
<i>Caring</i> Penyembuhan	<i>Preventing</i> Pencegahan
<i>Hierarchy</i> Berjenjang	<i>Teamwork-participation</i> Kerja tim / pelibatan
<i>Organization</i> Organisasi, lembaga	<i>Market</i> Pasar, keseimbangan orang banyak

Sultan HB X menegaskan bahwa dalam model pemerintahan entrepreneur, pemerintah dan birokrasi hanya mengarahkan dan bukannya mengurus semua bidang. Pemerintah harus aktif memberdayakan masyarakat agar terjadi persaingan sehat. Pemerintah pro rakyat karena rakyat adalah pembayar pajak, pemerintah tidak memboros-boroskan anggaran namun aktif-produktif menghasilkan dana,

Dalam konteks Indonesia, dengan menimbang pemikiran dari Syaifuan Rozi dan berbagai sumber, diformulasikan model reformasi birokrasi sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini (Sultan HB X, 2007: hal 222-223)

Tabel Model Reformasi Birokrasi untuk Indonesia

Dimensi Birokrasi	Model Lama Birokrasi	Model Baru Birokrasi
Kultur dan struktur kerja	Irasional-hirarkis	Rasional-egaliter
Hubungan kerja	Komando-intervensionis	Partisipan-otonomus
Tujuan kerja	Penguasaan dan pengendalian publik	Pemberdayaan publik dan demokratisasi
Sikap terhadap publik	<i>Rent-seeking</i> , ekonomi biaya tinggi	Pelayanan publik yang profesional dan transparansi biaya ( <i>public accountability</i> )
Pola rekrutmen, pengawasan, dan penghargaan	<i>Spol System</i> (nepotisme, diskriminasi reward berdasarkan ikatan primordial: suku, ras, agama)	<i>Merit System</i> (pengangkatan karena keahlian, pengawasan kolektif, obyektif)
Model Pelayanan	Tidak ada kompetisi dalam pelayanan	Kompetitif dalam memberikan pelayanan
Keterkaitan dengan Politik	Birokrasi berpolitik	Netralitas politik birokrasi

Terakhir, merajut kembali hukum dan pertahanan-keamanan. Mengenai hal ini Sultan HB X mengingatkan bahwa TNI itu lahir dari “Tentara Rakyat”. Tentara Indonesia haruslah merupakan representasi komitmen persatuan Indonesia. Menurut HB X, TNI Abad 21 adalah aktualisasi semangat Sudirman, Pangsar Sudirman berkata, “Satu-satunya milik nasional republik yang masih tetap utuh dan tidak berubah-ubah, meskipun harus menghadapi perang segala macam soal dan perubahan, adalah Angkatan Perang Republik Indonesia....hak milik nasional republik itu tidak dapat diubah-ubah oleh keadaan yang bagaimana pun juga” (Sultan HB X, 2007: hal 286).

### **Yogya Istimewa untuk Indonesia**

Dalam dalam buku “Merajut Kembali Keindonesiaan Kita” itu, Sultan HB X memberikan arahan pembangunan Indonesia Baru dengan menjadikan Yogya sebagai contoh. Terutama dalam pembangunan kebudayaan (“merajut kembali kebudayaan”). Sultan HB X menjadikan pembangunan budaya Yogya sebagai contoh nasional (lihat Lampiran 2: Bab 4 Buku “Merajut Kembali Keindonesiaan Kita” karya Sultan HB X).

Yogya istimewa bukan hanya untuk dirinya, Yogya istimewa untuk Indonesia. Demikianlah tema peringatan Sewindu Undang-Undang Keistimewaan DIY pada tahun 2020. Pada silam kontribusi untuk Indonesia itu diwujudkan dalam bentuk peran Yogya sebagai Ibukota RI (1946-1949). Pada masa

pembangunan sekarang, kontribusi Yogyakarta dalam menjadi model yang bisa menjadi contoh bagi pembangunan daerah-daerah lain.

Pembangunan di dalam internal DIY juga harus dengan pemberian contoh atau model. Untuk mendiseminasi-kan Keistimewaan DIY hingga terbangun pranata-pranata sosial yang istimewa, kita membutuhkan contoh atau model. Meminjam istilah dalam pertanian, diperlukan penyuluhan dengan metode demonstrasi. Demplot (demonstrasi plot) adalah metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap obyek yang didemonstrasikan. Kita membutuhkan “demplot kampung istimewa”, “demplot kampus istimewa”, dan juga “demplot komunitas istimewa”.

Sebagai contoh, sejak 2017 di Kabupaten Gunungkidul telah ada pranata kerjasama lintas agama berwujud “Sekolah Kebhinnekaan”. Sistem pendidikan informal ini diampu oleh beberapa komunitas agama yang berbeda-beda. Sekolah ini mendidik pemuda lintas agama dengan cara belajar sambil tinggal (*live in*) di berbagai rumah ibadah yang berbeda-beda. Ini barulah salah satu contoh demplot Keistimewaan DIY di bidang agama. Sebuah ‘lahan percontohan’ pranata pendidikan lintas agama untuk mewujudkan kebhinneka-tunggal-ika-an yang merupakan tujuan dari Keistimewaan DIY (UUK Pasal 5 ayat [1] huruf c).

## **Bab 13.**

### **Menegaskan Keistimewaan DIY**

*Baik Sultan HB IX maupun Sultan HB X sama-sama menegaskan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*

Dalam Bagian I tentang Kepemimpinan Sultan HB IX telah dibahas bagaimana beliau menegaskan Keistimewaan DIY. Sikap yang sama juga dilakukan oleh Sultan HB X ketika pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY tidak kunjung berhasil. Keistimewaan DIY yang ditegaskan oleh baik Sultan HB IX maupun Sultan HB X adalah Keistimewaan DIY yang menetapkan Sultan yang bertahta dan Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

#### **Teka-teki Sang Raja**

Substansi keistimewaan Yogya sampai sebelum diterbitkannya Undang-Undang Keistimewaan (UUK) yang baru terletak pada prinsip bahwa Sultan Yogya yang sedang bertahta menjabat Gubernur DIY secara otomatis. Sedangkan wakilnya, otomatis dijabat oleh Sri Paku Alam yang juga sedang bertahta. Di era penegakkan demokrasi prosedural kini, substansi itu menjadi krusial sehingga RUUK tidak kunjung selesai dirumuskan.

Mengenai masa depan DIY dengan substansi keistimewaan yang seperti itu, Sultan Hamengku Buwono X yang *jumeneng* sejak 1989 silam pernah menyampaikan pernyataan yang menjadi teka-teki. Ia pernah menyatakan tidak bersedia lagi menjadi Gubernur DIY. Hampir genap satu tahun teka-teki itu menimbulkan banyak pertanyaan, kebingungan, ketidakmengertian, dan bahkan kesalahpahaman.

Teka-teki itu akhirnya dijawab sendiri oleh Raja Yogya ini. HB X menyatakan kepada media, "Saya tidak mau dipermainkan dengan ketidakpastian. Terkait pernyataan saya pada tanggal 7 April 2007 lalu, saya berharap ada kepastian tentang UU Keistimewaan DIY sebelum masa jabatan saya habis pada Oktober mendatang" (*Kedaulatan Rakyat*, 10 Maret 2008). Artinya, HB X bersikap tegas untuk menegakkan kejelasan status hukum keistimewaan Yogya tersebut.

Namun, sampai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir pada 2009, UUK Yogya belum juga beres. Masalah substansi keistimewaan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Akankah DIY terus berlanjut? Perumusan dan penerbitan UUK Yogya diharapkan selesai pada paruh awal pemerintahan SBY jilid kedua ini (2009-2014).

### **Sabdatama Sultan HB X**

Ketika pembahasan RUUK DIY semakin memanas dan pemerintah pusat terlihat tidak mendukung

sepenuhnya, pada tanggal 10 Mei 2012, Sultan Hanengku Buwono X mengeluarkan “Sabdatama” menyatakan setidaknya 4 poin dalam bahasa Jawa sebagai berikut:

1. *Dene Kraton Ngayogyakarta sarta Kadipatem Pakualaman iku, loro-loroning atunggal* – Bahwa Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan,
2. *Mataram iku negri kang merdika lan nduweni paugeran lan tata kaprajan dewe* – Mataram adalah negeri yang merdeka dan memiliki tata adat dan aturan sendiri,
3. *Kaya kang dikersakake lan dikeparengake, Mataram ngesuhi Nuswantara, nyengkuyung jejering negara, nanging tetep ngagem paugeran lan tata kaprajane dewe* – Seperti yang dikehendaki dan diperkenan, Mataram mengasuh Nusantara, mendukung tegaknya negara, tetapi tetap memegang adat tradisi dan pemerintahan sendiri,
4. *Kang mangkana iku kaya kang dikersakake Sultan Hamengku Buwono sarta Adipati Paku Alam kang jumeneng, katetepake jejereng Gubernur lan Wakil Gubernur* – Sebab itu negeri yang diinginkan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta yang ditetapkan bersama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Sabdatama itu merupakan pernyataan lugas dan tegas tentang konsep Keistimewaan DIY yang berbasis “penetapan” bukan “pemilihan”. Prinsipnya, Sultan dan Paku Alam yang bertahta ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Setelah Sultan HB X menyatakan Sabdatama itu, masyarakat, semua pihak, dan pemerintah pusat diyakinkan tentang ketegasan sikap Raja Yogyakarta ini. Sultan HB X tidak berkenan jika Keistimewaan DIY dihambat-hambat.

### **Manunggaling Kawulo lan Gusti**

Namun satu hal yang perlu dicatat, sikap tegas Sultan HB X untuk menegaskan Keistimewaan DIY itu bukan atas dasar kehendaknya sendiri. Ia konsisten dengan tekad yang diucapkan pada saat penobatannya pada 1989 silam yaitu “untuk tidak memiliki ambisi apa pun, selain senantiasa berusaha hanya bagi kesejahteraan rakyat”. Sultan HB X menegaskan Keistimewaan DIY karena Keistimewaan DIY itu adalah kehendak rakyat.

Selama masa pengusulan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK), rakyat Yogyakarta mendukung penuh Keistimewaan DIY berbasis “penetapan” bukan “pemilihan”. Mayoritas rakyat Yogyakarta berprinsip bahwa Yogya Istimewa karena Sultan yang bertahta otomatis ditetapkan menjadi Gubernur DIY dan Paku Alam yang bertahta otomatis ditetapkan menjadi Wakil Gubernur DIY.

Kalau Sri Sultan HB X kembali ditetapkan sebagai Gubernur DIY setelah masa jabatannya berakhir tahun 2008, berarti sudah tiga kali peristiwa itu terjadi. Semuanya didahului oleh aksi massa rakyat secara besar-besaran. Pertama, terjadi pada tahun 1998. Waktu itu, sebelum akhirnya penetapan dilakukan, paling tidak rakyat menggelar dua kali aksi massa. Pada tanggal 11 Agustus 1998, para pedagang pasar menggelar aksi *Pisowanan Kawulo Mataram*. Kemudian, pada tanggal 26 Agustus 1998, ribuan rakyat dari semua kabupaten di DIY bergerak menuju kota dan membacakan deklarasi untuk mengukuhkan Sri Sultan HB X menjadi Gubernur DIY. Kedua, penetapan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur Kepala Daerah DIY kembali terjadi pada tahun 2003, juga diakselerasi oleh aksi-aksi massa rakyat yang serupa. Semua itu menunjukkan bagaimana besarnya aspirasi masyarakat Yogya terhadap DIY yang dicirikan oleh kepemimpinan Sri Sultan dan Sri Paku Alam sebagai kepala daerah yang tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan seperti pada daerah-daerah lain.

Sampai akhir tahun 2007, aspirasi terhadap kepemimpinan Sri Sultan dan Sri Paku Alam dalam rangka DIY masih tetap kuat. Menurut jejak pendapat *Kompas* yang dilakukan pada tanggal 8-9 November 2007, setidaknya 367 responden yang berdomisili di Kota Yogya masih memilih Sri Sultan dan Kerabat Kraton sebagai pemimpin untuk DIY (*Kompas*, 13 Desember 2007).

Kepada *Kompas*, Bupati Bantul Idham Samawi mengatakan bahwa mayoritas warga Bantul masih mendukung kepemimpinan Sri Sultan dan Sri Paku Alam dalam kerangka DIY. Katanya, "Saya sudah datang ke 75 desa dan 900 lebih dusun di Bantul. Mayoritas warga masih ingin Sultan kembali memimpin" (*Kompas* 13 Desember 2007).

Sikap DPRD DIY yang sebagian besar tetap mendukung visi DIY itu tak bisa dilepaskan dari desakan yang berasal dari akar rumput. Aksi-aksi massa menuntut supaya DPRD DIY bersikap komit dan konsisten dengan visi DIY. Demikian juga para lurah dan pamong desa se-DIY, mereka meminta supaya para wakil rakyat itu tetap menjaga kelestarian DIY. Di bawah ini adalah Keputusan Sidang Rakyat Kawula Agung Yogyakarta yang ditandatangani oleh H. M. Mulyadi (Pimpinan Sidang) dan Bibit Rustamta (Sekretaris Sidang) serta dibubuhi cap dari "Paguyuban Lurah dan Pamong Desa ISMAYA (*Ing Sedyo Memetri Aslining Ngayogyakarta*) Propinsi DIY".

#### Keputusan Sidang Rakyat

Kawula Agung Yogyakarta (25 Maret 2008)

- a) Batalkan RUUK yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Minta kepada DPRD DIY untuk segera menyelenggarakan Rapat Paripurna Khusus untuk membuat keputusan politik sesuai dengan aspirasi

masyarakat DIY dan minta kepada Pemerintah Pusat segera mengeluarkan keputusan hukum untuk memberi kepastian hukum bagi masa depan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan amanat Pancasila, UUD 1945, Piagam Presiden Soekarno, dan Amanat 5 September 1945.

- c) Pertahankan dan lestarikan status Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Negara Republik Indonesia dengan menetapkan Sultan dan Paku Alam yang bertahta sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemimpin Dwi Tunggal) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.



## **Bab 14.**

### **Mengimplementasikan Keistimewaan DIY**

*Di dalam mengimplementasikan Keistimewaan DIY pascaterbitnya UU Keistimewaan DIY, Sultan HB X menggenjot prestasi pembangunan DIY, mengevaluasinya, serta menentukan visi dan strategi.*

Setelah melalui perjuangan panjang yang alot, akhirnya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY disahkan. Pada tanggal 30 Agustus 2012 Sidang Paripurna DPR RI secara aklamasi menyetujui RUUK DIY menjadi UUK DIY. Pada tanggal 31 Agustus 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani UUK DIY dan diberikan Nomor 13 Tahun 2012 dan dicatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339. Pada tanggal 4 September 2012 secara resmi pemerintah pusat melalui Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI menyerahkan UUK DIY kepada Pemerintah DIY. Penyerahan itu dilakukan di Bangsal Kepatihan Danurejan Yogyakarta disaksikan oleh 18 orang anggota Komisi II DPR RI. Penyerahan diterima oleh Sultan Hamengku Buwono X, disaksikan oleh Paku Alam VIII dan DPRD DIY serta SKPD Provinsi DIY.

UUK DIY sejatinya melampaui ekspektasi rakyat, sebab UUK DIY itu mengatur Keistimewaan DIY secara rinci dan lengkap. Keistimewaan DIY menurut UUK sudah sesuai dengan aspirasi rakyat dan amanat

sejarah, yaitu bahwa Sultan dan Paku Alam yang bertahta ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Keistimewaan DIY menurut UUK memiliki kewenangan-kewenangan istimewa untuk mengurus lima urusan khusus yaitu

1. Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang mana Sultan dan Paku Alam yang bertahta ditetapkan sebagai pejabatnya.
2. Urusan pengembangan kelembagaan pemerintahan daerah yang istimewa.
3. Urusan pembangunan kebudayaan Yogyakarta.
4. Urusan pengelolaan pertanahan khas Yogyakarta, yaitu terkait pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Pakualaman.
5. Urusan pembangunan tata ruang khas Yogyakarta.

### **Prestasi Pembangunan**

Terbitnya UUK DIY memberi motivasi luar biasa bagi Pemerintah Daerah DIY untuk berkarya pembangunan. Baik pembangunan DIY secara umum maupun pembangunan di dalam lingkup lima urusan Kewenangan Keistimewaan mengalami kemajuan pesat.

Berbagai pencapaian yang telah diraih DIY baru-baru ini semestinya menjadikan prestasi pembangunan sebagai fokus masa kini dan masa depan. Keistimewaan Yogya di masa lalu itu sudah jelas. UUK

telah menegaskan bahwa Yogya istimewa karena sejarah dan asal-usulnya. Adapun yang dibutuhkan dan dituntut sekarang adalah bagaimana keistimewaan itu mewujudkan nyata dalam prestasi-prestasi istimewa yang serba terukur

Dari hasil riset The Asian Post, Pemda DIY pada 2019 ini meraih 8 prestasi. Enam di antaranya berupa prestasi terbaik, yaitu sebagai Provinsi Terbaik secara keseluruhan, Provinsi dengan Tingkat Pertumbuhan Fiskal Terbaik, Provinsi dengan Tingkat Inflasi Terendah, Provinsi dengan Kondisi Penurunan Kemiskinan Perkotaan Tercepat, Provinsi dengan Kondisi Penurunan Kemiskinan Pedesaan Tercepat, dan Provinsi dengan Kondisi Pariwisata Terbaik. Dua prestasi lainnya menempatkan DIY sebagai peringkat kedua Provinsi dengan Kondisi Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Provinsi dengan Kondisi Paling Bahagia.

### **Evaluasi dan Revisi**

Yang menjadi poin penting adalah tindakan Pemerintah Daerah DIY di bawah kepemimpinan Sultan HB X yang cepat melakukan evaluasi berbasis riset akademis. Upaya itu dilaporkan dalam buku “Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017”, diterbitkan oleh Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah DIY pada tahun 2018. Harapannya, tradisi evaluasi berbasis riset akademis ini terus berlanjut di

masa yang akan datang. Tujuan evaluasi pelaksanaan Keistimewaan DIY itu adalah

- 1) Memantau dan mengendalikan agar Arah Kebijakan Keistimewaan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam UU No 14 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, khususnya tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Secara teknis proses evaluasi bertujuan memetakan rangkaian proses perencanaan, implementasi, monitoring atas efektivitas program-program Keistimewaan yang telah dilaksanakan.
- 3) Mengetahui seberapa jauh dampak jangka pendek (*output*), jangka menengah (*outcome*) dan jangka panjang (*impact*) pada warga masyarakat.
- 4) Memetakan kesenjangan (*gap*) antara proses perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program-program keistimewaan.
- 5) Memberikan rekomendasi penyempurnaan atas kesenjangan yang terjadi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk usulan kegiatan yang lebih sesuai,

Evaluasi itu menunjukkan sikap demokratis dalam kepemimpinan HB X. Ia bukan hanya membuka diri terhadap aspirasi rakyat, menerima kontrol dari DPRD DIY, namun juga dan terbuka pada kritik evaluatif dari

kalangan akademisi. “Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017” yang dikerjakan oleh Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah DIY dan laporannya terbit pada 2018 adalah evaluasi yang obyektif. Prestasi maupun kegagalan semua diekspos. Kelebihan dan kekurangan tidak ditutup-tutupi. Dalam buku itu ada bagian khusus yang melaporkan *Worst Practice* dan *Best Practice*. Pada halaman 169-175 dilaporkan ada beberapa keberhasilan (*best practices*) selama implementasi UUK sejak 2013 hingga 2017 antara lain terbangunnya kerjasama lintas agama dalam kegiatan Bersih Kali di Desa Bejiharjo dan berkembangnya komunitas film maker.

### **Visi dan Strategi**

Setelah Keistimewaan DIY terjamin dengan terbitnya UUK 2012, Sultan HB X melancarkan kepemimpinan visionernya. Ia memulai dengan visi-misi “Among Tani Dagang Layar” untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DIY periode 2012-2017. Fokusnya membangun kawasan selatan DIY sebagai “halaman depan” DIY. Implementasinya pun cukup spektakuler dengan terwujudnya Jalan Lintas Selatan (JLS) DIY sepanjang 125,125 km dari Karangnoko Kulonprogo sampai dengan Jerukwudel Kab Gubuingkidul dan tembus ke Wonogiri. JLS DIY menjadi jalur strategis yang menghubungkan titik-titik ekonomi penting seperti Bandara YIA di Temon, Pelabuhan Tanjung Adikarto di

Glagah, Pasir Besi di Karangwuni, Kawasan Wisata Parangtritis, Bantul, Baron, dan Sadeng Gunungkidul.

Untuk RPJMD DIY periode 2017-2022, Sultan HB X bergerak dengan visi-misi “Abad Samudera Hindia”. Dari pidato yang beliau sampaikan pada 2 Agustus 2017 (lihat Lampiran 3: Pidato Visi Misi Gubernur DIY Tahun 2017-2022), visi itu mencakup orientasi pembangunan potensi pantai dan laut, dan juga pengembangan sumber daya manusia Yogya yang bermartabat,

Sultan HB X bukan hanya seorang pemimpin visioner tetapi juga penuh strategi yang holistik-komprehensif. Dari pidato visi-misi “Abad Samudera Hindia” itu, ia memberi pemahaman tentang beberapa strategi pembangunan DIY.

1. Strategi membangun dengan program besar untuk dampak yang besar, jangan sekedar program-program kecil tetapi malah berbiaya besar. Dalam pidatonya itu ia berkata, *“....strategi menciptakan program-program besar yang memiliki kapasitas dan dampak besar bagi perubahan-perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga ke depan harus dikurangi terciptanya banyak program-program kecil berbiaya besar, untuk kemudian digantikan dengan program-program besar berdampak besar.....”* (Pidato Gubernur DIY

Sultan HB X tentang Visi Misi RPJMD SIY 2017-2022).

2. Strategi membangun sinergi, kolaborasi, dan konvergensi lintas SKPD (OPD), jangan terkotak-kotak karena ego-sektoral yang tinggi, Katanya, *“Semangat “Perjumpaan” dan “Silang Birokrasi” akan diletakkan sebagai strategi menciptakan program-program besar....berdampak besar melalui program-program berbasis “Silang SKPD”. Dengan perkataan lain, ke depan program-program “Silang SKPD” yang berbasis “Tema-tema Besar” akan didorong prioritasnya dibanding dengan program-program kecil berbasis SKPD tunggal.* (Pidato Gubernur DIY Sultan HB X tentang Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022).
3. Strategi pembangunan ekonomi dengan mengembangkan sinergi, kolaborasi, dan konvergensi antar kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada. Katanya, *“Semangat “Perjumpaan” dan “Silang Ekonomi” akan diletakkan sebagai strategi kebudayaan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan yang masih menggelayut di wilayah Yogyakarta secara keseluruhan, dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja, melalui langkah-langkah perjumpaan dan saling silang antara pelaku ekonomi kuat dengan pelaku ekonomi lemah, antara pelaku ekonomi perkotaan dengan pelaku ekonomi pedesaan, antara pelaku*

*ekonomi modern dengan pelaku ekonomi tradisional, antara pelaku ekonomi bermodal besar dengan pelaku ekonomi bermodal kecil, dan antara pelaku ekonomi internasional dengan pelaku ekonomi lokal. (Pidato Gubernur DIY Sultan HB X tentang Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022).*

4. Strategi pembangunan dengan orientasi pada karya peradaban berkualitas tinggi, bukan sekedar “kerja proyekan” dan “kerja kantoran”. Katanya, “*Trilogi SDM DIY menyanggah pesan perubahan persepsi (mindset) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai “karya peradaban”, yang menyanggah arti bahwa semua pelayanan birokrasi adalah “karya peradaban”, karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi peradaban DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. .... pergeseran mindset, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi sebagai “karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran”, melainkan menuju pada pembentukan “sikap” bahwa karya birokrasi DIY adalah “kerja yang dapat menjadi rujukan” bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional dan internasional). Ketika karya tersebut menjadi “rujukan”, maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas yang merupakan hasil dari karya yang “diniati” untuk menjadi “karya berkualitas*

*tinggi*". (Pidato Gubernur DIY Sultan HB X tentang Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022).

5. Strategi pembangunan dengan penguatan dan pemberdayaan Pemerintah Daerah DIY. Katanya, *"Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain di dalam maupun ke luar lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM DIY" atau "E2-K" yaitu ETOS, ETIKA, dan KUALITAS."* (Pidato Gubernur DIY Sultan HB X tentang Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022).



## **Bab 15.**

### **Memimpin DIY dengan Visi Global**

*Sultan HB X memimpin untuk membawa Daerah Istimewa Yogyakarta ke pentas global.*

Baik Sultan HB IX maupun Sultan HB X sama-sama punya wawasan dan orientasi global. Melalui perjuangan di Yogyakarta sebagai Ibukota Negara, Republik Indonesia diakui kedaulatannya oleh dunia. Indonesia mempunyai kantor perwakilan di Washington DC Amerika Serikat juga berkat peran Sultan HB IX.

Sejak mendapatkan limpahan dukungan dari rakyat untuk memimpin DIY pasca-Reformasi 1998, Sultan HB X mendorong DIY untuk mendunia (*going global*). Yogyakarta bukan hanya berdampak bagi Indonesia namun menjadi mercusuar dunia. Dari visi-misi dan pencapaian-pencapaian DIY, Sultan HB X membuktikan kepemimpinannya yang berhasil membawa Yogya ke pentas global.

#### **Yogyakarta Terkemuka di Asua Tenggara**

Visi dan orientasi global Sultan HB X mulai dituangkannya dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY periode 2005-2025. Bahwa pada 2025 Yogya menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan destinasi pariwisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan

masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Visi itu dan RPJPD periode tersebut ditetapkan dan ditegaskan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2009. Selisih waktu antara pertama kali visi itu disampaikan (2005) dengan visi itu dijadikan Perda (2009) terjadi karena pada 2006 Yogyakarta mengalami bencana gempa dahsyat. Namun bencana itu justru membangkitkan visi “Yogya Gumregah” dan visi RPJPD DIY 2005-2025 terus ditegaskan dan dilanjutkan.

Namun untuk mewujudkan visi besar itu perlu strategi, inovasi, dan kreativitas pembangunan yang besar pula. Sebab, untuk menjadi pusat pariwisata terkemuka di Asia Tenggara misalnya, Yogya harus mampu bersaing dengan para kompetitornya seperti Georgetown, Malaka, dan Chiang May. Dalam indikator *output*, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke DIY masih tertinggal jauh. Malaka dan Georgetown juga telah menjadi “UNESCO’s World Heritage City”, sementara Yogya belum. Karena itu Sultan HB X terus menerus menggejot semua upaya untuk mewujudkan visi global itu.

### **Membawa Yogyakarta ke Pentas Global**

Di tengah perjuangan menggolkan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY, Sultan HB X menyampaikan pemikirannya tentang Yogya yang jauh lebih besar jangkauanya. Dalam buku karyanya

berjudul “Merajut Kembali Keindonesiaan Kita”, Sultan HB X menyatakan demikian (Sultan HB X, 2007: hal 57).

Tantangan ke depan adalah bagaimana mentransformasikan modal budaya dan modal sosial tersebut agar menjadi nilai tambah ekonomi melalui pengembangan berbagai aplikasinya dalam model pembangunan ekonomi regional. Dengan demikian, kedua modal tersebut dapat dikelola sebagai sumber pertumbuhan ekonomi serta terus-menerus dan lestari, tidak sekedar bersifat temporal saat bencana krisis atau hanya mampu bertahan dalam masyarakat komunal terbatas di Yogyakarta saja. Sikap saling percaya dan rasa kebersamaan merupakan elemen inti dari *cultural resources* dan *social capital* warga Yogya, baik yang masih tinggal maupun yang bermukim di Jakarta, Kedua *intangible capital* itu berpotensi besar untuk ditransformasikan menjadi *added value* ekonomi. Kedua modal itu dapat diterapkan berwujud tindakan kesetiakawanan, kerja sama kemitraan, dan gotong-royong di berbagai bidang kehidupan dalam semangat “Yogyakarta Incorporated”, sekaligus “Membawa Yogyakarta ke Pentas Global”. Oleh sebab itu gelar seni dan budaya perlu dihidupkan terus guna mengakselerasi masuknya Yogya ke pentas dunia. (Lihat Lampiran 2: Bab 4 Buku

“Merajut Kembali Keindonesiaan Kita” karya Sultan HB X).

Sultan HB X melihat potensi dahsyat di dalam diri DIY dan mendorongnya untuk berkembang menjadi sesuatu yang diperhitungkan di level internasional. Potensi itu bukan hanya berbicara tentang budaya yang memang unggul, tetapi potensi yang berimplikasi pada ekonomi. Visi global pembangunan DIY adalah visi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

### **Visi Abad Samudera Hindia**

Pada 2 Agustus 2017, Sultan HB X kembali mengobarkan semangat pembangunan DIY yang bervisi dan berorientasi pada pencapaian global. Visi itu disebutnya sebagai “Abad Samudera Hindia”, menjadi arah bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPDMD) DIY periode 2017-2022.

Sultan HB X menyadarkan DIY untuk melihat potensi DIY di dalam konstelasi global. Yogyakarta adalah bagian dari daerah-daerah, negara-negara yang berpesisir Samudera Hindia yang sekarang telah terjalin dalam jejaring ekonomi dan budaya global. Hal itu menurut Sultan HB X merupakan peluang besar bagi DIY untuk berkiprah dan berkarya global.

*Yogyakarta akan bertindak secara aktif mengisi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam kerangka perjanjian*

*IORA (Indian Ocean Rim Association) untuk mengembangkan Wilayah Yogyakarta Bagian Selatan semata-mata untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja secara keseluruhan.... Semangat “Perjumpaan” dan “Silang Budaya” akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta, melalui program-program saling silang perjumpaan ....antara budaya Jawa dengan budaya antar bangsa termasuk dengan budaya-budaya bangsa yang tergabung dalam IORA (Yogyakarta berpotensi menjadi “hub” atau pusat budaya IORA) (Pidato Gubernur DIY Sultan HB X tentang Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022)*

Namun tidak mudah untuk menanamkan mentalitas global itu. Karena itu Sultan mendorong agar pemerintah daerah dan masyarakat berpikiran luas mendunia. Dalam pidato visi misi itu ia mendorong agar DIY membangun dengan program besar untuk dampak yang besar, jangan sekedar program-program kecil tetapi malah berbiaya besar. Dalam pidatonya itu ia berkata, “....strategi menciptakan program-program besar yang memiliki kapasitas dan dampak besar bagi perubahan-perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga ke depan harus dikurangi terciptanya banyak program-program kecil berbiaya besar, untuk kemudian digantikan dengan program-program besar berdampak besar.....” (Pidato

Gubernur DIY Sultan HB X tentang Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022).

### **Mercusuar Dunia**

Tak tanggung-tanggung, Sultan HB X punya visi supaya Yogya menjadi mercusuar dunia. Hal itu beliau tekankan dalam peringatan HUT ke-66 Kabupaten Kulon Progo dan juga dalam konteks pembangunan bandara baru di kawasan Temon di kabupaten tersebut. Menurut HB X, dimulainya pembangunan NYIA (New Yogyakarta International Airport) disebut sebagai “Babad Adikarto”. Hal ini mengandung empat ramalan sebagai berikut (sumber: krjogja.com 16 Oktober 2017 dan tempo.co 27 Januari 2017).

1. Besok di wilayah Temon ada orang berjualan cincau (camcau) di udara (*Sesuk ning tlatah Temon kene bakal ana wong dodolan camcau ning awang-awang*)
2. Wilayah Temon bakal menjadi sarang pesawat terbang (*Sesuk ning tlatah kene bakal ono kinjeng wesi*).
3. Wilayah dari utara Gunung Lanang dan selatan Gunung Jeruk bakal menjadi kota (*tlatah sak lore Gunung Lanang, sak kidule Gunuing Jeruk bakal dadi kutha*)
4. Glagah bakal menjadi mercusuarinya dunia (*Glagah bakal dadi mercusuare bawono*)

Dalam menghadapi globalisasi, nampak bahwa Sultan HB X selalu menekankan pentingnya Yogya sebagai pewaris sejarah dan budaya Mataram. Semangat “Renaissans Mataram” selalu ditekankan supaya Yogyakarta tidak malah tergerus oleh arus globalisasi tetapi malah menjadi *trendsetter* peradaban global.

### **Yogya Istimewa Memang Mendunia**

Visi pembangunan global yang didengung-dengungkan Sultan HB X bukan omong kosong. Dunia pun semakin mengakui dan menghargai Yogyakarta sebagai pusat peradaban dunia. Sebagai contoh, pada tahun 2014, Dewan Kerajinan Dunia (*World Craft Council*) memperi predikat Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia. Tujuh tahun sebelumnya, dalam buku “Merajut Kembali Keindonesiaan Kita”, Sultan HB X telah menyatakan bahwa kerajinan Yogyakarta akan tampil di pentas global.

Sultan HB X mengaitkan Visi “Abad Samudera Hindia” dengan “Kemuliaan Martabat Manusia Yogya” dan itu benar. Semakin banyak *wong Ngayogyo* yang berprestasi dunia. Pada tahun 2021 misalnya, Adi Utarini yang adalah dosen dan peneliti Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) di Universitas Gadjah Mada masuk “orang paling berpengaruh di dunia” majalah TIME (*TIME 100 Most Influential People 2021*). Prestasinya adalah

pencapaian dalam hal pencegahan ancaman penyakit demam berdarah – bekerjasama dengan tim peneliti internasional dari Program Nyamuk Dunia (WMP). Dalam daftar 100 itu TIME memasukkan tokoh-tokoh dunia seperti Pangeran Henry, Joe Biden, Britney Spears, Donald Trump, Scarlett Johansson, Meghan Markle, Billie Eilish, Chloe Zhao.

# BAGIAN III

## Keistimewaan DIY dalam Kepemimpinan Sultan yang Bertaha

### **Bab 16.**

#### **Keistimewaan DIY 1945-2022**

*Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam  
kurun waktu 1945-2022 berkembang dalam  
kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X.*

Keistimewaan DIY periode 1945-2022 mencakup masa kepemimpinan Sultan HB IX sejak 1945 hingga wafatnya pada 1988. Pada tahun 1989 Sultan HB X naik tahta namun belum ditetapkan menjadi Gubernur DIY. Baru setelah Reformasi 1998 bergulir, segenap rakyat mengukuhkan Sultan HB X sebagai Gubernur DIY sampai pada terbitnya Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK). Setelah UUK terbit, Sultan HB X ditetapkan sebagai Gubernur DIY. Sampai buku ini selesai ditulis Keistimewaan DIY berada dalam masa penyelesaian periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DIY 2017-2022 dengan visi “Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogya”.

#### **Dinamika Keistimewaan DIY**

Bagian I (Bab 1-8) dan Bagian II (Bab 8-15) telah memberikan pemaparan tentang karakteristik

kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X. Data itu memberikan gambaran tentang dinamika Keistimewaan DIY selama periode 1945-2022 karena kedua beliau adalah Gubernur DIY dalam periode itu. Meskipun sejak Ibukota RI kembali ke Jakarta pada 1949 Sultan HB IX lebih banyak aktif di Jakarta namun kepemimpinan Paku Alam VIII di DIY selalu berkonsultasi dengan Sultan HB IX itu. Menurut catatan Sudomo Sunaryo (penulis pidato Gubernur/Wagub DIY), selama memimpin DIY sejak Sultan HB IX aktif di Jakarta, Sri Paku Alam VIII tidak pernah tidak berkonsultasi dengan Sultan HB IX mengenai segala pengambilan kebijakan terkait Keistimewaan DIY.

Keistimewaan DIY selama masa kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X itu mengalami pasang surut. Proses yang dilalui tidak mudah, baik di masa kepemimpinan Sultan HB IX maupun di masa kepemimpinan Sultan HB X, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel

Dinamika Keistimewaan DIY

Dalam Kepemimpinan HB IX	Dalam Kepemimpinan HB X
<ul style="list-style-type: none"> <li>Keistimewaan DIY dihormati Pemerintah Pusat</li> <li>Keistimewaan DIY ditegaskan oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keistimewaan DIY mengalami ketidakjelasan setelah wafat Sultan HB IX (1988) dan setelah Sultan HB X naik tahta</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keistimewaan DIY dipimpin oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII</li> <li>• Keistimewaan DIY berkontribusi besar menyelamatkan Republik Indonesia</li> <li>• Keistimewaan DIY diatur pembentukannya dalam undang-undang yang masih belum lengkap</li> <li>• Keistimewaan DIY nyaris akan dihapuskan dengan alasan penyeragaman pemerintah daerah</li> </ul>	<p>(1989)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keistimewaan DIY berkontribusi besar memperkuat Gerakan Nasional Reformasi 1998</li> <li>• Keistimewaan DIY dibela oleh rakyat dengan berulang kali mengukuhkan Sultan dan Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wagub DIY</li> <li>• UU Keistimewaan DIY diperjuangkan oleh rakyat dan pemerintah DIY</li> <li>• Keistimewaan DIY Diatur dalam undang-undang yang lengkap (UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY)</li> <li>• Keistimewaan DIY diimplementasikan dalam program-program pembangunan</li> </ul>
--	--

Selama masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX dari 1945 hingga wafatnya, Keistimewaan DIY mengalami dinamika sebagai berikut.

- Keistimewaan DIY dihormati pemerintah pusat. Sejak bergabung dengan RI, Presiden Soekarno

memberikan “Piagam Kedudukan” bagi Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Negara juga mengakui dan menghormati DIY sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945.

- Keistimewaan DIY ditegaskan oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Sebelum “Piagam Kedudukan” yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945 sampai di Yogyakarta pada 6 September 1945, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII membuat Amanat 5 September 1945. Dua Amanat itu menegaskan bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa di dalam Republik Indonesia.
- Keistimewaan DIY dipimpin oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Sejak Amanat 5 September 1945 itu, kedua beliau memimpin dan menguasai semua aspek pemerintahan di DIY. Kepemimpinan dan kekuasaan mereka berdua juga merupakan bentuk penegasan status Keistimewaan DIY itu. Namun di dalam memimpin Yogya, kedua beliau mengajak rakyat dan para wakil rakyat untuk bekerjasama, ditekankan dalam Amanat 30 Oktober 1945 yang ditandatangani bersama oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII.
- Keistimewaan DIY berkontribusi besar menyelamatkan Republik Indonesia. Sejak 1946 sampai 1949, Yogyakarta menjadi Ibukota RI. Pihak Kraton Kasultanan maupun Pura Pakualaman

banyak memfasilitasi dan mendanai jalannya pemerintahan RI itu. Kepemimpinan Sultan HB IX berpengaruh sangat signifikan untuk menyelamatkan hingga RI mendapatkan pengakuan kedaulatan dari penjajah asing dan dunia internasional.

- Keistimewaan DIY diatur pembentukannya dalam undang-undang yang masih belum lengkap. Pada tahun 1950 disahkan UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY, menegaskan status Keistimewaan DIY namun belum secara lengkap mengaturnya. Sampai Sultan HB IX wafat (1988) bahkan sampai rezim Orde Baru berakhir (1998), DIY hanya memiliki payung hukum yang masih belum lengkap ini.
- Keistimewaan DIY nyaris akan dihapuskan. Dalam proses penggodokan UU No 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, DIY dan DI Aceh nyaris dihapuskan karena alasan penyeragaman pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Namun berkat perjuangan para tokoh di DPR RI, DIY dan DI Aceh tidak jadi dihapuskan meskipun tidak juga diperjelas pengaturannya.

Selama masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X dari sejak beliau naik tahta pada 1989 hingga akhir RPJMD DIY periode 2017-2022, Keistimewaan DIY mengalami dinamika sebagai berikut.

- Keistimewaan DIY mengalami ketidakjelasan setelah wafat Sultan HB IX (1988) dan setelah Sultan HB X naik tahta (1989). Ketidakjelasan itu terjadi karena Keistimewaan DIY hanya dipayungi oleh UU No 3 Tahun 1950 yang belm lengkap. Sementara setelah Sultan HB IX wafat, Sultan HB X yang bertahta itu tidak ditetapkan sebagai Gubernur DIY.
- Keistimewaan DIY berkontribusi besar memperkuat Gerakan Nasional Reformasi 1998. Kepemimpinan Sultan HB X dan Paku Alam VIII mengakselerasi Gerakan Nasional Reformasi 1998 terutama setelah ada gerakan “Pisowanan Ageng” pada 20 Mei 1998 yang mendahului lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada event *people power* itu Sultan HB X dan Paku Alam VIII mengeluarkan Maklumat yang mendukung Reformasi.
- Keistimewaan DIY dibela oleh rakyat dengan berulang kali mengukuhkan Sultan dan Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wagub DIY. Gerakan Nasional Reformasi 1998 yang bergolak di Yogyakarta, selain diwarnai dengan perlawanan pada rezim Orde Baru dan tuntutan perubahan, juga diwarnai dengan pengukuhan rakyat atas Sultan HB IX dan Paku Alam VIII sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Pengukuhan-pengukuhan itu berlanjut sampai Yogya mendapatkan UU Keistimewaan DIY pada 2012.

- UU Keistimewaan DIY diperjuangkan oleh rakyat dan pemerintah DIY. Sejak 1998 rakyat dan Pemerintah Daerah DIY memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang meletakkan Keistimewaan DIY pada penetapan Sultan dan Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Karena Pemerintah RI sedang giat menerapkan demokrasi (demokrasi prosedural) maka substansi Keistimewaan DIY yang seperti itu dianggap tidak demokratis. Dari situlah maka penggodokan RUUK menjadi alot dan berlarut-larut. Namun atas desakan rakyat dan perjuangan banyak pihak akhirnya UUK dengan substansi keistimewaan yang seperti itu disahkan.
- Keistimewaan DIY diatur dalam undang-undang yang lengkap (UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY). Sampai pada tataran ini, keistimewaan DIY sudah diatur secara rinci dan lengkap dengan adanya UUK itu.
- Keistimewaan DIY diimplementasikan dalam program-program pembangunan. UUK DIY memberi dasar dan arahan yang jelas tentang pelaksanaan Keistimewaan DIY. Apalagi UUK juga telah diterjemahkan dalam Peraturan-peraturan Daerah Istimewa (Perdais) sehingga pembangunan Keistimewaan DIY dapat diwujudkan.



## **Bab 17.**

### **Model Kepemimpinan Sultan dalam Keistimewaan DIY**

*Kepemimpinan Sultan HB IX dan kepemimpinan Sultan HB X memiliki beberapa kesamaan yang dapat kita jadikan model kepemimpinan ideal Sultan Yogya untuk Keistimewaan DIY masa depan.*

Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) mengatur bahwa Sultan dan Paku Alam yang bertahta ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Bertahtanya seseorang sebagai Sultan dan Paku Alam menunjukkan kapasitasnya yang luhur dan kompetensinya yang unggul. Karena itu UUK tidak merinci syarat-syarat kualitas SDMnya karena Sultan dan Paku Alam yang bertahta dianggap pasti mumpuni untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Pasal 18 dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 itu hanya memaparkan syarat-syarat teknis tentang calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, sebagai berikut.

#### **Pasal 18**

- (1) Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- e. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara

- perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  - m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak; dan
  - n. bukan sebagai anggota partai politik.

### **Model Kepemimpinan Sultan**

Sedangkan untuk mendapatkan model kualitas kapasitas kepemimpinan Sultan yang bertahta, kita dapat melihatnya dari kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X yang telah kita pelajari sebelumnya. Karakteristik keduanya dapat kita perbandingkan dari judul-judul yang telah kita pelajari, sebagai berikut.

Tabel

Perbandingan Kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X

Kemimpinan Sultan HB IX	Kepemimpinan Sultan HB X
1. Memimpin Perubahan	9. Meneguhkan Tahta untuk Rakyat
2. Mendukung Pendirian Negara	10. Memimpin Perubahan: Gerakan Nasional Reformasi
3. Menegaskan Keistimewaan DIY	11. Memihak Rakyat
4. Menyelamatkan Negara	12. Merajut Keindonesiaan

5. Mengatasi Krisis	dengan memberi Contoh
6. Memimpin Bangsa dengan memberi Contoh	13. Menegaskan Keistimewaan Yogyakarta
7. Memihak Rakyat	14. Mengimplementasikan Keistimewaan
8. Memimpin dengan Visi Global	15. Memimpin dengan Visi Global

Dari perbandingan antara keduanya setidaknya kita menemukan lima keunggulan kepemimpinan beliau berdua yaitu sebagai (1) pemimpin perubahan, (2) pemimpin yang menegaskan Keistimewaan DIY, (3) pemimpin yang memihak rakyat, (4) pemimpin lokal yang berkontribusi besar bagi bangsa dan negara, (5) pemimpin yang menjadikan Keistimewaan DIY sebagai model nasional, (6) pemimpin visioner yang mendorong Keistimewaan DIY berkarya peradaban yang besar yang berdampak global.

Keenam ciri kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X itu menjadi model ideal kepemimpinan Sultan yang bertahta sebagai pemimpin Keistimewaan DIY. Pertama, Sultan bertahta sebagai Gubernur DIY idealnya adalah sosok pemimpin perubahan. Ia bukan seorang yang anti perubahan aatau malah berpikiran berjalan mundur. Ia harus progresif, transformatif, inovatif, dan kreatif. Namun di dalam melancarkan perubahan itu ia tidak meninggalkan budaya sendiri bahkan melestarikan dan menjadikannya unggul. Semangat perubahan juga dilancarkan dengan santun, etis, dan merangkul semua pihak untuk berkolaborasi.

Kedua, Sultan bertahta sebagai Gubernur DIY idealnya adalah pemimpin yang menegaskan Keistimewaan DIY. Ketegasan itu perlu selalu dinyatakan dalam mengelola hubungan DIY dengan Pemerintah Pusat (Negara RI). Penegasan merupakan sikap kultural dan konstitusional untuk menjaga keberlanjutan DIY di dalam NKRI.

Ketiga, Sultan bertahta sebagai Gubernur DIY idealnya adalah pemimpin yang memihak rakyat. Keberpihakan pada rakyat harus merupakan totalitas kepemimpinan seorang Sultan. Dalam hal inilah Keistimewaan DIY menjadi perwujudan dan “demokrasi substansial” yang nyata. Keberpihakan pada kepentingan rakyat itu harus lebih unggul dan nyata dibanding dengan apa yang terjadi secara artifisial di dalam praktek “demokrasi prosedural”.

Keempat, Sultan bertahta sebagai Gubernur DIY idealnya adalah pemimpin lokal yang berkontribusi besar bagi bangsa dan negara. Keistimewaan DIY di dalam sejarah adalah keistimewaan Yogya dalam berdampak bagi keselamatan bangsa dan negara. Keistimewaan DIY jangan “terbonsai” atau “terkerdalkan” mejadi keistimewaan untuk dirinya sendiri. Yogya Istimewa untuk Indonesia.

Kelima, Sultan bertahta sebagai Gubernur DIY idealnya adalah pemimpin yang menjadikan Keistimewaan DIY sebagai model nasional. Dengan

demikian Sultan sebagai Gubernur harus bisa membawa DIY memiliki pencapaian-pencapaian unggul sehingga DIY menjadi contoh bagi pembabgunan daerah-daerah lain. Yogya istimewa karena memang spesial dalam arti unggul dibanding daerah-daerah lainnya.

Keenam, Sultan bertakhta sebagai Gubernur DIY idealnya adalah pemimpin visioner yang mendorong Keistimewaan DIY berkarya peradaban yang besar yang berdampak global. Yogya istimewa mendunia. Keistimewaan Yogya menjadi mercusuar dunia, memberi pengaruh perubahan, dan mengeksport SDM-SDM unggul ke seluruh dunia, mensuplai gagasan-gagasan pembaruan, dan menginjeksi dunia dengan nilai-nilai luhur. Keistimewaan Yogya harus berpengaruh sampai di skop negara dan mancanegara untuk ukuran global masa kini dan masa depan.

## Penutup

Uraian dalam buku ini telah menjawab tiga pertanyaan yang diajukan pada bagian Pendahuluan. Pertama, karakteristik kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X sangat kuat dan mempunyai kesamaan. Karakteristik kepemimpinan Sultan HB IX terletak pada kekuatannya dalam (1) memimpin perubahan, (2) mendukung pendirian Negara RI, (3) menegaskan Keistimewaan DIY, (4) menyelamatkan Negara RI, (5) mengatasi masa krisis, (6) memimpin bangsa dengan memberi contoh, menjadikan DIY sebagai model, (7) memihak rakyat, (8) memimpin dengan visi global. Sedangkan karakteristik kepemimpinan Sultan HB X adalah keunggulannya dalam hal (1) meneguhkan tahta untuk rakyat, (2) memimpin perubahan, (3) memihak rakyat, (4) merajut keindonesiaan dengan menjadikan DIY sebagai contoh atau model, (5) menegaskan Keistimewaan DIY, (6) mengimplementasikan Keistimewaan DIY, dan (7) memimpin DIY dengan visi global.

Kedua, mengenai dinamika Keistimewaan DIY mengalami pasang surut di masa kepemimpinan Sultan HB IX dan di masa kepemimpinan Sultan HB X. Selama masa kepemimpinan Sultan HB IX, Keistimewaan DIY (1) dihormati oleh Pemerintah Pusat, (2) ditegaskan oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII, (3) dipimpin oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII, (4) berkontribusi besar menyelamatkan Republik

Indonesia, (5) diatur pembentukannya dalam undang-undang yang masih belum lengkap, (6) nyaris akan dihapuskan dengan alasan penyeragaman pemerintah daerah. Sedangkan dinamika Keistimewaan DIY dalam kepemimpinan Sultan HB X adalah (1) pernah mengalami ketidakjelasan setelah wafat Sultan HB IX (1988) dan setelah Sultan HB X naik tahta (1989), (2) berkontribusi besar memperkuat Gerakan Nasional Reformasi 1998, (3) dibela oleh rakyat dengan berulang kali mengukuhkan Sultan dan Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wagub DIY, (4) diperjuangkan oleh rakyat dan pemerintah DIY, (5) diatur dalam undang-undang yang lengkap (UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY), (6) diimplementasikan dalam program-program pembangunan.

Ketiga, kesamaan karakteristik kepemimpinan Sultan HB IX dan Sultan HB X menjadi model kepemimpinan Sultan yang ideal dalam Keistimewaan DIY. Dari perbandingan antara keduanya setidaknya kita menemukan lima keunggulan kepemimpinan beliau berdua yaitu sebagai (1) pemimpin perubahan, (2) pemimpin yang menegaskan Keistimewaan DIY, (3) pemimpin yang memihak rakyat, (4) pemimpin lokal yang berkontribusi besar bagi bangsa dan negara, (5) pemimpin yang menjadikan Keistimewaan DIY sebagai model nasional, (6) pemimpin visioner yang mendorong Keistimewaan DIY berkarya peradaban yang besar yang berdampak global.

## Daftar Pustaka

- Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah DIY. 2018. *Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017*. Yogyakarta: Pemda DIY.
- Atmakusumah (ed). 1982. "Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX". Jakarta: PT Gramedia.
- Baskoro, Haryadi; Sudomo Sunaryo. 2010. *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baskoro, Haryadi; Sudomo Sunaryo. 2011. *Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik*. Yogyakarta: Galang Press,
- Buwono X, Sri Sultan Hamengku. 2007. "Merajut Kembali Keindonesiaan Kita". Jakarta: Gramedia.
- Dahana, A, dkk. 1988. "Sri Sultan, Hari-hari Hamengku Buwono IX, Sebuah Presentasi Majalah Tempo". Jakarta: Grafifi Press.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Nusa Media
- Nusantara, A. Ariobimo (ed). 1999. "Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan

Tahta untuk Rakyat". Jakarta: PT Gramdia Widiasarana Indonesia.

Poerwokoesoemo, Sudarisman. 1984. "Daerah Istimewa Yogyakarta". Yogyakarta:

Gajah Mada University Press.

Purwadi. 2007. "Sistem Pemerintahan Kerajaan Jawa Klasik". Medan: Pujakesuma.

Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Soemarjan, Selo. 1981. "Perubahan Sosial di Yogyakarta". Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

Sujamto. 1988. "Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Jakarta: Bina Aksara.

Tashadi, dkk. 1995. "Buku Kenangan 50 Tahun Reoublik Indonesia di Yogyakarta:

Sebuah Lintasan Sejarah". Yogyakarta: Panitia Gabungan Peringatan HUT ke-50

Kemerdekaan RI.

Yudahadiningrat dkk, 2018. *Ilmu Kaweruh Pawiyatan Pamong Jogja Istimewa untuk*

*Indonesia*. Yogyakarta: Pawiyatan Pamong.

# Lampiran 1:

## Pidato Jumenengan

### Sri Sultan Hamengku Buwono X

Assalamualaikum Wr Wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Para tamu undangan dan hadirin yang terhormat.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para Tamu Undangan yang terhormat, yang telah berkenan memberikan doa restu serta ucapan selamat dalam Upacara Jumenengan pada hari ini. Adalah juga suatu kehormatan teramat besar, khususnya bagi diri saya pribadi atas kehadirannya untuk ikut menyaksikan rangkaian upacara tradisi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Hari ini adalah saat yang sangat membahagiakan bagi saya sekeluarga beserta segenap Kerabat Kraton Yogyakarta. Dalam mensyukuri kebahagiaan itu, diharapkan juga mengandung pesan dan makna. Mudah-mudahan Jumenengan ini bermakna tidak saja bagi Kerabat Kraton Yogyakarta, akan tetapi juga dapat memberikan makna yang lebih luas. Setidak-tidaknya dalam memberi isi bagi peneguhan citra Yogyakarta sebagai kota budaya.

Adalah wajar, apabila kemudian timbul pertanyaan: “Adakah arti dan makna Jumenengan dalam suatu negara republik yang telah merdeka dalam era pembangunan ini?” Bahkan mungkin masih banyak lagi ragam pertanyaan yang dapat diajukan. Apabila pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada masyarakat, saya yakin pendapatnya pun akan berbeda-beda. Adalah juga wajar, jikalau momentum ini menjadi pusat perhatian dan penilaian masyarakat.

Kedudukan seorang Sultan di lingkungan Republik Indonesia adalah realita, yang didasarkan atas tekad rakyat melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, yang telah tersurat dan tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kaitan itu, saya pun ingin mawas diri dengan bertanya pada diri sendiri: “Buat apa sebuah tahta dan menjadi Sultan, apabila tidak memberi manfaat bagi masyarakat?” Jawaban atas pertanyaan, yang senantiasa mengusik hati nurani saya itu, merupakan pertanggungjawaban saya dalam kesadaran berbangsa dan bernegara.

Para Tamu Undangan serta hadirin yang terhormat.

Jaman telah berubah, dimensi waktu telah membuat jarak, apa yang saya dan Ayahanda Hamengku Buwono IX hidupi. Totalitas jiwa raga yang dicurhkannya bagi Republik Indonesia sebagai jawaban atas Piagam Kedudukan yang ditetapkan oleh Presiden Republik

Indonesia itu, telah mendapat pengakuan masyarakat sebagai “Tahta untuk Rakyat”. Apabila masyarakat mengharapkan hal yang sama, tentu saja tidak mungkin saya dapat lakukan hal yang sama, sebagaimana Bapak dan Guru itu telah mencurahkan.

Hamengku Buwono IX naik tahta pada masa gerakan kebangsaan. Sebagai Hamengku Buwono di masa pembangunan, lalu apa amanat dan maknanya? Dengan memahami amanat para leluhur atas makna Hamengku Buwono, menyandang tiga substansi yang bersumber dari makna Hamangku, Hamengku, dan Hamengkoni.

Dengan penuh kesadaran kita mengamati, masih banyak bagian masyarakat yang berada dalam serba kekurangan dan keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupannya. Untuk mengangkat harkat dan martabat mereka itu, diperlukan pengabdian tanpa pamrih.

Membesarkan hati dengan “lebih banyak memberi daripada menerima”, hakikat dari berbudi bawa laksana itulah, makna Hamangku diaktualisasikan.

Hamengku, mengandung makna hangrengkuh atau ngemong, melindungi, dan mengayomi tanpa membeda-bedakan golongan, keyakinan, dan agama secara adil. Hakikat Hamengku identik dengan ambeg adil paramarta.

Dalam masyarakat tradisional, selalu terdapat hubungan kepemimpinan yang patrimonial. Dalam situasi sulit, pemimpin adalah juga pengayom, yang siap berdiri paling depan. “ing ngarso sung tulodho”, menjadi panutan dan tampil mengambil tanggungjawab dengan segala resikonya. Keteladanan yang mengandung watak gung binathara itu, adalah esensi dari Hamengkoni.

Dengan segenap jiwa raga, saya akan mencurahkan untuk mewarisi api semangat dan makna yang tersandang dalam nama Hamengku Buwono itu, lebih dari sekedar pewaris tahta dan kedudukan Sultan.

Para Tamu Undangan serta hadirin yang terhormat.

Jikalau Hamengku Buwono IX berjanji untuk bekerja memenuhi kepentingan nusa dan bangsa dengan tetap mempertahankan harmoni tradisi Kraton, apa janji Hamengku Buwono X? Janji harus diawali dengan tekad dan niat. Namun tekad dan niat itu, masih diperlukan kearifan yang mampu menangkap dinamika aspirasi masyarakat.

Kendatipun saat ini kita sudah mulai menuju ke masyarakat industri, nampaknya penerapan pada kepemimpinan patrimonial yang masih cukup relevan. Pada masa lalu sistem patrimonial ini telah merasuk ke dalam struktur monarki. Pada saat Indonesia merdeka, seakan-akan terjadi perbenturan nilai antara pemimpin informal monarki dengan pemimpin formal birokrasi,

karena keduanya sama-sama menganut asas patrimonial. Pernyataan Hamengku Buwono IX untuk “sanggup berdiri di belakang pimpinan Republik Indonesia” dalam telegram tanggal 20 Agustus 1945, telah mengakhiri situasi dualisme dalam sistem kepemimpinan patrimonial nasional.

Pada jaman Sultan Agung, telah dibangun konsep dasar kebudayaan Jawa yang khas. Setelah dikembangkan oleh Hamengku Buwono I dan Hamengku Buwono IX, telah menjadi dasar kebudayaan Kraton. Oleh sebab itu, Kraton mendapat pengakuan sebagai Pusat Kebudayaan. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan dan dibangun oleh Pangeran Mangkubumi I, yang jumeneng Sri Sultan Hamengku Buwono I, ditata berdasarkan wawasan integral, kosmofilosofis kejawen, mencakup dimensi spasial: lahir dan batin, serta temporal: awal dan akhir. Pada hakikatnya Pusat Kebudayaan yang berada di lingkungan Keraton dan terbuka bagi masyarakat luas, adalah untuk melestarikan konsep dasar serta gagasan Ngarsa Dalem Hamengku Buwono IX, menata Yogyakarta sebagai wadah miniatur Indonesia, dalam wawasan integral Budaya Nusantara.

Kebudayaan dapat menjadi sumber inspirasi, kreativitas, dan aspirasi masyarakat. Dengan sifatnya yang universal, sebatas angger-angger dan paugeran negara, maka “suara hati nurani rakyat” dapat diekspresikan dan didengar, di mana “yang benar

adalah benar, yang salah itu, adalah memang benar salah”. Karena memang, salah satu makna Hamengku adalah juga mau mendengarkan.

Sebagai pewaris tahta, yang menyandang misi seperti itu, saya berjanji akan tetap “Meneguhkan Tahta untuk Rakyat” bagi kelestarian dan kesejahteraan kehidupan sosial budaya rakyat. Dengan tekad seperti itu, cita-cita menjadikan Keraton sebagai pusat kegiatan dan pengembangan kebudayaan dalam harmoni tradisi adiluhung dengan dukungan semua pihak, mudah-mudahan dapat tercapai. Sebagai generasi penerus, saya ora mingkuh, untuk mengamalkan etos kejuangan pendiri Kraton. Pangeran Mangkubumi I.

Jikalau Sultan Agung Hanyokrokusumo berpendapat bahwa setiap orang serendah apapun derajat dan pangkatnya dalam praja ini dapat berbakti kepada bangsa, negara, dan rakyatnya, mengapa seorang Sultan tidak merasa terpinggil untuk Hamangku, Hamengku, dan Hamengkoni masyarakatnya di mana ia dibesarkan?

Para Tamu Undangan serta hadirin yang terhormat.

Maka jikalau boleh saya ketengahkan, Jumenengan yang diselenggarakan pada 7 Maret 1989, hari ini, mungkin dapat ditangkap dan dihayati sebagai Momentum Peneguhan Tekad “Tahta bagi kesejahteraan kehidupan sosial budaya rakyat”.

Satu tekad yang juga mengandung dua makna penting. Makna yang satu sama lain seolah tak terpisahkan, yaitu makna batiniah dan makna lahiriah. Makna batiniah berhubungan dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sendiri. Sedangkan makna lahiriah tidak terlepas dari status Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila Jumenengan dapat dianggap sebagai momentum kultural spiritual, tentunya juga diharapkan menjangkau dimensi yang lebih luas.

Demikianlah, kesemuanya itu adalah inti dari HAMENGKU BUWONO TEKADKU, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan meridhoinya.

Sekian, terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Maret 1989

HAMENGKU BUWONO X



## **Lampiran 2:**

**Bab 4 dari Buku “Merajut Kembali Keindonesiaan Kita”  
karya**

**Sri Sultan Hamengku Buwono X**

**Bab 4.**

**Studi Kasus:**

**Membawa Yogya ke Pentas Global**

Dalam forum kontak dagang, pameran produk ekspor, malam kolaborasi seni dan gelar seni-budaya Yogyakarta, baik yang bertema “Batik” maupun “Seni Rupa”, Yogya memang sudah mampu merambah pentas dunia. Banyak peminat seni kelas dunia berinteraksi dengan napas kebudayaan Yogya tersebut.

Itu membuktikan bahwa nilai seni tidak ditentukan oleh jenis dan bentuk ekspresi, atau oleh mediumnya, atau pun hanya milik bangsa tertentu, tetapi karena nilai kreativitasnya. Melalui ekspresi seni, seorang seniman mensublimasi kehidupan yang dihadapinya. Dalam mencipta, seorang seniman selalu berserah diri secara total terhadap profesi kesenimannya agar tidak terjebak menjadi sekadar tukang.

Menghadirkan bobot seni rupa, seni lukis khususnya, menuntut penguasaan teknik olesan atau guratan yang cermat. Misalnya, kekuatan garis yang memberi sugesti bentuk dan volume maupun warna

terang-gelap menjadikannya kekuatan pokok dan daya tarik seni lukis yang bernilai tinggi. Seorang seniman memang harus tak boleh menghindarkan diri dari semangat pembaruan. Oleh karena itu, konvensi buku pun bahkan merupakan suatu ketidakmungkinan, jika ingin menempatkan diri di barisan seniman sejati.

Kita memang selayaknya menghargai para seniman yang pada umumnya adalah kreator dan inovator seni yang berkarya karena tanggung jawab profesi dan panggilan jiwa. Mereka adalah manusia-manusia mandiri yang kreatif, orang-orang yang senantiasa melakukan olah seni dan olah kultural, bekerja keras dan ulet di kampung-kampung, di sanggar-sanggar, di padepokan secara diam-diam dan atas kemampuan sendiri, yang dihadapi hanya oleh rasa cinta seni dan dorongan berkreasi sebagaimana halnya kehidupan para seniman di Yogyakarta.

### **Metamorfosis Ruang Budaya ke Ruang Komersial**

Menurut Jeremy Rifkin, President Foundation on Economic Trends, Washington DC, dalam bukunya *The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism*, kehidupan manusia kini benar-benar telah terkomodifikasi – menjadi sebatas komoditas atau barang dagangan – di mana antara komunikasi, komuni, dan komersial pun menjadi tak terbedakan (Ibrahim, 2001),

Telah terjadi metamorfosis dari produksi industrial ke kapitalisme budaya yang menyebabkan pergeseran mendasar dari “ruang budaya” (*cultural sphere*) ke “ruang komersial” (*commercial sphere*), di mana semua pengalaman hidup tak lebih seperti halnya pasar komersial. Perubahan-perubahan media trans-nasional tengah menambang sumber daya kebudayaan lokal (*local cultural resources*) di setiap bagian dunia, dan mengemasnya kembali (*repackaging, recycling*) menjadi komoditas budaya dan hiburan global.

Dominasi Barat kian terasa dan begitu men-cengkeram, tidak hanya dalam bidang ekonomi melainkan juga budaya. Budaya, nilai, dan gaya hidup (*life style*) baru, kini begitu mudah merembes masuk lewat berbagai cara, lewat perdagangan dan ekonomi, terutama sebagai dampak globalisasi media.

Sebuah “Teater Global”

Dalam “teater global” ini semua orang menjadi pemain dalam drama kehidupan global yang membuat dunia menciut, jarak mengerut, ruang dan waktu lenyap, “Sebuah dunia global tanpa batas,” ujar Kenichi Ohmae dalam *The Borderless World*. Lenyapnya tapal batas itu begitu terasa ketika lalu lintas barang, informasi, dan manusia antartempat, antarnegara, dan antarbenua begitu cepat. Bisnis global, hiburan global, informasi global, dan budaya global, manusia global, dan budaya global telah menjadi keniscayaan.

Siapakah yang sesungguhnya menjadi penulis skenario, sutradara dan produser serta pemain utama di belakang layar “teater global” ini? Para pelaku utamanya tak lain adalah kapitalis global, yang bermain di balik kedigdayaan perusahaan-perusahaan transnasional yang telah menuliskan skenarionya dan sekaligus produsernya. Merekalah yang mengkonstruksi kebutuhan, mendiktekan selera atau gaya hidup, dan menentukan desain kebudayaan global yang cenderung serba seragam (*homogenized*). Bahkan, sering kali ditiru secara membabi-butakan oleh para konsumen budaya yaitu masyarakat Dunia Ketiga. Cengkeraman gurita kapitalisme global itu kian menghujam lewat media komunikasi terutama televisi dan internet.

Kapitalisme global telah memoles dunia menjadi seperti sebuah panggung kehidupan, tempat segala hal menjadi tak lebih dari seonggok komoditi atau mata dagangan. Ketika semua hal menjadi komoditi, tak hanya cinta, tak pula kesetiaan, tidak juga nilai-nilai, semua aspek kehidupan terserap ke dalam pemujaan kebendaan, yang mengembangbiakkan ideologi materialisme. Itulah paham yang menjadikan kriteria kehidupan berdasarkan ukuran kebendaan atau kepemilikan, bukan kekayaan rohani dan kesederhanaan seperti yang diajarkan oleh agama-agama langit.

## Homogenisasi Budaya

Produser budaya dan gaya hidup global yang menjadi pengemas industri hiburan seperti MTV dan Hollywood atau perekayasa mode Paris, kini menjadi penentu selera bagi kebanyakan orang kaya dan anak-anak muda di seluruh penjuru dunia. Sebagai agen yang mengkonstruksi industri budaya massa yang disebarakan lewat media global telah menjadi “pabrik mimpi” bagi masyarakat Dunia Ketiga. Pada saat mereka menawarkan hiburan-hiburan global, telenovela atau telatina “Betty la Fea” misalnya, juga menawarkan gaya hidup, budaya, dan nilai bagi anak-anak muda yang tengah gelisah mencari identitas diri.

Apa bedanya gaya pakaian, corak rambut, asesoris tubuh anak-anak muda yang kini tengah menghuni kota-kota di China, Hong Kong, Singapura, Jepang, atau Indonesia? Apalagi kalau kita sejenak melihat acara-acara pentas musik rock, atau saat mereka mejeng di mal-mal, atau bahkan di kampus-kampus yang kini mulai menjadi bagian dari panggung pementasan gaya hidup yang serba homogen. Kalau homogenisasi dalam dunia pendidikan memasang kreativitas, maka homogenisasi budaya tengah mengancam kebhinnekaan atau pluralisme budaya sebagai ruhnya ke-Indonesia-an.

## “Budaya Indo”

Globalisasi menyediakan sebuah tempat yang lapang bagi konstruksi identitas, pertukaran benda-benda, simbol-simbol dan pergerakan antartempat yang semakin mudah, yang dikombinasikan dengan perkembangan teknologi komunikasi, membuat percampuran dan pertemuan budaya juga semakin mudah. Dalam globalisasi, kebudayaan dan identitas bersifat translokal, yang tidak lagi cukup jika dipahami dalam *term* tempat, tetapi lebih tepat jika dikonseptualisasikan dalam *term* perjalanan.

Dalam konsep ini tercakup budaya yang selalu dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, seperti halnya Clifford Geertz memersepsi kebudayaan sebagai *sites of cross-crossing travelers* (1992). Ide tentang instabilitas kebudayaan dan identitas dalam globalisasi membawa pada pemahaman bahwa kebudayaan dan identitas selalu merupakan pertemuan dan percampuran berbagai kebudayaan dan identitas yang berbeda-beda. Inilah yang disebut hibriditas kebudayaan dan hibriditas identitas. Batas-batas kebudayaan yang mapan dikaburkan dan dibuat tidak stabil oleh proses hibridasi.

Dalam subkultur anak muda, hibriditas ini misalnya tampak sebagai hasil internasionalisasi musik (rock, rap, metal), internasionalisasi merek (MTV, Nike, Levi's, Coca-Cola), internasionalisasi hiburan (AFI, Indonesian Idol, KDI). Di sini gaya menjadi aparatus identitas anak

muda yang terpenting dan karena itu menjadi arena hibridasi yang utama. Musik rap dinyanyikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa (Iwa K, Denada), gemar menonton Ketoprak Humor sekaligus MTV Unplugged, kaos bergambar klub-klub NBA atau klub sepakbola Liga Italia dan Inggris. Mana yang Indonesia dan yang bukan Indonesia tidak lagi penting karena gaya adalah yang utama.

Gejala ini diandaikan sebagai fenomena “budaya indo” – yang oleh Antarksa dinamakan proses kreolisasi. Elemen-elemen kebudayaan lain diserap, tetapi dipraktikkan dengan tidak mempertimbangkan makna aslinya. Konsep kreolisasi memberikan cara berpikir alternatif, yang berbeda dari konsep imperialisasi budaya (Tomlinson, 1991) yang menganggap Barat mendominasi budaya Timur. Konsumen Dunia Ketiga sebenarnya tidaklah pasif karena menciptakan makna-makna baru bagi benda-benda dan simbol-simbol yang mereka konsumsi dari produk budaya Barat,

Homi Bhabha (1994) mengajukan konsep mimikri untuk menggambarkan proses peniruan atau peminjaman berbagai elemen kebudayaan. Menurutnya, mimikri tidaklah menunjukkan ketergantungan sang penjajah kepada yang dijajah, atau misalnya ketergantungan kulit berwarna kepada kulit putih, tetapi peniru menikmati dan bermain dengan ambivalensi dalam proses imitasi ini.

Hal ini terjadi karena mimikri selalu mengindikasikan makna yang “tidak tepat” dan “salah tempat”, ia imitasi tetapi juga subversi. Dengan begitu mimikri bisa dipandang sebagai strategi menghadapi dominasi. Seperti halnya penyamaran. ia bersifat ambivalen, melanggengkan, tetapi sekaligus menegaskan dominasinya. Itulah dasar sebuah identitas hibrida (Antariksa).

### **Inkorporasi Budaya**

Berbeda dari mimikri, inkorporasi budaya merujuk pada suatu proses sosial, di mana kelas yang dominan mengambil elemen-elemen kebudayaan kelas subordinat. Mula-mula kelas yang dominan menginkorporasikan sifat-sifat perlawanan kelas subordinat ke dalam ideologi dominan, untuk selanjutnya menghilangkan sifat-sifat perlawanan itu.

Awalnya *rock n roll* bagi fansnya juga punya makna perlawanan, tetapi kemudian diinkorporasikan ke dalam gerakan ekologi dan antipolusi. Dengan begitu, inkorporasi telah menopengi fakta bahwa kapitalisme adalah penyebab utama terjadinya polusi. Demikian juga, bagaimana kesadaran lingkungan dikerangkakan atas rumah-rumah mewah di daerah pegunungan yang berhalaman luas, dipenuhi tanaman. Sesungguhnya mereka bukanlah keluarga yang sadar lingkungan, tetapi keluarga yang konsumtif dan terkomodifikasi (Antariksa).

Sungguh menarik rekonstruksi Nyoman Wirata (*Bali Post*) betapa hiruk-pikuk sekaligus menantanginya sebuah masyarakat pasar yang diakibatkan oleh globalisasi. Manusia pasar dihadapkan pada suatu keadaan di mana orang mau tidak mau harus melakukan tawar-menawar, sampai-sampai harga diri pun ditawarkan. Orang-orang berkejaran, sebelum jam empat pagi telah memasuki pasar. Bagai kunang-kunang yang membangun obor bergerak ke satu titik pasar. Usapan embun pedusunan yang dingin dan lembut tergantikan oleh usapan hawa peluh badan kota yang pengap. Serupa got yang mampat dan sampah yang tertunda diangkut mobil kebersihan, adalah lingkungan yang membangun gairah baru menuju pasar.

### **Budaya Pasar: Naluri Kalah-Menang**

Sungguh luar biasa patriotiknya dalam membela naluri pasar. Di kota-kota bermunculan pasar yang bergerak menjadi bangunan ruko, supermarket, hypermall, factory outlet, atau pasar-pasar pembelanjaan yang megah. Betul juga, kita tidak bisa keluar dari pasar yang mengurung. Bahkan, akan ada kecurigaan, kalau kita mengatakan berada di luar pasar. Tidak terkecuali, jika menyebut dirinya seniman, politisi, spiritualis, dukun, dan lain-lain. “Tidak ada yang bebas dari aku,” kata pasar dengan begitu congkaknya, Yang berkilap wujudnya dan yang rombeng, juga sama-sama merasa memiliki pasar.

begitu congkaknya, Yang berkilap wujudnya dan yang rombeng, juga sama-sama merasa memiliki pasar.

Kalau ada anak-anak berteriak berhamburan dari pintu gerbang sekolah dengan ijazah di tengah, itu teriakan kebebasan sementara. Di jaringan sarafnya sudah ada bentuk pemikiran dalam taraf awal memikirkan tentang pasar. Pasar telah membangun semangat luar biasa tanpa perlu diberi retorika, dan kemudian membangun dengan sendirinya sebuah cara berpikir yang melestarikan budaya pasar. Pasar memberikan pemahaman tentang realitas tantangan dalam jarak dekat. Itulah hebatnya manusia pasar, ketika dia melihat realitas kehidupan sebagai pertarungan jarak pendek dengan naluri kalah-menang.

Manusia pasar tak selalu harus berarti mengalahkan kreativitas seorang seniman jika kreativitas dibenturkan dengan pasar. Pasar adalah realitas kehidupan dan seniman dituntut memiliki keberanian menghadapi realitas, sekaligus mengembangkan nilai kebenaran dalam ekspresinya. Ekspresi itu adalah sesuatu yang indah, mungkin sebuah puisi, lukisan, nyanyian, atau pun komposisi musik, bahkan mungkin, sebuah keindahan tak berwajib.

### **Market for Care**

Di era *dream society* masih ada satu jenis pasar sebagai kebutuhan terhadap budaya produktif. Namanya adalah *the market for care*, permintaan

untuk menolong mereka yang mengalami kesulitan, penderitaan kaum duafa, yang menjadi tidak produktif. Tetapi ada yang sifatnya substitutif yang cenderung merusak, yaitu menciptakan ketergantungan atau bahkan mengorganisasi kekuatan emosional untuk kepentingan tertentu yang tidak produktif. Misalnya, pemanjaan UKM lewat program-program yang bersifat *charity*.

Kalau ingin menjadi bangsa produktif, kita jangan bertindak populis merusak budaya produktif. Para usahawan harus punya sistem insentif untuk terus menggerakkan mereka yang produktif. Orang-orang muda hendaknya bisa lebih memilih dalam bersimpati kepada “mereka yang kalah”. Empati harus didasarkan pada prinsip produktivitas, bukan ketergantungan, kecuali kepada mereka yang memang benar-benar sangat membutuhkannya.

Secara umum terdapat dua paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aplikasinya pada industri (Jenie, 1991). Pertama, dianut negara-negara Eropa dan Amerika yang memulai perkembangan teknologi dari temuan di bidang sains dasar: matematika, fisika, kimia dan biologi, baru kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk teknologi. Prasyarat bagi pengembangan teknologi dengan paradigma ini adalah adanya tradisi matematika yang kuat.

Kedua, dianut negara-negara dengan tradisi matematika yang tidak terlalu kuat, tetapi memiliki tradisi, rekayasa yang kuat seperti Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong, China. Melalui paradigma ini, pengembangan teknologi dilakukan dengan meniru teknologi yang sudah ada.

### **Produk Ekspor Berbasis Craftmanship**

Dengan melihat tradisi kepengrajinan (*craftmanship*) yang kuat pada bangsa Indonesia, khususnya Yogyakarta, paradigma kedua ini lebih cocok diterapkan. Kendati demikian, riset ilmu-ilmu dasar termasuk matematika dan IPA (fisika, kimia, biologi) tetap diperlukan untuk pengembangan teknologi-teknologi baru, seperti bioteknologi, teknologi informasi, dan lain-lain.

Dalam hal ini jalur yang paling mudah dan cepat adalah melalui rekayasa berbalik (*reverse engineering*), yaitu rekayasa yang dilakukan dengan cara membongkar barang modal yang masuk untuk kemudian meniru dan memasangkannya kembali, sebagaimana Jepang melakukannya dengan sukses, yang telah mengantarkannya menjadi negara maju.

Yogyakarta, dengan potensi unggulannya pada seni kerajinan memiliki potensi yang bisa diterapkan dalam model kedua transfer teknologi yang berbasis pada keteampilan *craftmanship*. Dengan kreativitasnya, para seniman perajin yang menghasilkan barang-barang

lerajinan yang *sophisticated* diharapkan menarik minat calon *buyers* yang mengikuti *buyers sellers meeting* yang dikemas dalam Kontak Dagang.

### **Modal Budaya dan Modal Sosial**

Upaya menggali dan mensosialisasi serta mengkulturasikan tata nilai luhur perlu terus ditingkatkan. Upaya-upaya itu juga harus didukung dengan memperluas aplikasi modal budaya dan modal sosial sebagai sumber daya Yogyakarta yang mampu ditransformasikan menjadi nilai tambah. Dengan terbatasnya sumber daya ekonomi, pengembangan modal budaya dan modal sosial adalah langkah strategis mengingat keduanya dapat berperan sebagai komplemen maupun substitusi dari keterbatasan modal ekonomi.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mentransformasikan modal budaya dan modal sosial tersebut agar menjadi nilai tambah ekonomi melalui pengembangan berbagai aplikasinya dalam model pembangunan ekonomi regional. Dengan demikian, kedua modal tersebut dapat dikelola sebagai sumber pertumbuhan ekonomi serta terus-menerus dan lestari, tidak sekedar bersifat temporal saat bencana krisis atau hanya mampu bertahan dalam masyarakat komunal terbatas di Yogyakarta saja.

Sikap saling percaya dan rasa kebersamaan merupakan elemen inti dari *cultural resources* dan

*social capital* warga Yogya, baik yang masih tinggal maupun yang bermukim di Jakarta, Kedua *intangible capital* itu berpotensi besar untuk ditransformasikan menjadi *added value* ekonomi. Kedua modal itu dapat diterapkan berwujud tindakan kesetiakawanan, kerja sama kemitraan, dan gotong-royong di berbagai bidang kehidupan dalam semangat “Yogyakarta Incorporated”, sekaligus “Membawa Yogyakarta ke Pentas Global”. Oleh sebab itu gelar seni dan budaya perlu dihidupkan terus guna mengakselerasi masuknya Yogya ke pentas dunia.

Langkah itu juga berarti memberikan referensi spiritual, nilai-nilai ideal, dan rujukan alternatif serta perspektif kehidupan yang lebih kaya warna di tengah suasana metropolis yang sangat sesak oleh perilaku dan orientasi material yang sering justru tidak apresiatif pada nilai-nilai budaya.

### **Kembangkan Kebudayaan Progresif**

Kebudayaan Indonesia Baru yang harus kita bangun, jika bangsa ini ingin berkembang maju mengejar ketertinggalannya, hendaknya mencoba mengimplementasikan gagasan Sutan Takdir Alisyahbana (1982). Menurut pendapatnya, Kebudayaan Nasional Indonesia yang berakar pada kebudayaan-kebudayaan daerah yang lebih bersifat ekspresif, harus dikembangkan aspek progresifnya dengan mempertajam rasio agar siap mengambil alih dinamisme Barat yang berbasis pada ilmu dan teknologi.

Dalam konteks Yogyakarta, usia Kraton Yogyakarta yang panjang dalam meniti sejarahnya (lebih dari 258 tahun), dalam batas-batas tertentu juga menyiratkan hidupnya budaya progresif. Namun, perjalanan para budayawan, seniman, dan industriawan beserta karya seni dan produk kerajinannya telah dimulai jauh sebelum itu, bahkan sebelum masyarakat Nusantara menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia.

### **Kebudayaan dan Teknologi**

Dalam era kesejagatan di mana suatu bangsa oleh kekuatan industri dan teknologi diarahkan menjadi bagian dari suatu sistem yang disebut *free-trade*, kesenian dapat merupakan alternatif agar tidak terjadi dehumanisasi global. Kekalahan kebudayaan oleh teknologi akan membuat kehidupan menjadi kering. Ketika itulah manusia membutuhkan simbol-simbol baru yang mampu mendorong perubahan ke arah nilai-nilai manusiawi lagi. Seniman oleh dorongan perasaan kebebasan kreatifnya, diharapkan bisa menghasilkan karya-karya seni yang dapat memberi wawasan alternatif sebagai wacana kreatif untuk mengkritisi situasi kontemporer.

Dalam situasi yang demikian, menjadi sangat pentinglah peranan pengembangan kesenian agar di masa depan tetap mampu menjadi referensi yang memadai dalam kehidupan. Etika dan estetika yang sangat kental tercermin dalam karya-karya seni merupakan pendidikan kejiwaan dalam menghadapi revolusi teknologi di masa depan.

“Gelar seni dan Budaya Yogyakarta” akan melahirkan suatu perubahan dan keseimbangan yang diperlukan dalam hidup jika kekuatan berkesenian tersebut didampingi oleh religiositas yang tinggi. Itulah tantangan riil masa depan jagat kesenian dan kerajinan kita. Tanpa itu, kita bukan saja tidak akan mampu memasuki pentas di pasar global tetapi juga kehilangan ruh berkesenian yang sebenarnya.

Yogyakarta selalu terbuka bagi setiap gelar seni budaya, baik yang klasik dan kontemporer maupun gelar seni etnis-etnis nusantara dan seni budaya dari mancanegara. Yogyakarta seakan sebuah jendela budaya di mana kita bisa melihat perkembangan ragam budaya dunia, juga sebagai pintu budaya yang terbuka bagi penyemaian kreativitas dan pengembangabn budaya-budaya etnis nusantara. Bagi orang yang berpikir sederhana, analognya adalah “Yogyakarta adalah asrama mahasiswa”. Berbagai asrama mahasiswa ada di sini : Riau, Minang. Medan, Flores, dan lain-lain. Itu artinya karakteristik Yogyakarta adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ibarat sup, ia kaya rasa. Tatkala dinikmati pasti lezat. Itulah harmoni kehidupan bermasyarakat yang sejati.

## **Lampiran 3:**

**Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Pemaparan Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
Tahun 2017-2022 (Yogyakarta, 2 Agustus 2017)**

Assalamualaikum Wr Wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang Paripurna DPRD DIY yang saya hormati.

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridho-Nya, sehingga pada hari ini Rabu Wage tanggal 2 Agustus 2017 kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat hadir pada majelis yang sangat mulia ini, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka mengawali dan memberikan gambaran arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, ijinkanlah dalam kesempatan ini saya menyampaikan pemikiran-pemikiran ke depan yang merupakan sambungan atau rangkaian dari pemikiran jangka panjang dari lima tahun sebelumnya yang pernah tertuang dalam Visi dan Misi Gubernur Tahun

2012-2017 yang pada waktu itu meletakkan konsep “Renaissance Yogyakarta” sebagai landasan pijak arah pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kurun waktu lima tahun yang lalu.

Renaissance adalah kelahiran kembali masa keemasan budaya klasik. Renaissance adalah revolusi budaya antitesa terhadap kakunya pemikiran dan tradisi abad silam. Fahaman rasionalismenya dipilih untuk melahirkan Gerakan Jogja Gumregah untuk melepaskan diri dari kungkungan mitologi dan kejumudan dogmatis, melalui proses gumregahnya kebudayaan ke tingkat kebudayaan yang unggul.

Peradaban unggul, pada masa lalu telah menunjukkan bukti mampu menegakkan nilai-nilai keluhuran, keutamaan, dan jati diri Yogyakarta. Namun pada saat ini, ketiga karakteristik Jogja ini tidak lagi menjadi penuntun gerak bermasyarakat-bangsa, tindak pemimpin, kerja birokrasi, dan dinamika kehidupan elemen warga untuk menuju kemartabatan yang istimewa. Sudah semestinya Keistimewaan Yogyakarta adalah untuk Indonesia. Bahwa menjadi Jogja, adalah menjadi Indonesia.

Renaissance, Jogja Gumregah, Jogja Istimewa dapat menjadi wahana penggerak masyarakat menuju ke peningkatan dimensi nilai, pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada

nilai “trust”, dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan.

Sangat disadari bahwa dalam lima tahun ke belakang, telah banyak hal dicapai melalui strategi “Renaisans Yogyakarta”, namun juga harus diakui pula bahwa beberapa hal juga belum sempat dicapai melalui strategi tersebut. Untuk itulah, dalam lima tahun ke depan, spirit dari konsep “Renaisans Yogyakarta” secara konsisten tetap akan dipelihara , namun substansi dan penekanannya akan disesuaikan dengan perkembangan jaman dan prediksi atas kondisi-kondisi yang sekiranya akan terjadi dalam kurun lima tahun ke depan. Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, maka visi gubernur dalam lima tahun mendatang (2017-2022)

“Menyongsong abad Samudera Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja”

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang misi “Lima Kemuliaan” atau “Pancamulia” yakni (1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan, dan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing, (2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori dan

ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, (3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan, (4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, dan (5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **.I. LATAR BELAKANG PENENTUAN TEMA “ABAD SAMUDERA HINDIA”**

Sidang Paripurna DPRD DIY yang saya muliakan.

Mengenai pemilihan tema “Abad Samudera Hindia” yang dikatakan sebagai visi gubernur 2017-2022, dilandari latar belakang sebagai berikut:

### **.1. Fenomena IORA (Indian Ocean Rim Association)**

IORA atau Indian Ocean Rim Association (Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia) adalah asosiasi yang digagas oleh Nelson Mandela saat kunjungannya ke India pada bulan Maret 1995, yang dua tahun kemudian yakni pada Maret 1997 resmi berdiri menjadi organisasi dunia yang penting dan dihormati dengan nama Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation dan kemudian berubah nama dipersingkat menjadi Indian Ocean Rim Association (IORA, 2017). Asosiasi ini memiliki anggota dari negara-negara yang memiliki pantai yang disentuh dan disatukan oleh air laut Samudera Hindia, yang mencakup negara-negara ASEAN, Ausrealia, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Asosiasi ini telah membuat kesepakatan-kesepakatan kerjasama di bidang perikanan, energi kelautan, pelabuhan dan pelayaran, mineral dasar laut, bioteknologi kelautan, pariwisata, perdagangan, investasi, dan ekonomi.

Dalam pidatonya yang disampaikan di Wilson Center, Washington DC pada 22 September 2015, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menekankan peran penting Samudera Hindia sebagai episentrum kekuatan dunia di abad ke-21.

“Dari sudut pandang strategi, abad ke-19 ditentukan oleh Samudera Atlantik, abad ke-20 oleh Samudera Pasifik, dan abad ke-21 ditentukan oleh Samudera Hindia.... Samudera Hindia menjadi tempat tinggal bagi 2,6 miliar orang atau dua perlima jumlah penduduk dunia....strategi maritim Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi harus mampu menjadi episentrum dunia, sepertiga lalu lintas kargo, dan dua pertiga pengiriman minyak dunia melalui jalur Samudera Hindia.” (Marsudi, 2015).

## .2. Fenomena Kra-Canal atau Thai-Canal Project

Kra-Canal Project (Terusan Kra di Thailand) adalah suatu proyek terusan raksasa yang mirip dengan Terusan Suez dan Terusan Panama yang akan menyudut leher semenanjung Thailand-Malaysia untuk menghubungkan perairan laut Andaman dengan perairan laut Teluk Thailand sehingga memperpendek jarak pelayaran dari belahan bumi bagian barat ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan China (Abdul Rahmat, et.al, 2016). Presiden Xi pada saat berpidato di depan parlemen Indonesia pada tahun 2013 mengangkat fenomena ini menjadi konsep “21st

Century Maritime Silk Road” atau “Jalur Sutera Maritim Abad 21” dan pada bulan Januari 2017 raja baru Thailand Vajiralongkorn mengindikasikan proyek ini segera dibangun (Billington, 2017, Larouche, 2017). Dampak dari Kra-Canal terhadap peta intensitas lalu lintas pelayaran di perairan Asia Timur dan Asia Tenggara tentu akan sangat berarti dan khusus untuk perairan Indonesia akan berdampak pada meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II (Alur Laut Kepulauan Indonesia II) yang mencakup Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Meningkatnya intensitas ALKI-II tentu akan membawa dampak pada meningkatnya intensitas pelayaran silang antara Asia-Australia dan Samudera Hindia – Samudera Pasifik. Pada posisi seperti itulah peran kawasan-kawasan di wilayah Pulau Jawa Bagian Selatan menjadi sangat penting terutama dalam penyediaan jasa pelabuhan, energi, perikanan, dan pariwisata.

### .3. Fenomena Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan

Jumlah penduduk miskin Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2017 adalah sekitar 488 ribu jiwa atau sekitar 13,02 persen, masih cukup tinggi apabila dibanding dengan presentase penduduk miskin nasional sebesar 10,96 persen (BPS DIY, 2017). Kalau dilihat dari distribusinya, maka jumlah warga miskin di wilayah pedesaan (16,11 persen) lebih besar daripada jumlah warga miskin di wilayah perkotaan (11,72 persen). Kondisi yang memprihatinkan menunjukkan bahwa

warga miskin di wilayah pedesaan masih terjerat sebagian besar pada persoalan penyediaan pangan berupa pengeluaran untuk pembelian beras (sebesar 33,08 persen), sedangkan di wilayah perkotaan hanya menunjukkan angka sebesar 27,31 persen.

Kesenjangan antara warga kaya dan warga miskin di Daerah istimewa Yogyakarta juga cukup tinggi yang ditunjukkan dengan angka Rasio Gini sebesar 0,432, tertinggi di Indonesia dan disusul Gorontalo sebesar 0,41. Kesenjangan di perkotaan lebih tinggi (0,435) dibanding kesenjangan yang terjadi di pedesaan (0,340). Sementara indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan (2,29) juga menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan (2,15) yang berarti warga miskin pedesaan harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup dengan membayar pengeluaran konsumsi yang lebih besar daripada warga miskin perkotaan.

Kesenjangan tersebut nampak jelas apabila dilihat secara kewilayahan di mana angka kemiskinan di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta yang mencakup wilayah Gunungkidul (20,83 persen), Bantul (15,89 persen), dan Kulonprogo (20,64 persen) lebih tinggi dibanding dengan Wilayah Bagian Utara yakni Sleman (9,50 persen) dan Yogyakarta (8,678 persen) (BPS DIY, 2015). Fenomena ini memberikan latar belakang penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lima tahun ke depan harus memberikan fokus dan

perhatian terhadap perkembangan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta, selain untuk menyongsong “Abad Samudera Hindia” juga meningkatkan “Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh wilayah Yogyakarta pada umumnya”.

### .3. Fenomena Kesejarahan

Samudera Hindia pada abad ke-1 ternyata telah menjadi perairan yang cukup ramai oleh lalu lintas kapal besar berukuran bobot mati 200 ton yang mampu mengangkut ratusan penumpang dan barang menyusul surutnya lalu lintas “Jalur Sutera Lintas Utara” yang menghubungkan China ke Timur Tengah, karena faktor meningkatnya ancaman keamanan berkaitan dengan terjadinya banyak oerang dan kerusuhan lokal di sepanjang jalur tersebut (Munoz, 2006).

Kapal-kapal dari Persia dan Arab berlayar menyusur Teluk Persia menuju India dan Asia Tenggara dengan menggunakan pengetahuan “angin musim”. Menurut penuturan Munoz, kapal-kapal dagang meninggalkan Teluk Persia pada bulan April agar dapat mencapai pantai barat India sebelum bulan Mei. Pada bulan-bulan Juni, Juli, dan Agustus adalah waktu yang sangat berbahaya bagi pelayaran karena adanya gelombang tinggi akibat arus kencang barat daya, sehingga pada bulan-bulan tersebut pelabuhan-pelabuhan di India

Barat ditutup. Apabila kapten kapal beruntung karena perjalanan yang dibawa angin lebih cepat dari waktu yang seharusnya, maka dia akan meneruskan pelayaran ke Pantai Timur India, Teluk Bengali, dan tiba di Pantai Barat Pulau Sumatera atau di Semenanjung Malaysia pada bulan September. Kapal-kapal akan kembali lagi ke perairan Arab dan Teluk Persia pada angin musim Timur Laut, yakni pada bulan November dan Desember.

Pada jeda waktu menunggu angin musim datang untuk dapat mendorong kapal-kapal untuk dapat berlayar lagi, maka kapten kapal dan para pedagang beristirahat, bergaul dan saling bertukar budaya dengan penduduk setempat, sehingga apa yang kita sebut saat ini sebagai “multikulturalisme”, “kosmopolitanisme”, dan “globalisme” sebetulnya telah ada dan terjadi pada abad ke-1 melalui kekuatan maritim Samudera Hindia. Hal itu menunjukkan bukti bahwa Samudera Hindia yang memiliki bentang ruang air sangat luas, ternyata bukan menjadi pemisah kantong-kantong peradaban yang tersebar di ujung-ujung perairannya, melainkan justru menyatukannya ke dalam satu jaringan peradaban yang sangat kuat dan jejaknya telah menjadi bagian kehidupan dan penghidupan kita saat ini.

Sidang Paripurna DPRD DIY yang saya hormati.

Melompat ke abad ke-16, sebuah peta kuno yang diberi judul *Maris Pacifici* merupakan peta pertama kawasan perairan Samudera Pasifik yang dibuat pada tahun 1589 oleh Abraham Ortelius, menunjukkan fenomena yang sangat menarik. Di dalam peta tersebut digambarkan dua buah perahu layar yang sedang berlayar melintasi Samudera Pasifik. Pada bagian atas yang menghubungkan Wilayah Asia dengan Wilayah Amerika Utara digambarkan dengan perahu kecil, sedangkan di bagian bawah yang menghubungkan Wilayah Amerika Selatan dengan Wilayah Pasifik dari Asia Bagian Selatan digambarkan dengan perahu besar. Fenomena ini sungguh menarik, bahwa dimungkinkan sebelum Benua Australia didarati oleh kapal Inggris pada tahun 1788, telah terbentuk alur pelayaran yang cukup besar di wilayah Pasifik yang secara spekulatif barangkali menghubungkan Wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan Wilayah Amerika Selatan.

Seandainya asumsi spekulatif ini benar, maka pertanyaan spekulatif berikutnya yang tentu saja memerlukan kajian mendalam dari bidang sejarah dan arkeologi adalah mengapa bentuk dan beberapa detail Kuil Maya yang dibangun di Wilayah Amerika Selatan mirip sekali dengan bentuk dan beberapa detail Candi Sukuh dan Candi Cetho di Jawa Tengah? Apakah keduanya terjadi muncul terbangun secara kebetulan saja mengikuti faham teori “multi regionalism”, ataukah

memang pernah ada “flow of ideas” yang telah dibawa oleh pelayaran kuno yang telah melintasi dari Asia ke Amerika Selatan atau sebaliknya? Sekali lagi, tentu hipotesis atau asumsi ini memerlukan kajian yang mendalam, namun yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa spirit pelayaran dari Samudera Hindia menuju ke Samudera Pasifik dan sebaliknya, tentu pernah ada atau pernah terjadi, sehingga alasan untuk menghadapkan dan menghadirkan kembali pentingnya Wilayah Perairan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan khususnya Wilayah Pulau Jawa Bagian Selatan, adalah bukan suatu upaya yang tidak berdasar pada sejarah.

Dalam konteks Pulau Jawa, kisah perjalanan laut dari Jawa ke arah wilayah Indonesia Timur telah terjadi pada abad ke-15:

“.....setelah memasuki abad ke-15, terutama ketika pelabuhan Malaka menggantikan kedudukan Tuban sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara sekitar tahun 1400 , pedagang Jawa melakukan ekspansi langsung ke Wilayah Indonesia Timur untuk mengimbangi upaya pedagang Cina yang hendak langsung mencari sendiri komoditas rempah-rempah ke wilayah ini. Pada saat itu pula, produksi beras dan barang-barang lain yang berasal dari Jawa diperdagangkan langsung oleh pedagang-pedagang Jawa di Wilayah Indonesia Timur...” (cf. Houben 1996,

Reid 1992 dalam Rahardjo, Supratikno 2011: 293-294).

Pernyataan tersebut menguatkan bahwa nenek moyang orang Jawa telah cukup lama mengakrabi dua alam kehidupan perekonomian, yakni pertanian dan perdagangan melalui laut atau yang kita kenal sebagai “among tani dagang layar”. Dengan demikian, pilihan tema kemaritiman sebagai payung kebijakan Pembangunan Lima Tahun ke depan merupakan upaya menyambung sejarah yang telah lama diukir oleh nenek moyang, namun kemudian telah dilupakan sejak sekitar 1670-an melalui penghancuran sendiri armada-armada independen pedagang Jawa oleh Amangkurat I (Ricklefs, 2002).

## **.II. ESENSI “ABAD SAMUDERA HINDIA” DALAM TRILOGI FILOSOFI KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sidang Paripurna DPRD DIY yang saya muliyakan,

Keempat fenomena yang telah dipaparkan di atas, dalam kesempatan yang sangat mulia ini saya usulkan sebagai landasan empiris sekaligus landasan historis untuk membangun tema “Abad Samudera Hindia” sebagai payung berpikir dan bertindak untuk merumuskan dan melaksanakan program-program pembangunan lima tahun ke depan. Tema ini sangat gayut dengan Trilogi Filosofi Keistimewaan Yogyakarta yaitu Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti.

Sangat disadari memang, bahwa pada lima tahun kemarin, ketika Trilogi Filosofi tersebut dipadukan dengan tema “Renaisans Yogyakarta” telah banyak capaian-capaian yang diraih secara konsisten dan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam membawa perubahan-perubahan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun juga harus diakui secara jujur, bahwa masih terdapat beberapa “gap” atau kesenjangan antara pesan-pesan filosofi dan konsep-konsep Renaisans dengan program-program yang disusun serta pelaksanaannya di lapangan. Untuk itulah, tema baru ini (Abad Samudera Hindia)

diletakkan untuk selain mengisi kembali celah-celah kesenjangan yang masih tertinggal tersebut, juga sebagai landasan pijak untuk membawa Daerah Istimewa Yogyakarta meraih capaian-capaian besar yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia-manusia Yogyakarta, pada lima tahun ke depan.

Tema “Abad Samudera Hindia” secara tegas meneguhkan kembali sumbu imajiner Gunung Merapi – Laut Kidul yang memiliki makna dan ajaran harmoni kosmos, dalam pengertian bahwa bentang ruang wilayah Yogyakarta mulai dari Puncak Gunung Merapi sampai Bibir Pantai dan Lidah Air Laut Kidul, merupakan suatu kesatuan bentang ruang ekologis, yang harus diperlakukan secara utuh, ibaratnya sabagai satu sosok tubuh manusia yang memiliki kepala, badan, dan kaki. Dalam konsepsi kosmos itu, maka perlakuan pembangunan di Wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta harus memiliki “tenggang ekologis” dengan wilayah Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo. Demikian pula sebaliknya, perlakuan pembangunan di wilayah Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo harus memiliki “rujuk ekologis” dengan wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta. Untuk itulah filosofi Hamemayu Hayuning Bawana yang analog dengan konsep Sustainable Development, sangat relevan dan sangat diperlukan untuk Hamemayu Hayuning Ngayogyokarto Hadiningrat.

Dalam konsepsi “tata air” dan “tata budaya sawah” maka Gunung Merapi merupakan “sangkan” bagi “dumadi”-nya tata kehidupan hijau di bentang wilayah sampai ke wilayah daratan pesisir Laut Kidul. Dalam pesan filosofis “Sangkan Paraning Dumadi”, jalinan antara Gunung Merapi dengan Laut Kidul mengajarkan tentang sejarah bentang ruang fisisik Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana Merapi dengan kapasitasnya yang melimpah telah menyuburkan dan menghidupkan bentang ruang khususnya di wilayah Sleman, Yogyakarta dan Bantul. Namun demikian Gunung Merapi juga punya kuasa untuk mengubur peradaban manusia Yogyakarta (yang pada waktu itu bernama Mataram kuno dengan pusatnya di Medang) yang ditegakkan pada tahun 732 M oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang kemudian setelah sekitar dua ratus tahun berjaya, dikubur oleh lahar Merapi (Munoz, 2006), sehingga cucu keturunannya yang bernama Sindok terpaksa memindahkannya ke Jawa Timur pada tahun 929 M (Rahardjo, 2011). Bentang Mataram kuno setelah terkubur oleh lahar Merapi kemudian digantikan oleh bentang ruang baru tempat kita saat kemarin, saat ini dan saat nanti membangun peradaban baru Yogyakarta.

Dari sisi lain di luar perspektif spiritual, filosofi Manunggaling Kawula lan Gusti sebagai suatu konsepsi kepemimpinan ideal dan pelapisan sosial dalam kerangka membangun kesejahteraan rakyat, secara

implisit pernah tertulis dalam Prasasti Canggal (732 M) seperti dituturkan Rahardjo (2011):

“Gagasan tentang kepemimpinan ideal yang menggabungkan kemampuan membagi kekayaan, meningkatkan kesejahteraan dan prestasi di bidang kemiliteran, mula-mula disebutkan dalam Prasasti Canggal (732 M). Prasasti ini memuat pujian tentang kepemimpinan ideal yang ditujukan kepada Sanna, yakni mendahului raja Mataram pertama, Sanjaya....bahwa kedudukan yang dicapai Sanna didahului oleh prestasi-prestasi yang terpuji. Sebagai penguasa, ia melaksanakan tanggungjawabnya untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyatnya...” (cfr. Sarkar, 1971: 21; Wicks, 1992: 246, dalam Rahardjo, 2011:69-70).

“Gagasan-gagasan Sanna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tercermin dalam sumber-sumber prasasti yang berkaitan dengan pemberian anugerah sima oleh raja dengan diikuti oleh pembukaan tanah lama kurang produktif (ladang, pekarangan, kebun) menjadi lahan baru yang lebih produktif yakni sawah. Pranata Sima untuk meningkatkan kesejahteraan tampak sangat dominan pada masa itu” (Rahardjo, 2011: 70).

Dalam konteks Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat , praktikum dari Pranata Sima seperti yang telah dilakukan oleh Raja Sanna tersebutm telah

dilakukan oleh kasultanan sejak HB I (1755-1950) melalui kebijakan pertanahan yang berupa *hak hanganggo turun-temurun, hak handarbe, hak angunduh (pangarem-arem, lungguh bengkok, kepentingan umum, kas desa), ngindung, dan magersari* (Suyitno, tt). Dalam konteks “Abad Samudera Hindia”. khususnya kaitan dengan pembangunan wilayah Yogyakarta Bagian Selatan, maka konsep Pranata Sima ini terasa masih sangat relevan dengan situasi saat ini walaupun usianya sudah hampir 1.300 tahun. Konsep tersebut mirip dengan konsep Land Sharing yang digunakan dalam konteks pembangunan perkotaan modern, yang digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat sekaligus menumbuhkan ekonomi negara.

Untuk melindungi warga masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat Yogyakarta Bagian Selatan khususnya, konsep *Land Sharing* dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam pembangunan wilayah Yogyakarta Bagian Selatan, dalam rangka menyongsong “Abad Samudera Hindia”.

### **III. TEMA “ABAD SAMUDERA HINDIA” SEBAGAI PAYUNG BERPIKIR ARAH PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM LIMA TAHUN MENDATANG**

Sidang Paripurna DPRD DIY yang saya mulyakan,

Esensi dari tema “Abad Samudera Hindia” yang ingin ditekankan di sini adalah tentang “perjumpaan” dalam pengertian yang sangat luas. Sebagai paradigma baru, “Abad Samudera Hindia” telah melahirkan perjumpaan akbar antar tokoh-tokoh perwakilan negara yang memiliki bibir pantai bersinggungan dengan air laut Samudera Hindia, yang kemudian berujung pada terbentuknya konsensus yang melahirkan asosiasi negara-negara berpesisir Samudera Hindia (IORA = Indian Ocean Rim Association). Perjumpaan akbar tersebut kemudian diikuti dengan perjumpaan-perjumpaan rinci seperti perjumpaan budaya, perjumpaan ekonomi, perjumpaan investasi, perjumpaan pariwisata, perjumpaan pendidikan, serta perjumpaan-perjumpaan lainnya.

“Perjumpaan” dari beragam manusia yang berada dari beragam tempat dan berbagai latar ragam budaya dalam kerangka besar Samudera Hindia, sebenarnya telah terjadi sejak abad ke-1 seperti yang telah digambarkan oleh Munoz (2006) di depan. Hal ini disangatkan oleh Lombart (2008) dalam penuturannya tentang “Nusa Jawa Silang Budaya” sebagai berikut:

“...dalam hal jaringan-jaringan perniagaan Asia, dasarnya sama, menyangkut suatu masyarakat yang terbuka pada angin laut lepas dan tercangkok pada sejumlah kota, pelabuhan yang hampir sama satu sama lain...jelas bahwa kawasan nusantara seperti halnya Italia di Eropa, pernah lama mengenal ‘pola’ kota niaga yang terbuka pada perdagangan internasional besar dan relatif bebas dari kebakuan pola budaya agraris...dari ujung satu ke ujung lain Samudera Hindia, pengamat luar tidak bisa tidak terkesan okeh keberadaan komunitas-komunitas orang Khoja India, orang Amerika, orang Arab, orang China Hokchia, kelompok Banyan, Chettiar, Parsi, Gujarat, Ismallia, ... di dalam gugusan budaya ini, dunia perkotaan tidak terputus dari dunia pedesaan, yang ada adalah kesinambungan yang mulai dari istana dan meluas sampai ke pinggir-pinggir kawasan hutan....” (Lombart, 2008: 170-174).

“Perjumpaan” dalam pengertian Lombart di atas adalah suatu peristiwa “silang budaya”, di mana dua budaya atau lebih, bertemu dan saling menyapa serta saling bertukar diri untuk selanjutnya “memampat membentuk energi baru”, sehingga muncullah budaya baru yang mengantar masyarakat menuju perubahan atau kemajuan.

Yogyakarta, pada hakikatnya secara geografis, ekonomi, sosiologis, kultural, dan histori ada pada posisi pusat persilangan budaya, seperti apa yang

digambarkan oleh Lobart tersebut. Sifat-sifat masyarakat yang disentuh oleh peristiwa silang budaya biasanya memiliki sifat-sifat yang disebut oleh Dahana (2015) sebagai “Masyarakat Bahari” atau masyarakat yang memiliki “Basic Value Kota Bandar”, yakni masyarakat yang menjunjung tinggi kesetaraan, kebebasan, toleransi, akseptansi, keterbukaan, penerimaan, persaudaraan, interkultural, untuk kemudian menjelma menjadi sifat-sifat keseharian seperti dermawan, gotong-royong, pekerja keras, jujur, tekun, dan kreatif.

Secara eksplisit esensi dari “Abad Samudera Hindia” yang nantinya akan diletakkan sebagai tema dan payung berpikir dalam perumusan Arah Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan, dapat digambarkan sebagai berikut.

.1. Yogyakarta akan bertindak secara aktif mengisi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam kerangka perjanjian IORA (Indian Ocean Rim Association) untuk mengembangkan Wilayah Yogyakarta Bagian Selatan semata-mata untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja secara keseluruhan, baik yang tinggal di Wilayah Selatan maupun yang tinggal di Wilayah lain di seluruh Yogyakarta. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab.

.2. Semangat “Perjumpaan” dan “Silang Ekonomi” akan diletakkan sebagai strategi kebudayaan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan yang masih menggelayut di wilayah Yogyakarta secara keseluruhan, dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja, melalui langkah-langkah perjumpaan dan saling silang antara pelaku ekonomi kuat dengan pelaku ekonomi lemah, antara pelaku ekonomi perkotaan dengan pelaku ekonomi pedesaan, antara pelaku ekonomi modern dengan pelaku ekonomi tradisional, antara pelaku ekonomi bermodal besar dengan pelaku ekonomi bermodal kecil, dan antara pelaku ekonomi internasional dengan pelaku ekonomi lokal. Pendek kata, melalui strategi “Strategi Perjumpaan dan Saling Silang”, maka dalam Lima Tahun ke depan , pembangunan ekonomi di Wilayah Yogyakarta diarahkan untuk tidak saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

.3. Semangat “Perjumpaan” dan “Silang Keruangan Wilayah” akan diletakkan sebagai strategi untuk memajukan wilayah-wilayah pinggiran melalui silang infratraktur wilayah, sehingga interkoneksi antara pemukiman-pemukiman terpencil dengan pusat-pusat pelayanan masyarakat akan terbangun secara baik termasuk “silang kerjasama infrastruktur” dengan

wilayah-wilayah kabupaten tetangga terutama untuk wilayah-wilayah tersulit karena faktor topografi.

.4. Semangat “Perjumpaan” dan “Silang Birokrasi” akan diletakkan sebagai strategi menciptakan program-program besar yang memiliki kapasitas dan dampak besar bagi perubahan-perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga ke depan harus dikurangi terciptanya banyak program-program kecil berbiaya besar, untuk kemudian digantikan dengan program-program besar berdampak besar melalui program-program berbasis “Silang SKPD”. Dengan perkataan lain, ke depan program-program “Silang SKPD” yang berbasis “Tema-tema Besar” akan didorong prioritasnya dibanding dengan program-program kecil berbasis SKPD tunggal.

.5. Semangat “Perjumpaan” dan “Silang Birokrasi” akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui strategi “silang vertikal” (keterbukaan di internak SKPD), “strategi silang horisontal” (keterbukaan antar SKPD, dan “strategi silang hirearki” (gabungan keterbukaan vertikal dan keterbukaan horisontal antar SKPD).

.6. Semangat “Perjumpaan” san “Silang Kelembagaan” akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui “silang belajar” ke lembaga-lembaga lain di dalam maupun ke

luar lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar daripengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan “Trilogi SDM DIY” atau “E2-K” yaitu ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos dalam konteks Trilogi SDM DIY menyanggah pesan perubahan persepsi (mindset) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai “karya peradaban”, yang menyanggah arti bahwa semua pelayanan birokrasi adalah “karya peradaban”, karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi peradaban DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika dalam konteks Trilogi SDM DIY menyanggah pesan “kemuliaan” dalam pengertian bersatunya “pikiran mulia, niat mulia, tindakan mulia”, dalam rangka menciptakan SDM yang “berintegritas” yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas dalam konteks Trilogi SDM DIY menyanggah pesan adanya pergeseran mindset, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi sebagai “karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran”, melainkan menuju pada pembentukan “sikap” bahwa karya birokrasi DIY adalah “kerja yang dapat menjadi rujukan” bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional dan internasional). Ketika karya tersebut menjadi “rujukan”, maka karya tersebut

merupakan karya yang berkualitas yang merupakan hasil dari karya yang “diniati” untuk menjadi “karya berkualitas tinggi”. Untuk itu membangun birokrasi dengan “ruh budaya karya berkualitas tinggi” akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan. Ketiga aspek “Trilogi SDM DIY” merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Skandinavia dan Jepang adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi. Negara Jerman pada masa Hitler adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika rendah, dan budaya kualitas tinggi. Salah satu negara di dunia yang sedang tumbuh dengan cepat (namun sayang sekali) memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika rendah, dan budaya kualitas rendah.

.7. Semangat “Perjumpaan” dan “Silang Budaya” akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta, melalui program-program saling silang perjumpaan antara (i) budaya Jawa dengan budaya-budaya etnik lain yang ada di Yogyakarta, (ii) antara budaya Jawa dengan budaya antar bangsa termasuk dengan budaya-budaya bangsa yang tergabung dalam IORA (Yogyakarta berpotensi menjadi “hub” atau pusat budaya IORA), (iii) silaturahmi budaya antar kelompok agama yang ada di Yogyakarta dan Indonesia, (iv) program silang belajar antar sekolah pada kelas-kelas awal sekolah

menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk “saling kenal sekolah” sehingga mata rantai dan sejarah pertikaian atau tawuran antar sekolah tertentu dapat diputus.

Sidang Paripurna DPRD DIY yang saya hormati.

Demikianlah pemikiran-pemikiran visi, misi, dan arah pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lima tahun ke depan, sebagai acuan bagi disusunnya program-program pembangunan daerah lima tahun ke depan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 2 Agustus 2017

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Sri Sultan Hamengku Buwono X